



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 telah diterbitkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2019, dan setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri sesuai surat Nomor 050/3124/Bangda tanggal 7 Agustus 2020, telah dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur dimaksud, sehingga dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2020;
- c. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- b. Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2020 Triwulan II;
- c. Perkembangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan;
- BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II RKPD Tahun 2020;
- BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD;
- BAB VI. Penutup;

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

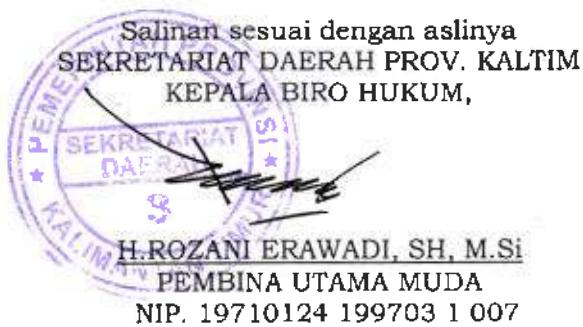
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 51.



LAMPIRAN

PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKP
D)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

Hal

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

i

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Penyusunan Perubahan RKPD	2
1.3.	Maksud Dan Tujuan	3
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2020	
2.1.	Capaian Realisasi Pelaksanaan Semester I Tahun 2020 RPJMD Kaltim 2019-2023	2
2.2.	Capaian Kinerja Triwulan II RKPD Tahun 2020	13
2.3.	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	15
2.4.	Rasionalisasi Anggaran Mendukung Penanganan Covid-19	16
2.5	Kesimpulan	17
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1.	Kinerja Ekonomi Daerah	1
3.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	1
3.1.2.	Inflasi	4
3.2.	Perubahan Asumsi dan Kebijakan Ekonomi Daerah	5
3.2.1.	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	5
3.2.2.	Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah	9
3.3.	Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	10
3.3.1.	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	10
3.3.2.	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	11
3.3.3.	Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	13
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	1
4.2.	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2020	5
BAB V	RENCANA PRORAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD	
5.1.	Pagu Perangkat Daerah	1
5.2.	Program Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah yang Disesuaikan	2
BAB IV	PENUTUP	

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan. Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa RKPD dapat dirubah apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dengan memperhatikan amanat peraturan tersebut, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Semester I RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, dipandang perlu untuk melakukan dan menyusun Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Adapun beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional serta mempengaruhi asumsi makro ekonomi dan keuangan daerah;
2. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian, keuangan daerah dan tatanan sosial masyarakat;
3. Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2020 diperkirakan tidak mencapai target yang ditentukan akibat adanya kebijakan penyesuaian/rasionalisasi pada sebagian anggaran belanja daerah hingga 50 persen. Serta percepatan pengutamaan alokasi (*refocusing*) program/kegiatan yang diperuntukan bagi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial;
4. Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2019) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2020 dalam

rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kaltim 2019-2023;

5. Perlunya dilakukan penyesuaian program/kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai langkah responsif pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Kalimantan Timur;
2. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kaltim 2019-2023;
3. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan perubahan Renja PD tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan P-RAPBD Perubahan, yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan (PPAS-P) Tahun 2020.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2020

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2020 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2020.

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2020 adalah untuk :

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan II Tahun 2020;
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020;
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2020;
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 digunakan sebagai :

- a. Bahan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020;
- b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

Renja-PD disusun dengan berpedoman pada Renstra-PD dan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, serta menyesuaikan dengan kebijakan dalam RKPD. Renja-PD diverifikasi oleh Bappeda, oleh karena itu judul program, judul kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu Renja-PD harus sama dengan Renja-PD.

Sedangkan APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang disusun berdasarkan RKPD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan RKPD memiliki hubungan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD.

2.1. Capaian Realisasi Pelaksanaan Semester I Tahun 2020 RPJMD Kaltim 2019 - 2023

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga Semester I tahun 2020 menunjukkan beberapa program telah mulai berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2020. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur :

**Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I dan II Tahun 2020**

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan II	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7		9
	1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	1	1	Pendidikan						
1	1	1	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	70	-	-	DISDIKBUD
2	1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	98	-	-	DISDIKBUD
3	1	1	23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang	13.000	-	-	DISDIKBUD

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan II	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7		9
			Sumber Daya Masyarakat	berprestasi (orang)					
4	1	1	38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	2.500	-	-	DISDIKBUD
5	1	1	39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	72	-	-	DISDIKBUD
6	1	1	40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	72	-	-	DISDIKBUD
7	1	1	41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB)	150	-	-	DISDIKBUD
8	1	1	42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	55	-	-	DISDIKBUD
9	1	1	10 7	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	90	-	-	DISDIKBUD
	1	2		Kesehatan					
10	1	2	17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	90	90	90	DINKES
11	1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	43	24	24	DINKES
12	1	2	56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasylakes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	70	25,2	46,5	DINKES
	1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
13	1	3	15	Program Pembangunan	Tingkat kemantapan	58,88	-	-	DPUPR&PERA

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan II	Status Realisa si Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7			9	
			Jalan dan Jembatan	jalan provinsi (%)						
1 4	1 3	16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8.322	-	-			DPUPR&PERA
1 5	1 3	17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	65,23	-	-			DPUPR&PERA
1 6	1 3	70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kot a (%)	75,34	-	-			DPUPR&PERA
	1 4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1 7	1 4	15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	41.722	-	-			DPUPR&PERA
	1 5		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1 8	1 5	21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	69	-	-			BAKESBANGPOL
1 9	1 5	49	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	25%	-	-			BPBD
2 0	1 5	51	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa/Keluraha n (%)	88%	-	-			BPBD
	1 6		Sosial							
2 1	1 6	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan (%)	43,1 (250 Orang)	70 Orang	180 Orang			DINSOS
2 2	1 6	23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani	1.500 (2360 Orang)	0 Orang	320 Orang			DINSOS
	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
	2 1		Tenaga Kerja							
2 3	2 1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80%	-	59,67%			DISNAKERTRANS
	2 2		Pemberdayaan Perempuan dan							

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan II	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	6	7		9
				Perlindungan Anak						
2 4	2	2	20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	40	-	-		DKP3A
2 5	2	2	21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	82	-	-		DKP3A
2 6	2	2	35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	0,054	-	0,022		DKP3A
2 3	2	3		Pangan						
2 4	2	4		Pertanahan						
2 5	2	5		Lingkungan Hidup						
2 7	2	5	26	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	550	518	542		DLH
2 8	2	5	59	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemar Sedang (8)	0 (Data diperoleh diakhir tahun)	0 (Data diperoleh di akhir tahun)		DLH
2 6	2	6		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
2 7	2	7		Pemberdayaan Masyarakat Desa						
2 9	2	7	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	25	5	5		DPMPD
3 0	2	7	28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	103 (363)	338	338		DPMPD
3 1	2	7	29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jjumlah desa berkembang (Desa)	25	0	18		DPMPD
3 2	2	7	30	Program Kampung Iklim	Jumlah Kampung/Desa Iklim(Desa)	22	0	0		DPMPD
2 8	2	8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2 9	2	9		Perhubungan						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi i Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan II	Status Realisa si Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	6	7		9
3 3	2	9	15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	598	570	570		DISHUB (capaian Tahun 2019)
3 4	2	9	19	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	85	-	-		DISHUB
	2	1 0		Komunikasi dan Informatika						
3 5	2	1 0	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8	3,04	3,04		DISKOMINFO
	2	1 1		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
3 6	2	1 1	20	Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas	100 Koperasi	-	-		DISPERINDAGKOP
	2	1 2		Penanaman Modal	Jumlah UKM Naik Kelas	200 UKM	-	-		
3 7	2	1 2	18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	13	9	11		DPMPTSP
3 8	2	1 2	27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)	7	*	*		DPMPTSP *Ket: 36 Perusahaan (Capaian Tahun 2019)
	2	1 3		Kepemudaan dan Olah Raga						
3 9	2	1 3	33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	14,49%	0	-		DISPORA
4 0	2	1 3	35	Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	0,15%	0	0,11		DISPORA
	2	1 4		Statistik						
	2	1 5		Persandian						
	2	1 6		Kebudayaan						
4 1	2	1 6	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	150	-	-		DISDIKBUD
	2	1 7		Perpustakaan						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi i Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan II	Status Realisa si Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	6	7		9
4 2	2	1 7	23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	455.900	113.477	162.127		DPKD
	2	1 8		Kearsipan						
	3			Urusan Pilihan						
	3	1		Kelautan dan Perikanan						
4 3	3	1	25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	158.055 Ton	44.780	60.765		DKP
				Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)		50	11	13		DKP
4 4	3	1	21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	155.516 Ton	36.146	72.292		DKP
4 5	3	1	29	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)		1	1	-	DKP
4 6	3	1	26	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2,7 Miliar Ekor	400 Juta Ekor	800 Juta Ekor		DKP (UPTD. BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR)
	3	2		Pariwisata						
4 7	3	2	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2 Kawasan	-	-		DISPAR (Capaian Tahun Lalu 3 Kawasan)
	3	3		Pertanian						
4 8	3	3	41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	240.245 Ton	73.738 Ton	108.279 Ton		DPTPH
4 9	3	3	51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi (Ton)	423 Ton	79.410 Ton	135.125 Ton		DPTPH
5 0	3	3	58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Juta Ton)	16.812.938 Ton	-	5.043.881		DISBUN
5 1	3	3	76	Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO ₂ eq)	4,08	-	6.6		DISBUN

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan II	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	6	7		9
5 2	3	3	80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	-	8		DISBUN
5 3	3	3	93	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2	-	4		DISBUN
5 4	3	3	34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	35	4	4		DISNAKKESWAN
					Nilai Tukar Usaha Peternakan	118,5	101,08	101,60		
5 5	3	3	90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	20	3,98	8,96		DISNAKKESWAN
					Calving Interval (Bulan)	18	18,66	18,31		
	3	4		Kehutanan						
5 6	3	4	16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNBP sektor kehutanan (Rp. Miliar)	165	29,99 M	29,99 M		DISHUT
5 7	3	4	39	Program Perlindungan dan KSDAE	(%)Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤ 1,75	0	0,002%		DISHUT
5 8	3	4	41	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase meningkatnya tutupan lahan	13,98	0,15%	6,63%		DISHUT
5 9	3	4	42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32000	6.473,2 7 Ha	16.331,2 7 Ha		DISHUT
	3	5		Energi dan Sumber Daya Mineral						
6 0	3	5	37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	989.607	1.011.4 85	1.040.82 3		DESDM
6 1	3	5	47	Program Diversifikasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,63 (4,82)	-	-		DESDM
	3	6		Perdagangan						
	3	7		Perindustrian						
6 2	3	7	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	1	1,63	-		DISPERINDAGKOP
	3	8		Transmigrasi						
	4			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
	4	1		Kesekretariatan Daerah						

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan I	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020 Triwulan II	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7		9
63	4	1	42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	61	36.36	59.61 %	BIRO ORGANISASI
64	4	1	60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	75	75.00	100.00 %	BIRO ORGANISASI
65	4	1	80	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	90	91.89	102.10 %	BIRO ORGANISASI
66	4	1	81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	68,42	70.27	102.70 %	BIRO ORGANISASI
	4	2		Pengawasan					
67	4	2	21	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Level kapasitas APIP	3	3	3	INSPEKTORAT
68	4	2	99	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Hasil Penilaian Integritas	70	-	66,67	INSPEKTORAT
	4	3		Perencanaan					
69	4	3	48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	85	85,13	85,13	BAPPEDA
	4	4		Keuangan					
70	4	4	30	Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	4	-	-	BAPENDA

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 70 program prioritas di Kalimantan Timur, terdapat 31 (tiga puluh satu) program prioritas yang pencapaian targetnya

berada di bawah. Capaian Program - program tersebut baru dapat disampaikan pada akhir pelaksanaan dan saat ini baru dalam proses tahap kegiatan dari program-program tersebut. Adapun SKPD yang masih berada dibawah target Seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim.

Sedangkan capaian tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2020	Keterangan
TUJUAN 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKARAKTER BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	75,43	76,61*	
Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	74,5	73,88*	
Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,50	9,70*	
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13	13,69*	
Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,74	74,22*	
TUJUAN 2 : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	TINGKAT KEMISKINAN (%)	5,94	6,10*	Maret 2020
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,71	57,53*	
Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,23	56,33*	
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	0,52	38,25*	
TUJUAN 3: MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	3,5±1	-0,44	
Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Persentase Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB (%)	4,60	15,07*	Dihitung akhir tahun 2020
Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	478	503	
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,97	1,05	
TUJUAN 4: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI NON MIGAS DAN NON BATUBARA (%)	6±1	-0,88	
Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20	18,28	
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	33,08	4,64	Nilai Realisasi Investasi TW 1, Press Release TW. II akan dilakukan Juli 2020

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2020	Keterangan
Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,54	0,56*	
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	67,41	25,40	
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,34	0,33*	
Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,4	4,34*	
Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,5	1,54*	
Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,05	1,12*	
Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84	11*	
TUJUAN 5 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	INDEKS GINI	0,329	0,335*	September 2019
Sasaran 18: Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	11.026.150	2.541.918	
	Jumlah barang (ton)	344.850.000	186.731.771	
Sasaran 19: Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	3	2*	
Sasaran 20: Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	75,00	67,23*	
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.008,5	13.874,11*	
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	575	641*	
Sasaran 21: Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	533,56	645,47*	
Sasaran 22: Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	87,50	89,29	
TUJUAN 6: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	75,85	75,85*	Hasil Perhitungan diperoleh pada akhir tahun
Sasaran 23: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26,89	17,53	
	Penurunan Emisi (juta ton CO2eq)	12,18	8,44	

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2020	Keterangan
Sasaran 24: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	140	No Data	Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/2553/0709-III/BPKAD tanggal 14 April 2020 Hal Rasionalisasi Belanja 50 % pada SKPD Tahun 2020, sehingga kegiatan-kegiatan bidang yang program dan kegiatannya mendokrak terlaksananya a indikator capaian RKPD 2020 tidak dapat dilaksanakan .
Sasaran 25: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	69,01	66,46*	
TUJUAN 7: MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	B (70,50)	B (68,60)*	
Sasaran 26: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,00	76,55*	
Sasaran 27: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,50	82,22*	
Sasaran 28: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3*	untuk tahun 2020 penilaian akan dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2020 Jadi untuk sementara ini capaian untuk Semester I belum dapat dilaporkan karena masih dalam proses pembentukan Tim Evaluasi Maturitas SPIP

2.2. Capaian Kinerja Triwulan II RKPD Tahun 2020

Capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah diperoleh dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah setiap tahun. Oleh karena itu konsistensi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja Perangkat Daerah sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Table 2.3

Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Semester I (Triwulan II) Perangkat Daerah terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Bidang Urusan	Pagu RKPD	Realisasi RKPD TW I			Realisasi RKPD TW II		
			Realisasi Keuangan		Realisas i Fisik	Realisasi Keuangan		Realisas i Fisik
			Rp	%	%	Rp	%	%
1	Badan Kepegawaian Daerah	20.808.647.000	3.457.609.125	16,62	22,04	6.561.000.103	31,5 3	43,99
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.635.000.000	1.933.774.337	22,39	12,76	2.274.481.606	26,3 4	39,92
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.450.000.000	917.574.670	10,86	8,57	2.667.533.864	31,5 7	32,92
4	Badan Pendapatan Daerah	56.246.999.000	7.414.720.962	13,18	12,56	20.048.928.776	35,6 4	39,72
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.200.000.000	585.925.817	13,95	14,47	1.078.524.507	25,6 8	65,62
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45.389.920.000	3.283.584.787	7,23	11,53	8.209.817.765	18,0 9	23,09
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.969.791.000	3.223.513.706	10,76	5,44	7.168.982.303	23,9 2	28,62
8	Badan Penghubung Provinsi	9.200.200.000	1.626.580.708	17,68	1,72	3.363.752.191	36,5 6	36,54
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.050.000.000	4.120.529.239	8,58	18,07	10.260.696.450	21,3 5	41,09
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	71.776.650.000	2.574.170.657	3,59	6,31	8.867.877.901	12,3 5	32,22
11	Dinas Kehutanan	328.215.057.750	9.734.117.787	2,97	5,75	55.188.666.530	16,8 1	21,68
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	58.534.900.000	1.723.545.656	2,94	5,86	10.294.551.231	17,5 9	32,67
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.550.000.000	743.036.044	6,43	7,06	2.263.588.346	19,6	30,00
14	Dinas Kesehatan	116.155.611.500	4.250.958.592	3,66	6,62	34.171.898.787	29,4 2	38,11
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.825.000.000	1.208.738.393	5,80	9,34	3.779.732.933	18,1 5	30,53
16	Dinas Lingkungan Hidup	23.247.396.000	1.756.451.990	7,56	5,97	4.270.204.904	18,3 7	45,02
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	57.006.464.260	3.561.565.543	6,25	8,63	6.524.176.700	11,4 4	31,92

No	Bidang Urusan	Pagu RKPD	Realisasi RKPD TW I			Realisasi RKPD TW II		
			Realisasi Keuangan		Realisas i Fisik	Realisasi Keuangan		Realisas i Fisik
			Rp	%	%	Rp	%	%
18	Dinas Pariwisata	16.000.000.000	1.860.637.880	11,63	12,64	2.694.734.762	16,84	34,18
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.841.043.924.675	7.185.455.734	0,39	1,52	170.821.634.879	9,28	20,35
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12.675.250.000	1.830.890.655	14,44	11,06	3.660.572.970	28,88	38,04
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	37.658.942.000	1.859.251.153	4,94	8,16	3.677.668.808	9,77	31,58
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.000.000.000	1.604.129.767	10,69	12,72	3.974.497.092	26,5	42,05
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	763.399.852.000	31.877.553.918	4,18	8,50	85.263.276.760	11,17	28,96
24	Dinas Perhubungan	78.000.000.000	2.857.318.432	3,66	9,14	8.318.663.524	10,66	41,15
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	60.017.520.000	3.214.263.922	5,36	12,96	6.032.647.496	10,05	28,90
26	Dinas Perkebunan	45.805.722.740	2.628.094.359	5,74	6,87	6.970.609.327	15,22	31,52
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.274.957.000	1.383.648.036	19,02	15,99	2.419.546.474	33,26	38,44
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	62.422.000.000	2.173.430.410	3,48	3,60	5.392.577.552	8,64	22,82
29	Dinas Sosial	34.000.000.000	5.104.510.258	15,01	15,96	12.645.706.894	37,19	45,84
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.250.000.000	1.815.515.417	6,43	9,07	5.771.907.254	20,43	34,70
31	Inspektorat	15.012.840.000	1.757.942.902	11,71	18,37	3.551.587.239	23,66	41,51
32	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda	491.500.000.000	166.670.323.373	33,91	4,29	239.121.941.982	48,65	12,08
33	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	267.300.000.000	47.802.733.985	17,88	16,73	68.754.988.941	25,72	41,61
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	39.638.615.500	8.041.926.824	20,29	19,30	15.921.371.354	40,17	48,65
35	Satuan Polisi Pamong Praja	11.575.000.000	1.891.442.634	16,34	7,90	3.994.551.497	34,51	45,67
36	Sekretariat Daerah	173.232.304.000	15.764.811.803	9,10	6,20	35.053.225.394	20,23	45,87
37	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	5.220.610.000	143.567.342	2,75	6,64	732.045.968	14,02	25,09
38	Sekretariat DPRD	96.025.000.000	17.253.662.294	17,97	17,01	36.100.373.465	37,59	54,88
T O T A L		5.019.314.174.425	376.837.509.111	7,51	9,23	907.868.544.538	18,09	35,99

Sumber : Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Renja-Pd Triwulan II Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- a. Realisasi keuangan RKPD pada Triwulan I Tahun 2020 adalah Rp. 376.837.509.111,- atau 7,51%;;
- b. Realisasi keuangan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 adalah Rp. 907.868.544.538,- atau 18,09%;
- c. Capaian kinerja RKPD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2020 adalah 9,23%; dan
- d. Capaian kinerja RKPD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2020 adalah 35,99%.

2.3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Salah satu hasil dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja. Informasi tentang hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

- I. Faktor pendorong yang dimuat dalam laporan yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan upaya menggali potensi penambahan pendapatan daerah.
 - b. Percepatan penyelesaian penetapan status kelembagaan unit pelayanan teknis beberapa perangkat daerah.
 - c. Percepatan penyelesaian masalah penanganan Pandemi Covid-19.
 - d. Ketersediaan instrument sistem aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran.
- II. Faktor penghambat yang dirasakan dalam pelaksanaan program/ kegiatan adalah:
 - a. Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak disetiap sektor pembangunan dan pelaksanaan program/kegiatan.
 - b. Rasionalisasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 berakibat pada perubahan target capaian program dan kegiatan yang akhirnya difokuskan pada penanganan Covid-19 tersebut.
 - c. Keterbatasan waktu dan jumlah SDM pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menyebabkan masih terdapat ketidakselarasan beberapa program dan kegiatan antara dokumen RKPD/Renja-PD, APBD dan program dan kegiatan pada dokumen RPJMD/Renstra-PD.
 - d. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan sehingga menyebabkan inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, tidak terkecuali pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - e. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program kegiatan dari kementerian terkait.

- f. Keterbatasan sumberdaya aparatur dimasing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam perumusan target kinerja dan evaluasi.
- g. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang, kondisi iklim dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan, pembebasan tanah atau lahan belum dapat dilaksanakan dengan cepat serta konflik sosial lainnya.

Hasil pengendalian dan evaluasi yang diperoleh menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, dimana seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan melaporkannya secara tertib kepada kepala daerah melalui Bappeda Provinsi sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan. Bappeda menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi untuk memastikan terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah.

2.4. Rasionalisasi Anggaran Mendukung Penanganan Covid-19

Sehubungan dengan adanya musibah Pendemi Covid-19 dan berdasarkan arahan Bapak Presiden agar Pemerintah Daerah melakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 maka seluruh Perangkat Daerah melakukan rasionalisasi anggaran, berikut data rasionalisasi anggaran disetiap SKPD.

**Tabel 2.4
Rasionalisasi Anggaran**

No	Bidang Urusan	Pagu Dana Sebelum Pemotongan	Pagu Dana Setelah Pemotongan Untuk Penanganan Covid-19
1	Badan Kepegawaian Daerah	31.571.742.080	23.419.343.540
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.634.263.400	12.568.902.700
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.043.689.720	15.820.456.360
4	Badan Pendapatan Daerah	242.805.046.960	176.864.736.480
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	16.253.631.360	14.822.881.560
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56.215.473.180	43.386.978.878
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.785.065.000	27.825.125.500
8	Badan Penghubung Provinsi	12.696.845.320	8.021.409.820
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54.416.353.360	40.181.168.930
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	83.985.806.740	47.938.383.840
11	Dinas Kehutanan	536.433.782.844	500.329.993.844
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	77.902.837.380	54.336.321.190
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.395.735.040	17.664.325.520
14	Dinas Kesehatan	160.746.980.920	124.644.503.096
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	29.088.491.800	22.362.204.156
16	Dinas Lingkungan Hidup	30.580.280.240	21.331.650.240
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.852.435.380	72.265.322.460
18	Dinas Pariwisata	26.839.218.440	18.651.964.720

No	Bidang Urusan	Pagu Dana Sebelum Pemotongan	Pagu Dana Setelah Pemotongan Untuk Penanganan Covid-19
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.481.265.141.518	823.822.609.950
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	20.714.553.560	15.004.833.280
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	51.504.321.120	38.282.475.100
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.375.703.080	20.048.357.540
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.688.993.438.680	1.531.642.936.392
24	Dinas Perhubungan	57.396.346.160	37.517.381.143
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	62.478.114.560	46.969.715.009
26	Dinas Perkebunan	65.442.861.280	39.536.962.598
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	25.806.324.100	22.999.477.550
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	71.044.114.412	43.685.217.162
29	Dinas Sosial	61.103.938.200	50.388.500.860
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.730.635.280	44.050.136.280
31	Inspektorat	31.189.502.560	22.362.204.156
32	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda	705.626.296.133	699.284.444.531
33	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	369.815.794.967	352.637.486.967
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	61.487.457.280	50.963.542.090
35	Satuan Polisi Pamong Praja	22.227.628.000	17.272.223.540
36	Biro Humas	18.056.687.120	9.921.893.560
37	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	8.220.730.320	6.080.165.160
38	Biro Umum	178.591.433.525	133.366.324.682
39	Biro Administrasi Pembangunan	9.772.409.520	6.313.564.760
40	Biro Hukum	6.059.285.120	4.291.052.120
41	Biro Infrastruktur	4.109.672.000	2.400.973.500
42	Biro Kesejahteraan Rakyat	9.861.929.200	6.609.164.600
43	Biro Organisasi	11.256.147.400	7.231.973.700
44	Biro Perekonomian	4.515.088.320	2.417.188.320
45	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	7.834.712.400	6.339.424.200
46	Sekretariat DPRD	112.474.080.160	70.472.410.325
T O T A L		12.293.795.000.000	9.214.806.000.000

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan rasionalisasi anggaran hingga Rp. 3 triliun atau mencapai 2,5%, dimana dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan penanganan melalui bidang kesehatan, bidang penanganan dampak ekonomi maupun bidang jaring pengaman sosial.

2.5. Kesimpulan

1. Kesesuaian program RPJMD/Renstra dengan RKPD/Renja pada tahun 2020 sebesar 99,52%, terdapat 417 program yang konsisten, dan 2 program yang masih inkonsisten.
2. Kesesuaian kegiatan RPJMD/Renstra dengan RKPD/Renja pada tahun 2020 sebesar 97,36%, terdapat 998 kegiatan yang konsisten, dan 33 kegiatan yang masih inkonsisten.
3. Kesesuaian program RKPD/Renja dengan APBD tahun 2020 telah mencapai 85,13%, terdapat 355 program yang konsisten, dan 94 program yang masih inkonsisten.

4. Kesesuaian kegiatan RKPD/Renja dengan APBD tahun 2020 telah mencapai 75,02%, terdapat 757 kegiatan yang konsisten, dan 310 kegiatan yang masih inkonsisten.
5. Rata-rata capaian kinerja kegiatan RKPD pada Triwulan II Tahun 2020 sebesar 35,99% untuk pencapaian target *output* dan realisasi pendanaan/keuangan sebesar 18,09%.
6. Penyusunan dokumen perencanaan ditahun 2020 yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan beberapa hal mendasar lainnya, meliputi:
 - Merencanakan upaya peningkatan potensi penambahan pendapatan daerah, untuk pencapaian target standar pelayanan minimal pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
 - Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional antara lain terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat dampak Pandemi Covid-19;
 - Penyesuaian target kinerja antara untuk Pemenuhan target pembangunan agar dapat mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD Kaltim 2019-2023.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

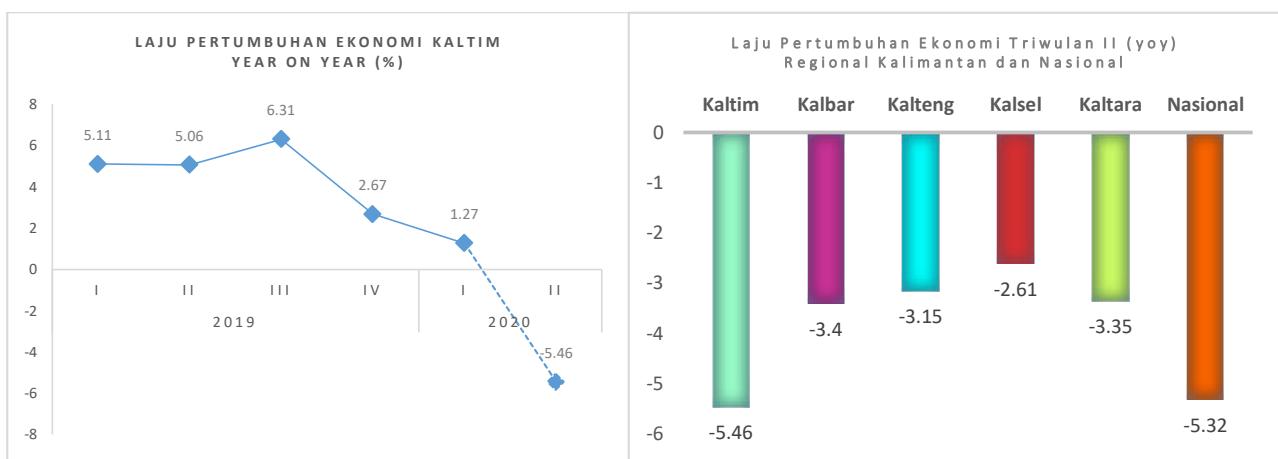
3.1. Kinerja Ekonomi Daerah

Indikator utama yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro Kalimantan Timur dalam menyusun kerangka ekonomi daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. Analisa laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Hara Konstan. Selanjutnya, laju inflasi juga merupakan variabel ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat yang menjadi salah satu komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran.

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19, seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar, bahkan lockdown mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2020 terhadap triwulan II 2019 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar negatif 5,32 persen (year on year). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Demikian juga dengan kinerja perekonomian Kalimantan Timur, laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 (year on year) mengalami kontraksi sebesar negatif 5,46 persen. Tercatat nilai Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 149,16 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp 114,25 triliun. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 ini merupakan kontraksi yang cukup tinggi dibanding dengan pertumbuhan year on year pada Triwulan I 2020 yang masih tumbuh positif sebesar 1,27 persen. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Kalimantan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan II 2020 merupakan provinsi dengan kontraksi lebih tinggi. Kontraksi ekonomi terjadi pada seluruh kawasan pada regional Kalimantan, dimana kontraksi terkecil terjadi di Kalimantan Selatan sebesar negatif 2,61 persen.



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jika dilihat secara kumulatif atau semester I tahun 2020 (c to c), laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi sebesar negatif 2,10 persen. Kontraksi Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar negatif 1,26 persen dan tertinggi di regional Kalimantan. Kontraksi ekonomi Kaltim dipicu oleh pertumbuhan negatif dari sektor utama yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan.

A. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Lapangan Usaha

Kontraksi ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan II menurut lapangan usaha disebabkan oleh melemahnya kinerja sektor utama yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan masing-masing sebesar negatif 6,88 persen dan negatif 7,74 persen. Menurunnya kinerja sector tersebut tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19, dimana semua negara-negara tujuan ekspor komoditi tersebut menurunkan produktivitas sector perindustrian nya karena adanya kebijakan social distancing di China dan lockdown di India. Kondisi tersebut berdampak menurunnya permintaan komoditi pertambangan negara tujuan ekspor mengalami perlambatan, disamping adanya kebijakan pemerintah Tiongkok untuk melindungi dan mendukung pertambangan domestik negaranya. Sebagai dampak perubahan ekonomi global tersebut, banyak perusahaan-perusahaan pertambangan menghentikan kegiatan operasionalnya yang berarti mempengaruhi kinerja sector tersebut.

Secara keseluruhan, kontraksi tertinggi pada triwulan II 2020 terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar negatif 16,91 persen dan Lapangan Usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum sebesar negatif 13,43 persen. Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,09 persen dan Lapangan Usaha Jasa Kehesatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,03 persen

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulan (yoY) Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020 (%)

Kategori	Uraian	2019				2020	
		I	II	III	IV	I	II
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,12	4,22	3,05	2,21	1,69	(2,19)
B	Pertambangan dan Penggalian	6,69	7,77	10,53	2,82	(0,48)	(6,88)
C	Industri Pengolahan	(0,95)	0,95	0,67	0,09	3,23	(7,74)
D	Pengadaan Listrik, Gas	8,37	8,97	8,02	9,23	9,92	9,09
E	Pengadaan Air	6,06	8,11	5,49	2,75	3,04	5,16
F	Konstruksi	14,53	6,03	2,30	0,88	0,74	0,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,55	3,24	6,92	7,12	5,83	(1,11)
H	Transportasi dan Pergudangan	1,26	1,20	3,08	2,93	1,57	(16,91)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,10	4,76	6,33	6,34	4,94	(13,43)
J	Informasi dan Komunikasi	6,13	8,80	6,70	5,85	5,36	6,07
K	Jasa Keuangan	7,19	(3,03)	(0,59)	8,57	3,28	5,77
L	Real Estate	1,09	0,15	3,74	3,52	3,38	1,49
M,N	Jasa Perusahaan	(1,12)	(3,72)	6,05	4,86	2,52	(4,21)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,42	(0,03)	4,58	9,96	1,76	(0,38)
P	Jasa Pendidikan	6,46	3,79	4,16	4,25	0,12	0,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,07	6,91	7,13	6,85	7,14	9,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,20	7,27	7,42	8,80	6,02	(7,86)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,11	5,06	6,31	2,67	1,27	(5,46)

Sumber : BPS Provinsi Kaltim

B. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Pengeluaran

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian Kalimantan Timur mengalami kontraksi hampir pada seluruh komponen. Kinerja ekspor Kalimantan Timur pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi terbesar yakni sebesar negatif 6,03 persen (yoY) setelah pada periode sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 7,13 persen (yoY). Penurunan kinerja ekonomi komponen ekspor ini sebagai akibat penyebaran Pandemi covid-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi negara tujuan utama ekspor Kalimantan Timur seperti China, India, Jepang, dan Korea. Serta menurunnya harga komoditas utama ekspor Kaltim seperti harga minyak dunia, batubara, dan kelapa sawit.

Laju pertumbuhan seluruh komponen konsumsi baik rumah tangga, pemerintah, hingga lembaga non profit mengalami kontraksi. Pelemahan konsumsi semakin terasa memasuki triwulan II 2020, hal ini menunjukkan daya beli mengalami

penurunan di tengah situasi Pandemi. Hanya komponen investasi yang mengalami pertumbuhan positif, namun capaiannya tidak terlalu optimis hanya tumbuh sebesar 0,79 persen.

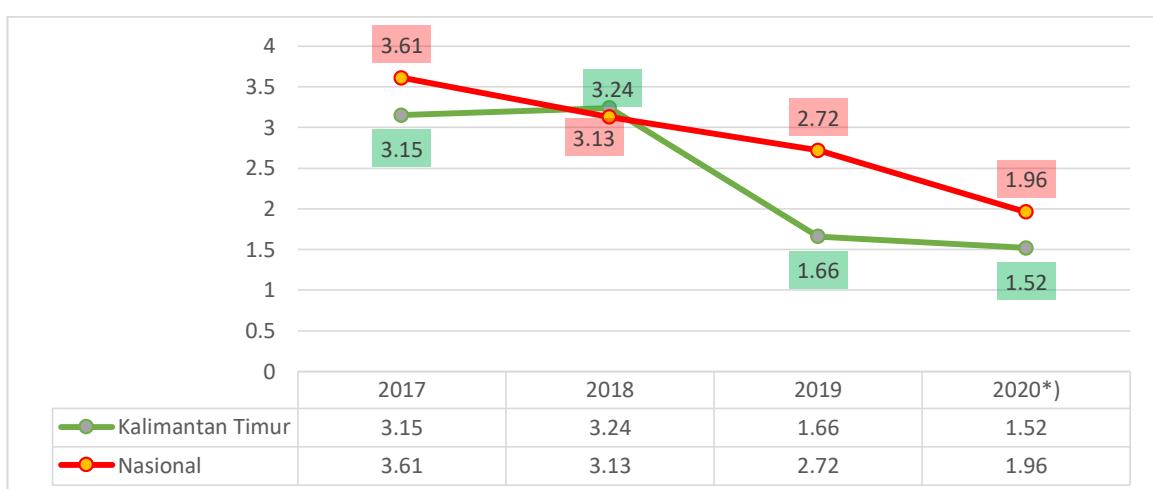
Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kaltim (yoY) Triwulan Berdasarkan Pengeluaran
Tahun 2019-2020 (%)

Komponen	2019			2020	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
1. Pengeluaran Konsumsi Ruta	4,03	3,37	3,13	2,09	1,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,41	6,41	6,67	3,33	-4,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23,25	-5,56	11,03	13,69	5,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,87	-1,29	5,89	5,22	0,60
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Eksport Barang dan Jasa	4,79	7,13	6,53	2,47	2,86
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7,00	4,79	5,70	3,89	4,46
P D R B	5,11	5,06	6,31	2,67	1,27

Sumber : BPS Kaltim

3.1.2. Inflasi

Inflasi Kalimantan Timur hingga Triwulan II 2020 tercatat 1,52 persen (yoY), sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,96 persen. Faktor utama penyebab inflasi bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dan kelompok penyediaan makanan dan minuman /restoran, serta kelompok pendidikan. Sedangkan penahan terbesar inflasi tersebut adalah kelompok transportasi yang mengalami deflasi cukup dalam. Perkembangan Covid-19 di Indonesia menyebabkan masyarakat meminimalisir aktivitas perjalanan antar kota sehingga permintaan terhadap penggunaan transportasi menurun.



Sumber : BPS Provinsi Kaltim, Keterangan : *) Tingkat Inflasi Year On Year kondisi Juni 2020

Gambar 3.2
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2017-2020

Berdasarkan inflasi tahun kalender (Januari-Juni 2020) inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya

merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya, masing-masing mengalami infalsi sebesar 3,90 persen dan 3,89 persen. Inflasi pada dua kelompok pengeluaran tersebut tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19, dalam rangka mitigasi penyebaran Covid-19 dan kekhawatiran akan gangguan distribusi logistik. Kondisi ini turut mendukung penyesuaian harga oleh sebagian besar penyedia bahan makanan/minuman.

Memasuki tatanan *New Normal*, tidak lantas mengurangi deflasi pada kelompok transportasi. Hingga Juni 2020, kelompok transportasi masih mengalami deflasi hingga 3,34 persen. Hanya sedikit lebih rendah dari deflasi kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,41 persen. Meski demikian, deflasi kelompok transportasi diperkirakan akan mulai berkurang mengingat normalisasi permintaan kebutuhan angkutan udara serta pelonggaran lalu lintas udara untuk sektor tertentu. Ditambah dengan mulai dibukanya kembali penerbangan untuk umum pada Juni 2020, hal ini diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga.

Tabel. 3.3
Tingkat Inflasi Tahun Kalender dan Year on Year
Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahun Kalender*	Inflasi Tahun ke Tahun (yoy)**
Laju Inflasi	0,85	1,52
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,90	3,05
Pakaian dan Alas Kaki	-3,41	-2,86
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,27	0,99
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,40	1,54
Kesehatan	1,11	2,17
Transportasi	-3,34	-3,51
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,33	-0,53
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,28	3,90
Pendidikan	0,09	4,05
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	0,58	5,12
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,89	5,97

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Keterangan :

*) Januari-Juni 2020

**) Inflasi Juni 2020 dibandingkan dengan Inflasi Juni 2019

3.2. PERUBAHAN ASUMSI DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.2.1 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global, domestik dan daerah terkini, serta berbagai tantangan dan peluang perekonomian yang dihadapi, perlu dilakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2020. Adapun perubahan asumsi dasar ekonomi makro RKPD perubahan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Perubahan RKPD Tahun 2020

Indikator Ekonomi		Realisasi 2019	RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,77	3,5 ± 1	-1,38 - 0,76
2	Inflasi (%)	1,66	3,0 ± 1	2,2
3	Nilai Tukar (Rp/US Dollar)	13.800 - 14.300	13.800 - 14.300	14.500 - 14.900
4*	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	746,7	695 - 725	695 - 725
5*	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1,050	990 - 1,050	990 - 1,050
6	Harga Minyak Bumi (USD/barel)		40-70	30 - 35

* Produksi Nasional;

Berdasarkan data SKK MIGAS, kontribusi lifting Kaltim untuk minyak sebesar 9% dan gas 24% dari lifting Nasional.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kalimantan Timur telah menunjukkan perbaikan kinerja selama beberapa tahun terakhir. Namun, seiring dengan pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia dikeluarkanlah kebijakan *physical distancing* yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membuka peluang terjadinya resesi dunia. Respon kebijakan *physical distancing* yang berpengaruh terhadap produksi dan permintaan, serta *supply chain* menjadi penyebab utama kontraksi ekonomi di dunia. Hal ini tentunya akan berdampak pada kinerja perekonomian Kalimantan Timur, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada triwulan II tahun 2020 laju perekonomian Kalimantan Timur mengalami kontraksi yang lebih berat dibandingkan nasional dan regional Kalimantan (baik secara yoy maupun c to c). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran asumsi laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang turun dari asumsi sebelumnya yaitu sebesar 3±1 persen.

Secara eksternal, laju pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar negatif 4,9 persen. Hal ini dipengaruhi oleh terganggunya kondisi neraca perdagangan internasional akibat penurunan aktivitas industri di banyak negara. Sementara itu, proyeksi kondisi ekonomi negara-negara utama tujuan ekspor Kalimantan Timur sebagian besar mengalami kontraksi dan perlambatan, seperti China diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen. Demikian juga negara tujuan utama ekspor lainnya mengalami kontraksi, seperti India diperkirakan mengalami kontraksi sebesar negatif 4,5 persen, Jepang mengalami kontraksi sebesar negatif 5,8 persen, Malaysia mengalami kontraksi sebesar negatif 3,8 persen, Taiwan mengalami kontraksi sebesar negatif 4 persen, Philipina mengalami kontraksi

sebesar negatif 7,7 persen, dan Korea mengalami kontraksi sebesar negatif 2,1 persen.

Jika dilihat harga komoditas ekspor utama Kalimantan Timur seperti harga batubara dan minyak pada tahun 2020 mengalami penurunan di pasar global. Harga Batubara Acuan per Agustus 2020 berada pada level 50,34 USD/ton, dengan Nilai Tukar Dollar sebesar Rp 14.400, Lifting Minyak 755 ribu barrel/hari, lifting gas 1.191 ribu barrel setara minyak/hari, Harga minyak 63 USD/barrel.

Berdasarkan asumsi di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ditargetkan pada kisaran -1,38-0,76 persen, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 sebesar $3,5\pm 1$ persen. Penetapan target RKPD perubahan tersebut tentunya telah memperhitungkan dampak pandemi covid-19 terhadap ekonomi dan sosial. Dari sisi penawaran, sektor-sektor utama yang diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan, konstruksi dan pertanian (dalam arti luas). Sektor pertambangan yang berkontribusi sebesar 42,94 persen terhadap PDRB diharapkan tidak mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Dari sisi penawaran, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terbesar mencapai 42,94 persen pada triwulan II tahun 2020. Sektor ini sangat bergantung pada aktivitas ekonomi global karena mencakup tingkat harga minerba di pasar internasional yang mengalami penurunan. Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi global dan nasional, sampai akhir tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 42 persen. Kontribusi sektor ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun masih mendominasi struktur PDRB Kalimantan Timur. Tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tidak bisa diturunkan secara signifikan mengingat *multiplier effect* yang ditimbulkan jika terjadi penurunan tajam pada sektor ini. Maka salah satu caranya adalah bukan menurunkan kinerja sektor pertambangan dan penggalian tapi memberikan dorongan dan suntikan pada sektor lain untuk tumbuh dan berkontribusi tinggi.

Disamping sektor pertambangan dan penggalian, sektor utama lainnya adalah industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar kedua pada pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Pada triwulan II tahun 2020 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 17,90 persen. Keinginan Kalimantan Timur untuk mempercepat hilirisasi industri tentunya akan memacu pertumbuhan dan pengembangan berbagai aspek pada industri pengolahan. Pada tahun 2020 sektor industri pengolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 21,94 persen. Sektor ini diharapkan mampu bekerja maksimal sehingga dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2020 walaupun saat ini masih

didominasi industri pengolahan minyak dan gas bumi (*unrenewable*). Untuk mempercepat proses transformasi ekonomi, sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor pilihan namun diupayakan mendorong industri pengolahan yang berbasis bahan baku pertanian (*renewable*). Untuk itu diperlukan program – program yang terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir seperti peningkatan produksi bahan baku pertanian, pengembangan sentra-sentra industri potensial didukung penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Sektor pertanian pada triwulan II tahun 2020 hanya memberikan kontribusi sebesar 8,58 persen terhadap PDRB Kalimantan Timur. Namun, jika melihat data *long term* dan potensi wilayah di Kalimantan Timur, sektor ini mempunyai nilai strategis terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2020, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja tertinggi dibanding sektor lainnya yaitu sebesar 23,08 persen. Maka, pada tahun 2020 sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 9,77 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur, tentunya perlu didukung dengan pelaksanaan program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan, dalam mendukung peningkatan produktivitas produk pertanian, perikanan dan peternakan.

Kontribusi sektor perdagangan di Kalimantan Timur pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 6,56 %. Sektor perdagangan merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi kedua sebesar 19,76 persen. Untuk itu, pada tahun 2020 sektor perdagangan diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 6,78 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan relevansi terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan. Namun dalam hal ini diperlukan dorongan dari pemerintah berupa pelaksanaan Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah, dan Program pengembangan perdagangan dalam negeri.

Dari sisi permintaan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar -1,38-0,76 persen membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga terbatas, pencapaian target -1,38-0,76 persen harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui Konsumsi, Investasi dan Net Ekspor Antar Daerah.

Upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui pengendalian konsumsi rumah tangga agar tetap terjaga. Pola pembelanjaan konsumsi rumah tangga diarahkan lebih kepada produk-produk yang telah ada atau disediakan oleh penyedia barang/jasa yang berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentunya harus didukung oleh kemampuan penyedia barang/jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara kuantitas

maupun kualitas. Pemerintah dapat mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM, serta koperasi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dimaksud. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi daerah yang mampu menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke Kalimantan Timur. Untuk itu konsumsi rumah tangga diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar 17 persen.

Kontribusi investasi yang tercermin melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 30,18 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2020. Dimana PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Untuk itu diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan dalam hal ini yang mendukung hilirisasi industri di Kalimantan Timur.

Sedangkan Net Ekspor Antar Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi 25,84 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur di tahun 2020. Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, Untuk menopang ini, selain masih mengandalkan ekspor migas dan batubara, disamping ekspor luar negeri perlu didorong pula net ekspor antar daerah yang mengindikasikan adanya peningkatan pada perdagangan domestik Kalimantan Timur. Dimana aktivitasnya diarahkan pada ekspor pada produk perikanan dan perkebunan, untuk itu perlu didukung dengan kegiatan pengembangan produktivitas perikanan dan perkebunan, dan juga pengembangan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

B. Inflasi

Stabilitas harga akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Stabilitas harga akan menjaga daya beli masyarakat serta berujung pada pertumbuhan ekonomi. Stabilitas harga merupakan prasyarat utama terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Gejolak dan tingginya inflasi secara langsung dapat mengurangi daya beli masyarakat dan daya saing suatu daerah, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat besarnya dampak inflasi bagi masyarakat, Pemerintah beserta semua *stakeholders* perlu mengupayakan langkah-langkah yang nyata untuk menjaga stabilitas harga. Diperkirakan inflasi Kalimantan Timur di tahun 2020 sebesar 2,22 persen, dimana kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi terdapat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan deflasi diperkirakan terjadi pada kelompok transportasi.

3.2.2 Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah

Adapun kebijakan yang perlu dilakukan adalah mendorong ekspor komoditi batubara baik antar daerah maupun ekspor antar negara dengan memperluas jaringan pasar terutama negara-negara yang telah memasuki fase pemulihan ekonomi pasca covid-19 seperti RRT, Vietnam dan Jepang.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Untuk menjamin tercapainya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, maka dibutuhkan kebijakan yang mampu menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan beberapa dimensi yang harus dijaga, diantaranya stabilitas harga, peningkatan daya saing investasi, pemerataan pelayanan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan.

A. Menjaga arus investasi ke daerah.

Pemberian insentif khusus bagi rencana investasi pada sektor-sektor usaha yang bersifat padat karya dan mampu menyerap banyak tenaga kerja (*labour intensive*). Hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen investor untuk memberikan peluang/kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Pemerintah perlu mendorong realisasi investasi pada sektor-sektor usaha dimaksud melalui perbaikan iklim investasi di daerah, khususnya dari sisi tata kelola perizinan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan kompetensi dari tenaga kerja lokal untuk dapat memenuhi kualifikasi kerja yang dibutuhkan.

B. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah

Belanja pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah diarahkan untuk lebih banyak menggunakan produk yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur. Sebagian besar pekerjaan konstruksi dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur harus lebih mengutamakan pemanfaatan bahan baku yang telah disediakan oleh pasar lokal. Pemerintah perlu menjamin tersedianya bahan baku yang dibutuhkan melalui pengelolaan rantai suplai/pasok yang informatif dan berkualitas. Selain itu, dalam rangka mendorong aktifitas ekonomi masyarakat lokal di daerah, maka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi dan ceremonial berskala menengah dan besar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, akan lebih banyak dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur.

C. Meningkatkan surplus perdagangan antar wilayah dan internasional

Mendorong ekspor komoditi batubara baik antar daerah maupun ekspor antar negara dengan memperluas jaringan pasar terutama negara-negara yang telah memasuki fase pemulihan ekonomi pasca covid-19 seperti RRT, Vietnam dan Jepang.

3.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan langkah kebijakan fiskal di atas, maka postur rencana pendapatan P-RKPD tahun 2020 juga mengalami perubahan. Koreksi pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada penurunan pendapatan daerah, terutama pada komponen penerimaan dana perimbangan dan pajak daerah. Pendapatan daerah dalam P-RKPD tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 8,33 trilyun atau lebih kecil 3,20 trilyun jika dibandingkan dengan target dalam RKPD tahun 2020 sebesar Rp.11,53 trilyun. Perubahan target pendapatan daerah tersebut utamanya berasal dari target penerimaan PAD semula Rp 6,36 trilyun menjadi sebesar Rp 4,31 trilyun, Dana Perimbangan semula Rp 5,16 trilyun menjadi sebesar Rp. 3,94 trilyun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah semula Rp 12,42 miliar menjadi sebesar Rp. 73,27 miliar.

Untuk komponen Pendapatan Pajak Daerah P-RKPD 2020 adalah sebesar Rp 3,39 triliun terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 12,33 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 133,81 miliar dan penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 774,97 miliar.

Untuk komponen Dana Perimbangan P-RKPD 2020 adalah sebesar Rp 3,94 triliun yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 2,49 triliun, Penerimaan komponen DAU sebesar Rp 834,94 miliar dan Komponen DAK sebesar Rp 623,34 miliar.

Selanjutnya komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp 73,27 miliar adapun komponen tersebut terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 11,26 miliar dan Dana Insentif Daerah sejumlah Rp 62,01 miliar. Rencana pendapatan daerah pada P-RKPD 2020 seperti tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.4
Target Pendapatan Daerah Tahun 2020**

URAIAN	RKD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	SELISIH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PENDAPATAN DAERAH	11.534.474.227.000	8.334.605.835.525	-3.199.868.391.475
Pendapatan Asli Daerah	6.362.974.720.000	4.314.906.394.875	-2.048.068.325.125
Pajak Daerah	5.236.700.000.000	3.392.790.000.000	-1.843.910.000.000
Retribusi Daerah	33.239.185.000	12.334.562.250	-20.904.622.750
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	227.111.724.398	133.813.720.047	-93.298.004.351
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	865.923.810.602	774.968.112.578	-90.955.698.024
Dana Perimbangan	5.159.079.507.000	3.947.428.479.650	-1.211.651.027.350
Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	3.137.724.000.000	2.489.148.679.650	-648.575.320.350
DAU	815.693.641.000	834.938.558.000	19.244.917.000
DAK	1.205.661.866.000	623.341.242.000	-582.320.624.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.420.000.000	73.270.961.000	60.850.961.000
Pendapatan Hibah	12.420.000.000	11.260.813.000	-1.159.187.000

URAIAN	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	SELISIH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0
Dana Insentif Daerah	0	62.010.148.000	62.010.148.000
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0

Sumber : Bapenda Prov. Kaltim

Untuk mengamankan rencana pendapatan daerah terutama sektor perpajakan, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya dengan pemberlakuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberian Pembebasan Pokok.
- Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga pajak;
- Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun wajib retribusi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengolahan aset untuk meningkatkan pendapatan;
- Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah.

3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Penurunan rencana pendapatan daerah tersebut akan berdampak pada penyesuaian belanja daerah.

3.3.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Perubahan tahun 2020 diarahkan kepada pemenuhan belanja wajib dan mengikat yang tidak dapat ditunda, meliputi:

- Mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.500 Milyar yang merupakan amanat Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) nomor : 119/2813/SJ, nomor : 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyelesaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 pada tiga kluster utama yaitu untuk penanganan Covid-19, pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Untuk penanganan kesehatan, dialokasikan sebesar Rp 250 miliar, Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp 155 miliar dan pemulihan dampak ekonomi sebesar Rp 95 miliar
- Penyesuaian Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS 2020; Berkaitan dengan adanya kenaikan pangkat/golongan yang disertai dengan penyesuaian tunjangan dan insentif gaji, serta pepensiun.
- Penyesuaian Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Atas Dana Perimbangan;

Adanya kurang salur tahun 2018 dan 2019

- d. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;

Pemenuhan target RKPD melalui program/kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota

- e. Penyesuaian Hibah

Diarahkan pada program-program penanggulangan dampak covid-19

Belanja Tidak Langsung pada P-RKPD 2020 ditargetkan Rp. 6,01 triliun, berkurang Rp. 418,8 miliar atau turun 6,52 persen dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai; Penyesuaian belanja pegawai dikarenakan adanya penyesuaian target upah pungut dan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dampak dari penurunan PAD, sehingga penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan pada P-RKPD 2020 menjadi Rp. 2,001 triliun, turun sebesar Rp 186,03 miliar atau turun 8,50% dari RKPD 2020 murni sebesar Rp 2,19 triliun.
- 2) Belanja Hibah; penyesuaian pada Belanja Hibah pada P-RKPD 2020 sebesar Rp.187,100 miliar, turun 77,20 persen sebesar Rp 633,43 miliar dibanding pada RKPD 2020 Murni Rp 820,53 miliar.
- 3) Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Sosial tidak mengalami penyesuaian dan teralokasi pada P-RKPD 2020 sebesar Rp. 9,77 miliar.
- 4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota; penyesuaian pada Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota pada P-RKPD 2020 menjadi Rp. 2,07 triliun, turun 30,37persen dari RKPD 2020 atau sebesar Rp. 2,98 triliun.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota & Partai Politik alokasi pada P-RKPD 2020 mengalami peningkatan 204,28 persen atau sebesar Rp 829,49 miliar.
- 6) Belanja Tidak Terduga pada P-RKPD 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 475 miliar menjadi Rp 500 miliar.

3.3.2.2. Kebijakan Belanja Langsung.

Dengan memperhitungkan berbagai perubahan-perubahan asumsi dasar ekonomi makro, maka kebijakan belanja langsung juga mengalami perubahan. Pada P-RKPD Tahun 2020 rencana belanja langsung menjadi Rp 4,58 trilyun, mengalami penurunan sebesar Rp 431,39 miliar dibandingkan dengan RKPD 2020 Murni sebesar Rp 5,01 trilyun atau berkurang sebesar 8,61 persen. Penyesuaian rencana belanja langsung pada P-RKPD 2020 difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha terutama dalam rangka pengendalian dampak pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 3.5
Target Belanja Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
1	PENDAPATAN	11.534.474.227.000	8.334.605.835.525	-3.199.868.391.475
2	BELANJA DAERAH	11.434.474.227.000	10.584.000.000.000	-850.474.227.000
02.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.426.656.978.075	6.007.567.932.008	-419.089.046.067
02.01.01	Belanja Pegawai	2.187.901.347.513	2.001.875.319.326	-186.026.028.187
02.01.04	Belanja Hibah	820.534.954.662	187.100.003.062	-633.434.951.600
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	9.774.550.000	0
02.01.06	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	2.977.391.300.000	2.073.266.022.802	-904.125.277.198
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan kpd Kabupaten/Kota & Partai Politik	406.054.825.900	1.235.552.036.818	829.497.210.918
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	500.000.000.000	475.000.000.000
02.02	BELANJA LANGSUNG	5.007.817.248.925	4.576.432.067.992	-431.385.180.933
02.02.01	Belanja Pegawai	449.172.979.451	315.139.040.014	-134.033.939.437
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	2.794.712.174.887	2.945.599.416.770	150.887.241.883
02.02.03	Belanja Modal	1.763.932.094.587	1.315.693.611.208	-448.238.483.379
SURPLUS/DEFISIT		100.000.000.000	-2.249.394.164.475	-2.349.394.164.475

3.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam RKPD P tahun 2020, kebijakan pembiayaan anggaran mengalami perubahan yang semula direncanakan ada pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal pada BPD Kaltimtara sebesar Rp. 100 Milyar. Namun dalam penyusunan APBD 2020, pengeluaran pembiayaan dirubah menjadi nol, karena defisit sebesar Rp.451,329 Milyar yang ditutup dengan rencana SiLpa tahun 2019 sebesar Rp.451,329 Milyar. Dampak Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah daerah harus merasionalisasi semua rencana pendapatan dan belanja daerah. Untuk menjaga pencapaian target kinerja RKPD tahun 2020, pemerintah daerah tetap mengoptimalkan belanja pemerintah yang berdampak pada deficit anggaran sebesar Rp.2,249 triliun. Defisit ini terjadi seiring dengan menurun nya rencana pendapatan daerah yang semula Rp. 11,534 Trilyun menjadi Rp. 8,334 trilyun. Sejalan dengan peningkatan defisit tersebut, untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan juga meningkat. Tambahan penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran 2019 sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 hasil audit BPK-RI sebesar Rp.2,249 triliun.

Tabel 3.6
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	SELISIH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	2.249.394.164.475	2.249.394.164.475
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	2.249.394.164.475	2.249.394.164.475
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000	0	0
3.2.2	Pembiayaan Pengeluaran	100.000.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	-100.000.000.000	2.249.394.164.475	2.149.394.164.475

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas, strategi dan arah kebijakan RKPD tahun 2020 tentunya perlu memperhatikan dinamika kondisi daerah (sosial-ekonomi) baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kalimantan Timur. Disamping itu, untuk menjaga keselarasan dengan pembangunan nasional maka penetapan prioritas daerah juga memperhatikan arah kebijakan nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sejalan dengan kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Visi Kaltim 2019-2023 yaitu “**Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat**”. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur, tema indikatif pembangunan tahunan telah dirumuskan dengan memperhatikan apa yang menjadi tujuan akhir pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah tema indikatif yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.



Gambar 4.1.
Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Dalam RPJMD Tahun 2019-2023

Namun tema pembangunan tersebut di formulasi dengan memperhatikan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Dengan tema pembangunan Tahun 2020 **“Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur”**

Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi” maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah :

1. Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis Teknologi;
3. Penguatan Peran dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan;
4. Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi;
5. Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Disamping prioritas daerah di atas, tema RKPD 2020 juga mengarusutamakan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang ditekankan pada aspek :

- Lingkungan : Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
- Kemiskinan : salah satu arget Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
- Kesempatan Kerja/Pengagguran : Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
- Untuk pencapaain target pembangunan, maka salah factor kunci keberhasilan adalah adanya pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu maka perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayan public yang berkualitas terutama pada pelayanan jaringan jalan, listrik dan air bersih. Pelayanan jaringan jalan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas pada daerah-daerah yang memiliki aksesibilitas yang rendah (daerah 3T).

Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TAHUN					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS	Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,12	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87	76,87
		Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	72,86	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	77,50
		Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96
		Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,7	73,72	73,74	73,76	73,78	73,8	73,8
		Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,19	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70	5,70
		Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	56,70	56,71	56,72	56,73	56,75	56,75
		Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
		Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	50	51	52	53	54	55	55
		Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
2	BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB (%)	-	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,80
		Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	518	503	478	448	413	368	368
		Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,03
		Tujuan 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	5,24	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
		Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	18,33	20	20	20	21	21	21

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TAHUN					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
		perekonomian daerah								
		Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	25,53	31,5	33,08	34,73	36,47	38,29	38,29
		Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
			Rasio Pemenuhan Beras (%)	62,82	62,46	67,41	72,69	78,40	84,53	84,53
		Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,3	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
		Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1	5,4	5,7	6	6,3	6,3
		Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,46	1,52	1,58	1,64	1,71	1,78	1,78
		Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,15	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2
		Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	-8,16	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
3	BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326	0,326
		Sasaran 18: Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.705.000	11.026.000	11.536.200	11.700.000	12.050.000	12.050.000
			Jumlah barang (ton)	325.051.663	334.805.000	344.850.000	355.200.000	365.900.000	376.900.000	376.900.000
		Sasaran 19: Meningkatnya koneksi antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	2	3	3	3	6	6
		Sasaran 20: Meningkatnya fungsi pelayanan	Cakupan layanan air minum (%)	71,83	73,33	75,00	77,00	81,00	85,00	85,00

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TAHUN					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
4	BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN	infrastruktur sumber daya air	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618,5	14.008,5	14.808,5	15.558,5	16.258,5	16.925,5	16.925,5
			Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	664	575	505	435	365	365
		Sasaran 21: Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	673,42	620,06	533,56	459,56	409,56	359,56	359,56
		Sasaran 22: Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	84,21	85,50	87,50	89,50	92,00	95,00	95,00
5	BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,65	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15	76,15
		Sasaran 23: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	7,2	26,3	26,89	27,75	28,5	29,33	29,33
		Sasaran 24: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	0	145	140	135	130	125	125
		Sasaran 25: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	73,18	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09	83,09

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2020

Didalam perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur diperlukan interkoneksi perencanaan pembangunan, dimana didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Kalimantan Timur yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Perangkat Daerah di Kalimantan Timur.

Makna selaras dan sejalan bahwa sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah atau IKU Gubernur didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2019-2023 Kalimantan Timur menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didalam perhitungan indikator Renstra tersebut memuat angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit dengan indikator Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Sasaran pembangunan di Kalimantan Timur yang dijabarkan kedalam sasaran perangkat daerah menjadi agenda Prioritas Pemerintah Daerah Kalimantan Timur tahunan.

Perubahan target pada indikator sasaran makro pembangunan Kalimantan Timur tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2020

	Sasaran Ekonomi Makro Daerah	Target 2020	
		RKPD 2020	P-RKPD 2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	-1,38-0,76
2	Investasi (trilyun Rp)	33,08	33,08
3	Indeks Pembangunan Manusia	>76,61	76,66
4	Indeks Gini	0,329	0,329
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	7,09
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6-5	9,04

Untuk menyelaraskan kinerja pembangunan, maka Perubahan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial (HTIS). Pendekatan dengan cara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial merupakan pendekatan yang menekankan pada kegiatan-kegiatan untuk mendukung Prioritas Nasional dengan didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini saling keterkaitannya perpaduan antara Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas serta Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dengan mengisyaratkan bahwa Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tema Pembangunan Perubahan RKPD 2020 dan diprioritaskan untuk pencapaian target dan sasaran Pembangunan Daerah.

Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur dan sasaran Pemda Kalimantan Timur, serta sasaran Perangkat Daerah di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Sasaran, Strategi, Arah kebijakan Pembangunan, Program Prioritas
Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat	1) Pengembangan Demokrasi di Daerah	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%) 74,5
		2) Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal	2	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) 100
			3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal 130
2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)	4	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK) 55
		2) Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLB, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)	5	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA (%) 73
		3) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan	6	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK (%) 77
		4) Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa KALTIM TUNTAS	7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%) 97
		5) Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin	8	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang) 13.000
			9	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang 2.500

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
2. Meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan			tidak putus sekolah (Siswa)	
		6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh	10 Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	90
		7) Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa	11 Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	70
		8) Pengembangan kapasitas kelembagaan tentang anak	12 Program Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	82
		9) Pengembangan perpustakaan digital	13 Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	205.700
		10) Pemenuhan Bahan Bacaan Perpustakaan			
3. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)	14 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	70
		2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit	15 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	43
		3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	16 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	90
		4) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin			
4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	1) Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat	17 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	6
		2) Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	18 Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0,054
		3) Peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha	19 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan	11.710

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
				Dasarnya (Orang)	
5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas	Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas berwirausaha	1) Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi	20	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)
		2) Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas	21	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)
			22	Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)
6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1) Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja	23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)
7. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Optimalisasi pengelolaan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis	24	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas /Jumlah UKM Naik Kelas
		2) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan			
		3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM			
		4) Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda dengan Penumbuhan Usaha Rintisan (<i>Startup</i>) Industri Kreatif			
		5) Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi untuk perempuan dan keluarga			
		6) Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi dan keunggulan daerah			
8.	Peningkatan kualitas	1) Peningkatan kapasitas BUMDES	25	Program Pengembangan	Meningkatkan jumlah Bumdes
					360

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	pembangunan wilayah perdesaan secara merata	untuk meningkatkan ekonomi desa		lembaga ekonomi pedesaan	yang aktif (Bumdes)
		2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa	26	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)
		3) Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas	27	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)
		4) Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	28	Program Kampung Iklim +	Jumlah kampung/desa (Desa)
9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata	1) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat 2) Pemanfaatan Anjungan Kaltim di TMII sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata Kaltim	29	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)
10. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	1) Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan 2) Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas 3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor	30	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)
11. Meningkatnya realisasi investasi	Percepatan proses perizinan dan pengendalian rencana investasi	1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi	31	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)
		2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi	32	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)
12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering 2) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani	33	Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi padi (Ton) 262.500

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
		4). Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian				
13. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui pola kemitraan	5) Perbaikan penanganan pasca penen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura	34	Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	240.245
		1) Pembangunan Miniranch sapi	35	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	12
		2) Penyediaan Informasi Peternakan				
		3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak				
		4) Fasilitasi Penyediaan Permodalan bagi Peternak	36	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	20
14. Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	5) Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB				
		1) Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan	37	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	16.717.254
		2) Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan	38	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35
		3) Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir	39	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2
		4) Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani	40	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,08
		5) Pengelolaan areal perkebunan yang benilai konservasi tinggi				
		6) Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa Perkebunan				
15. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	7) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan				
		1) Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan	41	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	144.584
		2) Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan	42	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	108.862
		3) Perlindungan dan pengelolaan zona	43	Program Peningkatan	Jumlah Produksi	2,7 Miliar

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
		konservasi kelautan dan perikanan		Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Ketersediaan Benih (ekor)
			44	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)
16. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	1) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan	45	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNBP sektor kehutanan (Rp. Miliar)
		2) Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	46	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)
		3) Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi	47	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)
		4) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan	48	Program Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)
17. Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1) Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam	49	Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru
18. Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayaran	50	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)
		2) Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat			
		3) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	51	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)
19. Meningkatnya konektivitas antar daerah dan kawasan	Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan	1) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan	52	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)
		2) Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi (hinterland) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah			
		3) Peningkatan aksesibilitas ke			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
		kawasan strategis pariwisata nasional dan provinsi				
20. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih	1) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku	53	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8.322
		2) Peningkatan infrastruktur layanan air minum	54	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	66,12
21. Menurunnya kawasan kumuh	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	1) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi keluarga pra sejahtera pada kawasan kumuh	55	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	41.722
		2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat				
22. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1) Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)	56	Program Diversifikasi & Konservasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	4,82
			57	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	989.607
23. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan	58	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	550
		2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	59	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemer sedang (8)
24. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	60	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	61,33
			61	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85
25. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	62	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)	75,34
26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1) Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur	63	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	75

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program		Indikator Program	Target
27. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel		2) Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	64	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	90
			65	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	85
		1) Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah	66	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	61
		2) Meningkatnya kapabilitas APIP	67	Program Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	68,42
			68	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level kapasitas APIP	3
		1) Peningkatan tatakelola pemerintah yang baik	69	Program Pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	66,67
		2) Peningkatan kualitas komunikasi dan teknologi informasi	70	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6
28. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan efisiensi di berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/ teknologi informasi					

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD

5.1 Pagu Perangkat Daerah

Penyesuaian terhadap belanja Pemerintah merupakan tindak lanjut dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau pokok-pokok kebijakan fiskal dapat dilakukan dalam bentuk penambahan pada beberapa komponen belanja maupun pengurangan pada komponen belanja yang lainnya. Selain itu, penyesuaian belanja Pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi maupun antar program. Dalam rangka penyesuaian belanja tersebut, Pemerintah menyampaikan perubahan anggaran belanja menurut organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran belanja Pemerintah dalam Perubahan RKPD tahun 2020 sebesar Rp4.501.145.605.492,00 dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 5.1
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2020

KODE	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2020	RKPD-P	+/-
1	2	3	4	5
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	758.134.652.000	1.131.290.956.130	373.156.304.130
1.02.01	Dinas Kesehatan	114.842.099.000	109.164.365.129	(5.677.733.871)
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda	491.000.000.000	514.021.997.536	23.021.997.536
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	267.300.000.000	332.977.380.800	65.677.380.800
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	39.638.615.500	42.429.793.333	2.791.177.833
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.841.043.924.675	1.098.578.132.110	(742.465.792.565)
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	11.575.000.000	7.306.587.540	(4.268.412.460)
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.635.000.000	5.953.510.700	(2.681.489.300)
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.450.000.000	7.904.993.360	(545.006.640)
1.06.01	Dinas Sosial	34.000.000.000	23.381.387.860	(10.618.612.140)
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.250.000.000	27.531.959.280	(718.040.720)
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.550.000.000	9.551.912.520	(1.998.087.480)
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	57.006.464.260	39.044.521.460	(17.961.942.800)
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	22.644.748.000	13.176.498.240	(9.468.249.760)
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12.675.250.000	7.737.820.280	(4.937.429.720)
2.09.01	Dinas Perhubungan	78.000.000.000	22.808.672.143	(55.191.327.857)
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.825.000.000	14.459.066.656	(6.365.933.344)
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	60.017.520.000	24.784.619.010	(35.232.900.990)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.000.000.000	15.342.205.540	342.205.540
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	36.180.742.000	25.403.719.900	(10.777.022.100)
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.274.957.000	5.725.871.150	(1.549.085.850)
3.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	57.597.145.000	33.658.914.283	(23.938.230.717)
3.02.01	Dinas Pariwisata	16.000.000.000	12.166.932.220	(3.833.067.780)
3.03.01	Dinas Perkebunan	45.526.722.740	27.364.386.598	(18.162.336.142)
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	62.422.000.000	33.950.680.662	(28.471.319.338)
3.04.01	Dinas Kehutanan	328.215.057.750	511.849.788.547	183.634.730.797
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	71.776.650.000	35.210.218.840	(36.566.431.160)

KODE	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2020	RKPD-P	+/-
1	2	3	4	5
4.01.03	Sekretariat Daerah	173.232.304.000	147.195.957.437	(26.036.346.563)
4.01.04	Sekretariat DPRD	96.025.000.000	99.641.248.160	3.616.248.160
4.01.05	Badan Penghubung Provinsi	9.200.200.000	7.667.169.820	(1.533.030.180)
4.02.01	Inspektorat	15.012.840.000	10.371.176.280	(4.641.663.720)
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.050.000.000	30.308.766.930	(17.741.233.070)
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah	56.246.999.000	65.205.606.898	8.958.607.898
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45.389.920.000	35.579.042.340	(9.810.877.660)
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	20.808.647.000	20.889.860.540	81.213.540
4.05.02	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	4.100.000.000	3.431.618.200	(668.381.800)
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.969.791.000	17.560.315.000	(12.409.476.000)
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.200.000.000	5.804.414.560	1.604.414.560
	JUMLAH	5.007.817.248.925	4.576.432.067.992	(431.385.180.933)

5.2 Rencana Program/Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara umum, perubahan program/kegiatan RKPD tahun 2020 dilakukan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2020 dengan tetap mendukung pencapaian target kinerja RKPD dan prioritas pembangunan tahun 2020. Selain itu, rencana program/kegiatan juga diarahkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif. Perubahan pagu pada perangkat daerah dalam perubahan RKPD tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) penghematan dan pemotongan anggaran belanja perangkat daerah, (2) tambahan anggaran untuk program/kegiatan yang bersifat mendesak pada beberapa perangkat daerah, dan (3) perubahan sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri terkait dana transfer dari pusat. Selain itu, realokasi anggaran juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada masyarakat sebagai dampak Pandemic Covid-19.

Selanjutnya, uraian mengenai alokasi anggaran belanja berdasarkan program/kegiatan Perubahan RKPD tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2
Program Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah terhadap Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				3.273.009.104.498
1.01	Pendidikan				1.131.290.956.130
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				1.131.290.956.130
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				799.839.613.615
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		180.840.938.430
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	smd	180.840.938.430
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit		11.976.315.743

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	4 Unit	smd	6.765.649.668
1.01.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah gedung kantor skpd dan unit kerja intenal skpd yang dipelihara	4 Unit	smd	5.210.666.075
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		4.034.063.750
1.01.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	50 Kali	smd	2.764.020.000
1.01.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang dilatih	550 Orang	smd	1.270.043.750
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	81%		2.150.960.000
1.01.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	5 Dokumen	smd	1.161.895.000
1.01.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	12 Laporan	smd	989.065.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Percentase pelayanan pendidikan luar biasa	70%		7.941.544.000
1.01.19. 21	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	9 Sekolah	smd	1.543.135.600
1.01.19. 22	Pembangunan Prasarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	9 Sekolah	smd	2.205.008.900
1.01.19. 23	Pengadaan Sarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	9 sekolah	smd	2.196.779.500
1.01.19. 61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SLB	200 Orang	smd	1.996.620.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Percentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	97%		5.235.706.000
1.01.20. 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	500 Orang	smd	1.758.000.000
1.01.20. 09	pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	250 Orang	smd	1.274.956.000
1.01.20. 40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	1500 Orang	smd	2.202.750.000
1.01.20. 41	Pemenuhan Sarana & Prasarana Tenaga Pendidik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	20 Orang	smd	-
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Percentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah dan khusus	79%		8.927.906.204
1.01.22. 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan infromasi manajemen pendidikan	40 Laporan	smd	1.069.988.000
1.01.22. 08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	3 Kegiatan	smd	1.415.000.000
1.01.22. 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	24 Laporan	smd	318.750.000
1.01.22. 10	Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	Jumlah Sekolah Negeri yang melaksanakan Ujian Nasional jenjang SLB/SMA/SMK	232 Sekolah	smd	874.915.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.22. 11	Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah Sekolah Negeri yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SLB/SMA/SMK	232 Sekolah	smd	487.300.000
1.01.22. 17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	10 Kab/kota	smd	4.761.953.204
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi	13000 Orang		161.941.749.000
1.01.23. 01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	13000 Orang	smd	161.941.749.000
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah	2500 Siswa		4.830.000.000
1.01.38. 01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	415 Orang	smd	2.502.500.000
1.01.38. 02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	500 Orang	smd	2.327.500.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	73%		163.350.889.150
1.01.39. 02	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Penyelenggaraan paket C setara SMU	100 Orang	smd	-
1.01.39. 03	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	10 Kab/kota	smd	223.091.000
1.01.39. 05	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	10 kab/kota	smd	6.465.144.600
1.01.39. 06	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Jumlah kab/kota yang mengikuti lomba jenjang SMA	10 Kab / Kota	smd	621.235.000
1.01.39. 08	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair Sekolah Menegah Atas	10 Kab/kota	smd	1.500.000.000
1.01.39. 12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	25 sekolah	smd	962.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	62711 siswa	smd	52.434.790.000
1.01.39. 17	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	15 Sekolah	smd	24.873.459.550
1.01.39. 18	Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	5 Sekolah	smd	1.458.929.000
1.01.39. 25	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	18.473.146.400
1.01.39. 26	Pembangunan Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	42.899.883.600
1.01.39. 27	Pengadaan Sarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	10.997.482.000
1.01.39. 28	Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA (Afirmasi) (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	30 Sekolah	smd	2.441.728.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	77%		170.459.541.338
1.01.40. 01	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	5 Kegiatan	smd	2.300.000.000
1.01.40. 02	Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	30 Sekolah	smd	7.594.901.500
1.01.40. 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	10 Paket	smd	5.317.268.100
1.01.40. 04	Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah Menengah Kejuruan	30 Ruang	smd	1.428.926.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	47245 Orang	smd	39.654.476.738
1.01.40. 19	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	30 Sekolah	smd	39.421.080.000
1.01.40. 20	Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi (DAK)	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik Peraga Siswa	50 sekolah	smd	70.091.585.240
1.01.40. 21	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	-
1.01.40. 22	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	1.660.000.000
1.01.40. 23	Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	2.656.520.000
1.01.40. 24	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	50 Sekolah	smd	334.783.760
1.01.41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah Sekolah yang Mengembangkan Ekstrakurikulum Berbasis Agama	100 Sekolah		150.000.000
1.01.41. 01	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Ekstrakurikuler Keagamaan	150 Jumlah Sekolah	smd	150.000.000
		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	10 Kegiatan		
1.01.42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	55 SMK		150.000.000
1.01.42. 01	Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	5 Kegiatan	smd	150.000.000
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	0 SMK		75.150.000.000
		Percentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh	90 %		
1.01.43. 01	Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Sekolah yang menerapkan program pendidikan jarak jauh	10 Sekolah	smd	75.150.000.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya loka	150 Sekolah		2.700.000.000
2.16.15. 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	10 Kab/Kota	smd	1.050.000.000
2.16.15. 06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film	10 Kab / Kota	smd	700.000.000
2.16.15. 07	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Terselenggaranya industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	10 Kab/Kota	smd	950.000.000
1.01.01. 02	SMAN 1 Samarinda				2.491.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.491.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1038 siswa	smd	1.557.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1038 siswa	smd	934.200.000
1.01.01. 03	SMAN 2 Samarinda				2.599.200.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.599.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1083 siswa	smd	1.624.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1083 siswa	smd	974.700.000
1.01.01. 04	SMAN 3 Samarinda				2.412.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.412.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1005 siswa	smd	1.507.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1005 siswa	smd	904.500.000
1.01.01. 05	SMAN 4 Samarinda				2.659.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.659.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1108 siswa	smd	1.662.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1108 siswa	smd	997.200.000
1.01.01. 06	SMAN 5 Samarinda				2.539.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.539.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1058 siswa	smd	1.587.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1058 siswa	smd	952.200.000
1.01.01. 07	SMAN 6 Samarinda				1.874.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.874.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	781 siswa	smd	1.171.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	781 siswa	smd	702.900.000
1.01.01. 08	SMAN 7 Samarinda				1.819.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.819.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	758 siswa	smd	1.137.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	758 siswa	smd	682.200.000
1.01.01. 09	SMAN 8 Samarinda				1.543.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.543.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	620 siswa	smd	964.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	620 siswa	smd	578.700.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 10	SMAN 9 Samarinda				1.629.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.629.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	662 siswa	smd	1.018.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	662 siswa	smd	611.100.000
1.01.01. 11	SMAN 10 Samarinda				2.625.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.625.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1092 siswa	smd	1.641.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1094 siswa	smd	984.600.000
1.01.01. 12	SMAN 11 Samarinda				1.480.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.480.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	617 siswa	smd	925.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	617 siswa	smd	555.300.000
1.01.01. 13	SMAN 12 Samarinda				516.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				516.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	215 siswa	smd	322.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	215 siswa	smd	193.500.000
1.01.01. 14	SMAN 13 Samarinda				1.329.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.329.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	559 siswa	smd	831.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	559 siswa	smd	498.600.000
1.01.01. 15	SMAN 14 Samarinda				993.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				993.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	414 siswa	smd	621.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	414 Kab/Kota	smd	372.600.000
1.01.01. 16	SMAN 15 Samarinda				609.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	254%		609.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	254 siswa	smd	381.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	254 siswa	smd	228.600.000
1.01.01. 17	SMAN 16 Samarinda				1.005.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.005.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	419 siswa	smd	628.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	419 siswa	smd	377.100.000
1.01.01. 18	SMAN 17 Samarinda				1.200.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.200.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	500 siswa	smd	750.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	500 Kab/Kota	smd	450.000.000
1.01.01. 19	SMAN Khusus Olahragawan				14.852.450.060
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.276.450.060
1.01.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	98 Laporan	smd	14.276.450.060
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				576.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	240 siswa	smd	360.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	240 siswa	smd	216.000.000
1.01.01. 20	SMKN 1 Samarinda				3.315.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.315.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1228 siswa	smd	1.964.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1228 siswa	smd	1.350.800.000
1.01.01. 21	SMKN 2 Samarinda				3.537.000.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.537.000.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1310 siswa	smd	2.096.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1310 siswa	smd	1.441.000.000
1.01.01. 22	SMKN 3 Samarinda				3.202.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.202.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1192 siswa	smd	1.897.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1192 siswa	smd	1.304.600.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 23	SMKN 4 Samarinda				2.851.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.851.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1056 siswa	smd	1.689.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1056 siswa	smd	1.161.600.000
1.01.01. 24	SMKN 5 Samarinda				3.045.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.045.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1804800000 siswa	smd	1.804.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1254000000 siswa	smd	1.240.800.000
1.01.01. 25	SMKN 6 Samarinda				2.694.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.694.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	998 Orang	smd	1.596.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	998 siswa	smd	1.097.800.000
1.01.01. 26	SMKN 7 Samarinda				2.281.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.281.500.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	845 siswa	smd	1.352.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	845 siswa	smd	929.500.000
1.01.01. 27	SMKN 8 Samarinda				2.648.700.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.648.700.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	981 siswa	smd	1.569.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	981 siswa	smd	1.079.100.000
1.01.01. 28	SMKN 9 Samarinda				2.135.700.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.135.700.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	791 siswa	smd	1.265.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	791 siswa	smd	870.100.000
1.01.01. 29	SMKN 10 Samarinda				1.517.400.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.517.400.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	562 siswa	smd	899.200.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	562 siswa	smd	618.200.000
1.01.01. 30	SMKN 11 Samarinda				2.076.300.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.076.300.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	680 siswa	smd	1.230.400.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	764 siswa	smd	845.900.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	764 siswa		
1.01.01. 31	SMKN 12 Samarinda				1.366.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.366.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	507 siswa	smd	809.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	506 siswa	smd	556.600.000
1.01.01. 32	SMKN 14 Samarinda				1.757.700.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.757.700.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	655 siswa	smd	1.041.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	655 siswa	smd	716.100.000
1.01.01. 33	SMKN 15 Samarinda				3.572.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.572.100.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1323 siswa	smd	2.116.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1323 siswa	smd	1.455.300.000
1.01.01. 34	SMKN 16 Samarinda				1.139.400.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.139.400.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	422 siswa	smd	675.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	422 siswa	smd	464.200.000
1.01.01. 35	SMKN 17 Samarinda				1.552.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.552.500.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	579 siswa	smd	920.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	579 siswa	smd	632.500.000
1.01.01. 36	SMKN 18 Samarinda				540.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				540.000.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	203 siswa	smd	320.000.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	203 siswa	smd	220.000.000
1.01.01.37	SMKN 19 Samarinda				1.849.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.849.500.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	685 siswa	smd	1.096.000.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	685 siswa	smd	753.500.000
1.01.01.38	SMKN 20 Samarinda				2.046.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.046.600.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	759 siswa	smd	1.212.800.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	759 siswa	smd	833.800.000
1.01.01.39	SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda				3.025.676.510
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.626.076.510
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	smd	2.626.076.510
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				399.600.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	149 siswa	smd	236.800.000
		Peningkatan mutu siswa dalam rangka SDM berkualitas	80 Siswa		
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	133 siswa	ktm	162.800.000
1.01.01.40	SMK-SPP Negeri Samarinda				6.967.712.780
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.463.115.280
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			smd	2.463.115.280
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				390.400.600
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			smd	25.150.600
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			smd	365.250.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				90.000.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			smd	90.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				3.154.796.900

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.20.09	pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu siswa dalam rangka SDM berkualitas	356 Siswa	smd	3.154.796.900
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				869.400.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	322 siswa	smd	515.200.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	322 siswa	smd	354.200.000
1.01.01.41	SMAN 1 Balikpapan				2.968.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.968.800.000
1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1238 siswa	bpn	1.855.500.000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1238 siswa	bpn	1.113.300.000
1.01.01.42	SMAN 2 Balikpapan Utara				2.196.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.196.000.000
1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	915 siswa	bpn	1.372.500.000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	915 siswa	bpn	823.500.000
1.01.01.43	SMAN 3 Balikpapan				2.481.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.481.600.000
1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1034 siswa	bpn	1.551.000.000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1034 siswa	bpn	930.600.000
1.01.01.44	SMAN 4 Balikpapan Selatan				2.500.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.500.800.000
1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1042 siswa	bpn	1.563.000.000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1042 siswa	bpn	937.800.000
1.01.01.45	SMAN 5 Balikpapan Selatan				2.306.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.306.400.000
1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	961 siswa	bpn	1.441.500.000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	961 siswa	bpn	864.900.000
1.01.01.46	SMAN 6 Balikpapan Utara				2.512.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.512.800.000
1.01.39.16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1047 siswa	bpn	1.570.500.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1047 siswa	bpn	942.300.000
1.01.01. 47	SMAN 7 Balikpapan Timur				2.260.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.260.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	942 siswa	bpn	1.413.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	942 siswa	bpn	847.800.000
1.01.01. 48	SMAN 8 Balikpapan Barat				2.119.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.119.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	883 siswa	bpn	1.324.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	883 siswa	bpn	794.700.000
1.01.01. 49	SMAN 9 Balikpapan Utara				1.924.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.924.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	802 siswa	bpn	1.203.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	802 siswa	bpn	721.800.000
1.01.01. 50	SMKN 1 Balikpapan				6.604.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				6.604.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	2446 siswa	bpn	3.913.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	2446 siswa	bpn	2.690.600.000
1.01.01. 51	SMKN 2 Balikpapan				3.861.000.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.861.000.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1430 siswa	bpn	2.288.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1430 siswa	bpn	1.573.000.000
1.01.01. 52	SMKN 3 Balikpapan				4.336.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				4.336.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1606 siswa	bpn	2.569.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1606 siswa	bpn	1.766.600.000
1.01.01. 53	SMKN 4 Balikpapan				3.196.800.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.196.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1189 siswa	bpn	1.894.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1184 siswa	bpn	1.302.400.000
1.01.01. 54	SMKN 5 Balikpapan				2.961.900.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.961.900.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1112 siswa	bpn	1.755.200.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	1112 siswa		
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1112 siswa	bpn	1.206.700.000
1.01.01. 55	SMKN 6 Balikpapan				3.788.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.788.100.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1403 siswa	bpn	2.244.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1403 siswa	bpn	1.543.300.000
1.01.01. 56	SMAN 1 Bontang				1.716.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.716.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	715 siswa	btg	1.072.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	715 siswa	btg	643.500.000
1.01.01. 57	SMAN 2 Bontang				1.430.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.430.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	596 siswa	ktm	894.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	596 siswa	ktm	536.400.000
1.01.01. 58	SMAN 3 Bontang				1.718.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.718.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	716 siswa	btg	1.074.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	716 siswa	btg	644.400.000
1.01.01. 59	SMKN 1 Bontang				3.159.000.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.159.000.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1173 siswa	btg	1.872.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1173 siswa	btg	1.287.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 60	SMKN 2 Bontang				1.819.800.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.819.800.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	674 siswa	btg	1.078.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	674 siswa	btg	741.400.000
1.01.01. 61	SMKN 3 Bontang				874.800.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				874.800.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	324 siswa	btg	518.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	324 siswa	btg	356.400.000
1.01.01. 62	SMAN 1 Anggana				1.776.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.776.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	740 siswa	kkr	1.110.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	740 siswa	kkr	666.000.000
1.01.01. 63	SMAN 1 Kembang Janggut				1.224.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.224.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	510 siswa	kkr	765.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	510 siswa	kkr	459.000.000
1.01.01. 64	SMAN 1 Kenohan				398.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				398.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	166 siswa	kkr	249.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	80 siswa	kkr	149.400.000
1.01.01. 65	SMAN 1 Kota Bangun				1.624.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.624.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	677 siswa	kkr	1.015.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	677 siswa	kkr	609.300.000
1.01.01. 66	SMAN 1 Loa Janan				926.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				926.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	386 siswa	kkr	579.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	386 siswa	kkr	347.400.000
1.01.01. 67	SMAN 1 Loa Kulu				1.718.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.718.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	715 siswa	kkr	1.074.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	715 siswa	kkr	644.400.000
1.01.01. 68	SMAN 1 Marang Kayu				1.027.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.027.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	428 siswa	kkr	642.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	428 siswa	kkr	385.200.000
1.01.01. 69	SMAN 1 Muara Badak				1.377.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.377.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	587 siswa	kkr	861.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	587 siswa	kkr	516.600.000
1.01.01. 70	SMAN 1 Muara Jawa				1.905.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.905.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	780 siswa	kkr	1.191.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	780 siswa	kkr	714.600.000
1.01.01. 71	SMAN 1 Muara Kaman				1.452.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.452.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	605 siswa	kkr	907.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	605 siswa	kkr	544.500.000
1.01.01. 72	SMAN 1 Muara Muntai				1.077.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.077.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	449 siswa	kkr	673.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	446 siswa	kkr	404.100.000
1.01.01. 73	SMAN 1 Muara Wis				482.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				482.400.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	201 siswa	kkr	301.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	201 siswa	kkr	180.900.000
1.01.01. 74	SMAN 1 Samboja				1.351.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.351.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	564 siswa	kkr	844.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	564 siswa	kkr	506.700.000
1.01.01. 75	SMAN 1 Sanga-Sanga				897.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				897.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	374 siswa	kkr	561.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	374 siswa	kkr	336.600.000
1.01.01. 76	SMAN 1 Sebulu				1.312.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.312.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	547 siswa	kkr	820.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	547 siswa	kkr	492.300.000
1.01.01. 77	SMAN 1 Tabang				660.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				660.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	275 siswa	kkr	412.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	275 siswa	kkr	247.500.000
1.01.01. 78	SMAN 1 Tenggarong				2.148.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.148.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	895 siswa	kkr	1.342.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	895 siswa	kkr	805.500.000
1.01.01. 79	SMAN 1 Tenggarong Seberang				1.418.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.418.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	591 siswa	kkr	886.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	591 siswa	kkr	531.900.000
1.01.01. 80	SMAN 2 Kota Bangun				708.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				708.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	295 siswa	kkr	442.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	295 siswa	kkr	265.500.000
1.01.01. 81	SMAN 2 Loa Janan				386.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				386.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	170 siswa	kkr	241.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	153000000 Kab/Kota	kkr	144.900.000
1.01.01. 82	SMAN 2 Loa Kulu				640.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				640.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	267 siswa	kkr	400.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	267 siswa	kkr	240.300.000
1.01.01. 83	SMAN 2 Marang Kayu				552.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				552.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	230 siswa	kkr	345.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	230 siswa	kkr	207.000.000
1.01.01. 84	SMAN 2 Muara Badak				895.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				895.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	373 siswa	kkr	559.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	379 siswa	kkr	335.700.000
1.01.01. 85	SMAN 2 Muara Muntai				400.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				400.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	167 siswa	kkr	250.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	167 siswa	kkr	150.300.000
1.01.01. 86	SMAN 2 Samboja				950.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				950.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	396 siswa	kkr	594.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	396 siswa	kkr	356.400.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 87	SMAN 2 Sebulu				1.387.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.387.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	578 siswa	kkr	867.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	578 siswa	kkr	520.200.000
1.01.01. 88	SMAN 2 Tenggarong				2.289.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.289.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	953 siswa	kkr	1.431.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	953 siswa	kkr	858.600.000
1.01.01. 89	SMAN 2 Tenggarong Seberang				1.209.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.209.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	505 siswa	kkr	756.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	504 siswa	kkr	453.600.000
1.01.01. 90	SMAN 3 Marang Kayu				388.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				388.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	162 siswa	kkr	243.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	162 siswa	kkr	145.800.000
1.01.01. 91	SMAN 3 Tenggarong				674.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				674.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	281 siswa	kkr	421.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	281 siswa	kkr	252.900.000
1.01.01. 92	SMKN 1 Anggana				834.300.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				834.300.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	309 siswa	kkr	494.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	309 siswa	kkr	339.900.000
1.01.01. 93	SMKN 1 Kembang Janggut				988.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				988.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	366 siswa	kkr	585.600.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	367 Orang	kkr	402.600.000
1.01.01.94	SMKN 1 Kota Bangun				504.900.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				504.900.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	187 siswa	kkr	299.200.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	187 siswa	kkr	205.700.000
1.01.01.95	SMKN 1 Loa Janan				143.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				143.100.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	53 siswa	kkr	84.800.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	53 siswa	kkr	58.300.000
1.01.01.96	SMKN 1 Marang Kayu				712.800.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				712.800.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	265 siswa	kkr	422.400.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	264 siswa	kkr	290.400.000
1.01.01.97	SMKN 1 Muara Badak				664.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				664.200.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	246 siswa	kkr	393.600.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	246 siswa	kkr	270.600.000
1.01.01.98	SMKN 1 Muara Jawa				645.300.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				645.300.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	171 siswa	kkr	382.400.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	171 siswa	kkr	262.900.000
1.01.01.99	SMKN 1 Muara Kaman				94.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				94.500.000
1.01.40.10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	35 siswa	kkr	56.000.000
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	35 siswa	kkr	38.500.000
1.01.01.100	SMKN 1 Muara Muntai				356.400.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				356.400.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	132 siswa	kkr	211.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	132 siswa	kkr	145.200.000
1.01.01. 101	SMKN 1 Samboja				1.449.900.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.449.900.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	537 siswa	kkr	859.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	537 siswa	kkr	590.700.000
1.01.01. 102	SMKN 1 Sanga-Sanga				1.482.300.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.482.300.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	549 siswa	kkr	878.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	549 siswa	kkr	603.900.000
1.01.01. 103	SMKN 1 Sebulu				626.400.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				626.400.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	230 siswa	kkr	371.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	230 siswa	kkr	255.200.000
1.01.01. 104	SMKN 1 Tenggarong				2.700.000.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.700.000.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1000 siswa	kkr	1.600.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1000 siswa	kkr	1.100.000.000
1.01.01. 105	SMKN 1 Tenggarong Seberang				191.700.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				191.700.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	71 siswa	kkr	113.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	71 siswa	kkr	78.100.000
1.01.01. 106	SMKN 2 Sebulu				918.000.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				918.000.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	340 siswa	kkr	544.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	340 siswa	kkr	374.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 107	SMKN 2 Tenggarong				3.153.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				3.153.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1168 siswa	kkr	1.868.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1168 siswa	kkr	1.284.800.000
1.01.01. 108	SMKN 3 Tenggarong				1.036.800.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.036.800.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	384 siswa	kkr	614.400.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	388 siswa		
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	388 siswa	kkr	422.400.000
1.01.01. 109	SMAN 1 Batu Ampar				484.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				484.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	202 siswa	ktm	303.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	202 siswa	ktm	181.800.000
1.01.01. 110	SMAN 1 Bengalon				818.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				818.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	341 siswa	ktm	511.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	340 siswa	ktm	306.900.000
1.01.01. 111	SMAN 1 Busang				259.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				259.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	108 siswa	ktm	162.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	108 siswa	ktm	97.200.000
1.01.01. 112	SMAN 1 Kaliorang				528.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				528.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	221 siswa	ktm	330.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	221 siswa	ktm	198.000.000
1.01.01. 113	SMAN 1 Kaubun				691.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				691.200.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	288 siswa	ktm	432.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	288 siswa	ktm	259.200.000
1.01.01. 114	SMAN 1 Kongbeng				604.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				604.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	252 siswa	ktm	378.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	210 siswa	ktm	226.800.000
1.01.01. 115	SMAN 1 Long Mesangat				787.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				787.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	328 siswa	ktm	492.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	328 siswa	ktm	295.200.000
1.01.01. 116	SMAN 1 Muara Ancalong				633.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				633.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	264 siswa	ktm	396.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	264 siswa	ktm	237.600.000
1.01.01. 117	SMAN 1 Muara Bengkal				852.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				852.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	355 siswa	ktm	532.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	355 siswa	ktm	319.500.000
1.01.01. 118	SMAN 1 Muara Wahau				496.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				496.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	207 siswa	ktm	310.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	207 siswa	ktm	186.300.000
1.01.01. 119	SMAN 1 Rantau Pulung				796.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				796.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	332 siswa	ktm	498.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	332 siswa	ktm	298.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 120	SMAN 1 Sandaran				631.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				631.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	263 siswa	ktm	394.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	263 siswa	ktm	236.700.000
1.01.01. 121	SMAN 1 Sangatta Selatan				1.192.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.192.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	496 siswa	ktm	745.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	496 siswa	ktm	447.300.000
1.01.01. 122	SMAN 1 Sangatta Utara				2.431.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.431.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1012 siswa	ktm	1.519.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1012 siswa	ktm	911.700.000
1.01.01. 123	SMAN 1 Sangkulirang				950.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				950.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	396 siswa	ktm	594.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	396 siswa	ktm	356.400.000
1.01.01. 124	SMAN 1 Teluk Pandan				417.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				417.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	173 Kab/Kota	ktm	261.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	173 Orang	ktm	156.600.000
1.01.01. 125	SMAN 2 Muara Wahau				789.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				789.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	329 siswa	ktm	493.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	329 siswa	ktm	296.100.000
1.01.01. 126	SMAN 2 Sangatta Utara				1.836.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.836.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	765 siswa	ktm	1.147.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	765 siswa	ktm	688.500.000
1.01.01. 127	SMAN 2 Busang				307.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				307.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	128 siswa	ktm	192.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	128 siswa	ktm	115.200.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	128 siswa		
1.01.01. 128	SMAN 2 Muara Ancalong				434.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				434.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	181 siswa	ktm	271.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	181 siswa	ktm	162.900.000
1.01.01. 129	SMKN 1 Bengalon				1.398.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.398.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	518 siswa	ktm	828.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	518 siswa	ktm	569.800.000
1.01.01. 130	SMKN 1 Kaliorang				1.066.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.066.500.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	400 siswa	ktm	632.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	400 siswa	ktm	434.500.000
1.01.01. 131	SMKN 1 Karangan				534.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				534.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	169 siswa	ktm	316.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	169 siswa	ktm	217.800.000
1.01.01. 132	SMKN 1 Kongbeng				1.074.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.074.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	398 siswa	ktm	636.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	398 siswa	ktm	437.800.000
1.01.01. 133	SMKN 1 Muara Bengkal				718.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				718.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	350 siswa	ktm	425.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	350 siswa	ktm	292.600.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	350 siswa		
1.01.01. 134	SMKN 1 Muara Wahau				1.420.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.420.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	526 siswa	ktm	841.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	526 siswa	ktm	578.600.000
1.01.01. 135	SMKN 1 Sangatta Utara				2.149.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.149.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	796 siswa	ktm	1.273.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	796 siswa	ktm	875.600.000
1.01.01. 136	SMKN 1 Sangkulirang				278.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				278.100.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	103 siswa	ktm	164.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	103 siswa	ktm	113.300.000
1.01.01. 137	SMKN 1 Rantau Pulung				383.400.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				383.400.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	142 siswa	ktm	227.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	142 siswa	ktm	156.200.000
1.01.01. 138	SMKN 1 Telen				332.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				332.100.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	123 siswa	ktm	196.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	123 siswa	ktm	135.300.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 139	SMKN 2 Bengalon				359.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				359.100.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	133 siswa	ktm	212.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	133 siswa	ktm	146.300.000
1.01.01. 140	SMKN 2 Sangatta Utara				2.478.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.478.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	918 Orang	ktm	1.468.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	918 Orang	ktm	1.009.800.000
1.01.01. 141	SMKN 2 Sangkulirang				315.900.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				315.900.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	117 siswa	ktm	187.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	117 siswa	ktm	128.700.000
1.01.01. 142	SMAN 1 Bentian Besar				271.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				271.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	114 siswa	kbr	169.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	114 siswa	kbr	101.700.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	114 siswa		
1.01.01. 143	SMAN 1 Bongan				249.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				249.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	104 siswa	kbr	156.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	104 siswa	kbr	93.600.000
1.01.01. 144	SMAN 1 Damai				204.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				204.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	83 siswa	kbr	127.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	83 siswa	kbr	76.500.000
1.01.01. 145	SMAN 1 Jempang				868.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				868.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	362 siswa	kbr	543.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	362 Kab/Kota	kbr	325.800.000
1.01.01. 146	SMAN 1 Linggang Bigung				1.320.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.320.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	550 siswa	kbr	825.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	550 siswa	kbr	495.000.000
1.01.01. 147	SMAN 1 Long Iram				640.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				640.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	267 siswa	kbr	400.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	267 siswa	kbr	240.300.000
1.01.01. 148	SMAN 1 Mook Manaar Bulatn				189.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				189.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	2020 siswa	kbr	118.500.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	2020 siswa		
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	2020 siswa	kbr	71.100.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	2020 siswa		
1.01.01. 149	SMAN 1 Muara Lawa				712.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				712.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	297 siswa	kbr	445.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	297 siswa	kbr	267.300.000
1.01.01. 150	SMAN 1 Muara Pahu				688.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				688.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	287 siswa	kbr	430.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	287 siswa	kbr	258.300.000
1.01.01. 151	SMAN 1 Nyuatan				160.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				160.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	67 siswa	kbr	100.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	69 siswa	kbr	60.300.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	67 siswa		
1.01.01. 152	SMAN 1 Penyinggahan				444.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				444.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	185 siswa	kbr	277.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	185 siswa	kbr	166.500.000
1.01.01. 153	SMAN 1 Sendawar				1.754.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.754.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	731 siswa	kbr	1.096.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	731 siswa	kbr	657.900.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	731 siswa		
1.01.01. 154	SMAN 1 Siluq Ngurai				475.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				475.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	198 siswa	kbr	297.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	198 siswa	kbr	178.200.000
1.01.01. 155	SMAN 2 Linggang Bigung				175.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				175.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	73 siswa	kbr	109.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	73 siswa	kbr	65.700.000
1.01.01. 156	SMAN 2 Sendawar				1.840.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.840.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	767 siswa	kbr	1.150.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	767 siswa	kbr	690.300.000
1.01.01. 157	SMAN 3 Sendawar				336.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				336.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	140 siswa	kbr	210.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	140 siswa	kbr	126.000.000
1.01.01. 158	SMAN 4 Sendawar				165.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				165.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	69 siswa	kbr	103.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	69 siswa	kbr	62.100.000
1.01.01. 159	SMKN 1 Bongan				680.400.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				680.400.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	252 siswa	kbr	403.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	252 siswa	kbr	277.200.000
1.01.01. 160	SMKN 1 Linggang Bigung				521.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				521.100.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	193 siswa	kbr	308.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	193 siswa	kbr	212.300.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	193 siswa		
1.01.01. 161	SMKN 1 Mook Manaar Bulatn				351.000.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				351.000.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	130 siswa	kbr	208.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	130 siswa	kbr	143.000.000
1.01.01. 162	SMKN 1 Sendawar				1.930.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.930.500.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	715 siswa	kbr	1.144.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	715 siswa	kbr	786.500.000
1.01.01. 163	SMKN 1 Tering				556.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				556.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	206 siswa	kbr	329.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	206 siswa	kbr	226.600.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 164	SMKN 2 Sendawar				1.304.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.304.100.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	483 siswa	kbr	772.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	483 siswa	kbr	531.300.000
1.01.01. 165	SMKN 3 Sendawar				791.100.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				791.100.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	293 siswa	kbr	468.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	293 siswa	kbr	322.300.000
1.01.01. 166	SMAN 1 Berau				1.406.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.406.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	586 siswa	bru	879.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	586 siswa	bru	527.400.000
1.01.01. 167	SMAN 2 Berau				1.860.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.860.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	775 siswa	bru	1.162.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	775 siswa	bru	697.500.000
1.01.01. 168	SMAN 3 Berau				780.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				780.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	325 siswa	bru	487.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	325 siswa	bru	292.500.000
1.01.01. 169	SMAN 4 Berau				1.408.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.408.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	587 siswa	bru	880.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	587 siswa	bru	528.300.000
1.01.01. 170	SMAN 5 Berau				1.526.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.526.400.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	90 siswa	bru	954.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	636 siswa	bru	572.400.000
1.01.01. 171	SMAN 6 Berau				1.413.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.413.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	589 siswa	bru	883.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	589 siswa	bru	530.100.000
1.01.01. 172	SMAN 7 Berau				1.008.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.008.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	420 siswa	bru	630.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	420 siswa	bru	378.000.000
1.01.01. 173	SMAN 8 Berau				792.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				792.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	330 siswa	bru	495.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	330 siswa	bru	297.000.000
1.01.01. 174	SMAN 9 Berau				403.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				403.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	168 siswa	bru	252.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	168 siswa	bru	151.200.000
1.01.01. 175	SMAN 10 Berau				444.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				444.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	185 siswa	bru	277.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	185 siswa	bru	166.500.000
1.01.01. 176	SMAN 11 Berau				266.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				266.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	111 siswa	bru	166.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	111 siswa	bru	99.900.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 177	SMAN 12 Berau				988.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				988.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	412 siswa	bru	618.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	412 siswa	bru	370.800.000
1.01.01. 178	SMAN 13 Berau				424.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				424.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	177 siswa	bru	265.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	177 siswa	bru	159.300.000
1.01.01. 179	SMAN 14 Berau				768.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				768.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	290 siswa	bru	480.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	290 siswa	bru	288.000.000
1.01.01. 180	SMKN 1 Berau				1.687.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.687.500.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	625 siswa	bru	1.000.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	625 siswa	bru	687.500.000
1.01.01. 181	SMKN 2 Berau				1.055.700.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.055.700.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	391 siswa	bru	625.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	391 siswa	bru	430.100.000
1.01.01. 182	SMKN 3 Berau				1.020.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.020.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	378 siswa	bru	604.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	378 siswa	bru	415.800.000
1.01.01. 183	SMKN 4 Berau				194.400.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				194.400.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	72 siswa	bru	115.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	72 siswa	bru	79.200.000
1.01.01. 184	SMKN 5 Berau				826.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				826.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	306 siswa	bru	489.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	306 siswa	bru	336.600.000
1.01.01. 185	SMKN 6 Berau				715.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				715.500.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	267 siswa	bru	424.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	267 siswa	bru	291.500.000
1.01.01. 186	SMKN 7 Berau				205.200.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				205.200.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	76 siswa	bru	121.600.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	76 siswa	bru	83.600.000
1.01.01. 187	SMKN 8 Berau				445.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				445.500.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	165 siswa	bru	264.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	165 siswa	bru	181.500.000
1.01.01. 188	SMAN 1 Batu Engau				612.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				612.000.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	255 siswa	psr	382.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	255 Orang	psr	229.500.000
1.01.01. 189	SMAN 1 Batu Sopang				1.876.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.876.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	782 siswa	psr	1.173.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	782 siswa	psr	703.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01. 190	SMAN 1 Kuaro				1.070.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.070.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	448 siswa	psr	669.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	448 siswa	psr	401.400.000
1.01.01. 191	SMAN 1 Long Ikis				2.008.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				2.008.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	837 siswa	psr	1.255.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	837 siswa	psr	753.300.000
1.01.01. 192	SMAN 1 Long Kali				1.221.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.221.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	509 siswa	psr	763.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	509 siswa	psr	458.100.000
1.01.01. 193	SMAN 1 Muara Komam				429.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				429.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	180 siswa	psr	268.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	180 Kab/Kota	psr	161.100.000
1.01.01. 194	SMAN 1 Muara Samu				261.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				261.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	109 siswa	psr	163.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	109 siswa	psr	98.100.000
1.01.01. 195	SMAN 1 Pasir Belengkong				859.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				859.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	358 siswa	psr	537.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	358 siswa	psr	322.200.000
1.01.01. 196	SMAN 1 Tanah Grogot				1.908.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.908.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	796 Kab/Kota	psr	1.192.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	796 siswa	psr	715.500.000
1.01.01. 197	SMAN 1 Tanjung Harapan				448.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				448.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	187 siswa	psr	280.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	187 siswa	psr	168.300.000
1.01.01. 198	SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot				1.065.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.065.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	444 siswa	psr	666.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	444 siswa	psr	399.600.000
1.01.01. 199	SMAN 2 Batu Engau				184.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				184.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	81 siswa	psr	115.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	81 siswa	psr	69.300.000
1.01.01. 200	SMAN 2 Long Ikis				525.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				525.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	219 siswa	psr	328.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	219 siswa	psr	197.100.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	219 siswa		
1.01.01. 201	SMKN 1 Tanah Grogot				2.759.400.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.759.400.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	1019 siswa	psr	1.635.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	1019 siswa	psr	1.124.200.000
1.01.01. 202	SMKN 2 Tanah Grogot				2.216.700.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.216.700.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	821 siswa	psr	1.313.600.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	822 siswa	psr	903.100.000
1.01.01. 203	SMKN 3 Tanah Grogot				2.200.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.200.500.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	815 siswa	psr	1.304.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	815 siswa	psr	896.500.000
1.01.01. 204	SMKN 4 Tanah Grogot				1.023.300.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.023.300.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	379 siswa	psr	606.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	379 siswa	psr	416.900.000
1.01.01. 205	SMAN 1 Penajam Paser Utara				1.365.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.365.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	569 siswa	ppu	853.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	569 siswa	ppu	512.100.000
1.01.01. 206	SMAN 2 Penajam Paser Utara				1.430.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.430.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	596 siswa	ppu	894.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	596 siswa	ppu	536.400.000
1.01.01. 207	SMAN 3 Penajam Paser Utara				964.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				964.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	402 siswa	ppu	603.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	402 siswa	ppu	361.800.000
1.01.01. 208	SMAN 4 Penajam Paser Utara				1.159.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.159.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	483 siswa	ppu	724.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	483 siswa	ppu	434.700.000
1.01.01. 209	SMAN 5 Penajam Paser Utara				1.053.600.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.053.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	439 siswa	ppu	658.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	439 siswa	ppu	395.100.000
1.01.01. 210	SMAN 6 Penajam Paser Utara				705.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				705.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	294 siswa	ppu	441.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	294 siswa	ppu	264.600.000
1.01.01. 211	SMAN 8 Penajam Paser Utara				571.200.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				571.200.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	238 siswa	ppu	357.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	239 Kab/Kota	ppu	214.200.000
		Peningkatan mutu siswa dalam rangka SDM berkualitas	80 Siswa		
1.01.01. 212	SMKN 1 Penajam Paser Utara				1.371.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.371.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	508 siswa	ppu	812.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	508 siswa	ppu	558.800.000
1.01.01. 213	SMKN 2 Penajam Paser Utara				2.535.300.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				2.535.300.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	939 siswa	ppu	1.502.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	939 siswa	ppu	1.032.900.000
1.01.01. 214	SMKN 3 Penajam Paser Utara				1.684.800.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.684.800.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	624 siswa	ppu	998.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	624 siswa	ppu	686.400.000
1.01.01. 215	SMKN 4 Penajam Paser Utara				1.125.900.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1.125.900.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	417 siswa	ppu	667.200.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	426 siswa	ppu	458.700.000
1.01.01. 216	SMKN 5 Penajam Paser Utara				588.600.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				588.600.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	218 siswa	ppu	348.800.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	218 siswa	ppu	239.800.000
1.01.01. 217	SMKN 6 Penajam Paser Utara				378.000.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				378.000.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	140 siswa	ppu	224.000.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	140 siswa	ppu	154.000.000
1.01.01. 218	SMAN 1 Long Hubung				494.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				494.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	207 siswa	mah	309.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	207 siswa	mah	185.400.000
1.01.01. 219	SMAN 1 Long Apri				328.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				328.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	135 siswa	mah	205.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	135 siswa	mah	123.300.000
1.01.01. 220	SMAN 1 Long Pahangai				249.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				249.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	106 siswa	mah	156.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	106 siswa	mah	93.600.000
1.01.01. 221	SMAN 1 Long Bagun				1.228.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.228.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	512 siswa	mah	768.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	512 siswa	mah	460.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.01.222	SLBN Pembina Prov Kaltim				595.200.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				595.200.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	192 siswa	smd	211.200.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	192 siswa		
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	192 siswa	smd	384.000.000
1.01.01.223	SLBN Balikpapan				1.205.900.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				1.205.900.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	389 siswa	bpn	427.900.000
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	389 siswa	bpn	778.000.000
1.01.01.224	SLBN Bontang				418.500.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				418.500.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	135 siswa	btg	148.500.000
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	135 siswa	btg	270.000.000
1.01.01.225	SLBN Tenggarong				576.600.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				576.600.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	191 siswa	kkr	204.600.000
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	191 siswa	kkr	372.000.000
1.01.01.226	SLBN Kutai Timur				375.100.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				375.100.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSNAS	121 siswa	ktm	133.100.000
		Jumlah siswa penerima BOSDA	121 siswa		
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	121 siswa	ktm	242.000.000
1.01.01.227	SLBN Kutai Barat				350.300.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				350.300.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	113 siswa	kbr	124.300.000
1.01.19.20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	113 siswa	kbr	226.000.000
1.01.01.228	SLBN Tanjung Redeb				372.000.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				372.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.19. 19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	120 siswa	bru	132.000.000
1.01.19. 20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	121 siswa	bru	240.000.000
1.01.01. 229	SLBN Tanah Grogot				198.400.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				198.400.000
1.01.19. 19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Pelayanan Administrasi Perkantoran	65 Laporan	psr	70.400.000
1.01.19. 20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	65 Orang	psr	128.000.000
1.01.01. 230	SLBN Penajam Paser Utara				282.100.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				282.100.000
1.01.19. 19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	91 siswa	ppu	100.100.000
1.01.19. 20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	94 siswa	ppu	182.000.000
1.01.01. 231	SMAN 2 Muara Kaman				362.400.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				362.400.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	151 siswa	kkr	226.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	151 siswa	kkr	135.900.000
1.01.01. 232	SMAN 15 Berau				309.600.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				309.600.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	129 siswa	bru	193.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	129 siswa	bru	116.100.000
1.01.01. 233	SMKN 4 Bontang				186.300.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				186.300.000
1.01.40. 10	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	69 siswa	btg	110.400.000
1.01.40. 18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	69 siswa	btg	75.900.000
1.01.01. 235	UPTD Taman Budaya				4.159.335.685
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.403.582.435
1.01.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Laporan	smd	1.403.582.435
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit		503.810.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	100 Unit	smd	150.760.000
1.01.08.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (DAK)	jumlah gedung kantor skpd dan unit kerja intenal skpd yang dipelihara	0 Unit	smd	353.050.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		96.955.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	100 Kali	smd	96.955.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	130 Orang		2.154.988.250
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	100 Kab/Kota	smd	585.826.250
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film	100 Kab / Kota	smd	172.212.000
2.16.15.09	Revitalisasi budaya daerah (DAK)	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	35 Unit	smd	1.396.950.000
1.01.01.236	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				10.785.105.320
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	82.67 %		946.105.320
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Laporan	smd	946.105.320
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit		9.231.100.000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	1399 Unit	smd	8.827.850.000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	8 Laporan	smd	403.250.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		607.900.000
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	10 Kali	smd	556.400.000
		jumlah aparatur yang dilatih	5 Orang		
1.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	2 Laporan	smd	51.500.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Percentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	92%		-
1.01.20.09	pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan infromasi manajemen pendidikan	5 Laporan	smd	-
1.01.01.237	UPTD Museum Negeri Mulawarman				4.326.662.160
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.712.512.160
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Laporan	kkr	1.712.512.160
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Unit		206.950.000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	100 Unit	kkr	206.950.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100 Orang		417.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	100 Kali	kkr	417.000.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	100 Orang		1.990.200.000
2.16.15. 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	100 Kab/Kota	kkr	317.000.000
2.16.15. 08	Perekaman Potensi Seni Budaya dan Sejarah Daerah (DAK)	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	100 Unit	kkr	1.673.200.000
1.01.01. 238	SMAN 3 Muara Muntai				160.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				160.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	67 siswa	kkr	100.500.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	67 siswa	kkr	60.300.000
1.01.01. 239	SMAN 2 Tabang				220.800.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas				220.800.000
1.01.39. 16	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	92 siswa	kkr	138.000.000
1.01.39. 24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	92 siswa	kkr	82.800.000
1.01.01. 240	SLBN Mahakam Ulu				126.600.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa				126.600.000
1.01.19. 19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Jumlah siswa penerima BOSDA	6 siswa	mah	6.600.000
1.01.19. 20	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Jumlah siswa penerima BOSNAS	6 siswa	mah	120.000.000
1.02	Kesehatan				998.593.536.798
1.02.01	Dinas Kesehatan				109.164.365.129
1.02.01. 01	Dinas Kesehatan				75.509.352.229
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%		3.128.381.200
1.02.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	3.128.381.200
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		4.316.778.135
1.02.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	5 unit	smd	2.954.766.297
1.02.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	5 unit	smd	1.362.011.838
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		812.775.000
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12 Bulan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	607.775.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	75 Kali		
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	90 Kali		
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	30 Orang	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	205.000.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68%		1.296.449.000
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	469.012.000
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10 dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	418.437.000
1.02.10.03	Dukungan Manajemen (DAK)	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	50 Kali	bpn	409.000.000
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	99%		1.067.806.250
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan obat , vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer stok)	100%	smd	841.500.250
1.02.15.02	Pemenuhan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	150 Jenis	smd	-
1.02.15.04	Distribusi Obat dan e-logistic (DAK)	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	0 unit	psr	226.306.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	50%		12.278.497.734
1.02.16.05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	10 kab/kota	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	408.779.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.16.07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah fasyankes yang difasilitasi dan dilakukan kegiatan pemeliharaan alkes (RMC)	80 fasyankes	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	939.729.734
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin alat kesehatan	16 sarana		
		Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	150 fasyankes		
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin Kefarmasian	19 sarana		
1.02.16.09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi dalam melaksanakan SPM	10 Kab/Kota	smd	374.887.000
		Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugarannya	3100 orang		
1.02.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	40%	smd, luarPrv	356.875.000
1.02.16.15	Pembinaan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan primer (DAK)	persentase penduduk miskin yang mempunyai akses layanan kesehatan	90%	smd	-
1.02.16.17	Pengelolaan Satker (DAK)			smd	-
1.02.16.18	Penurunan Stunting (DAK)	kab/kota melakukan penguatan intervensi paket Gizi (PMT,Vit.A,TTD) pada bumil dan balita	10 kab/kota	smd	5.014.781.000
1.02.16.19	Pembinaan Gizi Masyarakat (DAK)	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	10 kab/kota	bru	1.486.280.000
1.02.16.20	Pembinaan Kesehatan Keluarga (DAK)	Jumlah Kab/ kota yang dimonev pascalatih prog kesga pertahan	10 kab/kota	ktm	1.400.000.000
1.02.16.21	Penyehatan Lingkungan (DAK)	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	50%	mah	1.787.351.000
1.02.16.22	Upaya Kesehatan Kerja Dan Olahraga (DAK)	Jumlah kab/kota yang dibina untuk melaksanakan Kesjaor di puskesmas	10 kab/kota	kbr	509.815.000
1.02.17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	90%		33.705.000.000
1.02.17.01	Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	10 kab/kota	smd	33.705.000.000
		Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan	79000 orang		
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	70%		2.582.635.000
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan	6 Kali	smd	487.635.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun	5 Kali		
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun	10 Kab/Kota		
		Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS	15 Rumah Sakit		
1.02.19. 03	Kampanye sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat (DAK)	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	0 unit	kkr	-
1.02.19. 04	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat (DAK)	Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun	5 Kali	ktm	2.095.000.000
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	6 Kab/Kota		10.049.974.660
1.02.22. 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR=>70% dan SR=>90%	4 kab/kota	bru, mah, smd	616.520.000
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV => 55%	4 Kab/Kota		
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standart =>95%	7 Kab/Kota		
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	5 Kab/Kota		
1.02.22. 09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	8 Kab/Kota	kbr, kkr, smd, luarPrv	8.933.454.660
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	9 Kab/Kota		
		Persentase Kab/Kota yang melakukan persiapan pencegahan kejadian bencana	100%		
		Persentase Kab/Kota yang melakukan persiapan pencegahan KLB	100%		
1.02.22. 11	Upaya Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan PTM, Keswa dan Napza	10 Kab/Kota	kkr	500.000.000
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan advokasi & sosialisasi terkait program P2 penyakit menular	10 kab/kota		
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	8 Kab/Kota		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	43%		1.199.822.250
1.02.23. 07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi	80 puskesmas	smd	513.421.250
1.02.23. 08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Kab/kota yang memiliki Fasyankes telah mempersiapkan pelayanan telemedicine	2 kab/kota	smd, luarPrv	492.865.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kejadian bencana yang ditangani	100%		
		Persentase KLB yang ditangani	100%		
		Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	7 RSUD		
1.02.23. 11	Peningkatan pelayanan kesehatan Pengembangan	Jumlah kab kota yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional	7 Kab/Kota	smd	193.536.000
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	70 Fasyankes		4.648.758.000
1.02.56. 04	Standarisasi Tenaga Kesehatan di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan	jumlah puskesmas daerah DTPK/T3 yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	25 Puskesmas	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	4.648.758.000
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular	6 Kab/Kota		422.475.000
1.02.59. 01	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR	6 OPD	smd	422.475.000
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah	50%		
		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM)	3 Kab/Kota		
		Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun	5 Kab/Kota		
1.02.01. 02	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				5.865.123.001
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Presentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal	100%		5.865.123.001
1.02.47. 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya barang dan jasa BLUD	12 Bulan	smd	5.865.123.001
1.02.01. 03	UPTD Balai Latihan Kesehatan				3.772.551.760
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya administrasi perkantoran	0%		1.872.753.760
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70%		
1.02.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.872.753.760
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	0%		1.486.450.000
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		
1.02.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1 unit	smd	386.460.000
1.02.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 unit	smd	1.099.990.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		362.148.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	25 Kali	smd	294.148.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	23 Kali		
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek pertahun	10 orang	smd	68.000.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				-
1.02.23.14	Peningkatan sarana dan prasarana Bapelkes (DAK)	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1 unit	smd	-
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	70%		51.200.000
1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	smd	51.200.000
		Jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan	270 orang		
1.02.01.04	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim				4.865.891.392
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%		2.392.035.780
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.392.035.780
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	0%		1.185.670.212
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1 unit	smd	684.054.612
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 unit	smd	501.615.600
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	0%		417.985.400
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	70%		
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	20 Kali	smd	94.915.400
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 Kali	smd	323.070.000
		Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang		
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				870.200.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	0 unit	smd	870.200.000
1.02.01.05	UPTD Laboratorium Kesehatan				3.387.930.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	0%		1.201.150.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70%		
1.02.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.201.150.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	0%		2.155.090.000
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		
1.02.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1 unit	smd	1.941.300.000
1.02.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 unit	smd	213.790.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	0%		31.690.000
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	70%		
1.02.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	60 Kali	smd	31.690.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100%		-
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100%		
		Persentase puskesmas terakreditasi paripurna minimal 1 puskesmas per Kab/ Kota	30%		
1.02.23. 13	Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK)			smd	-
1.02.01. 06	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)				5.481.618.267
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100%		5.481.618.267
1.02.47. 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya tenaga teknis BLUD	12 Bulan	smd	5.481.618.267
		Tersedianya barang dan jasa BLUD	12 Bulan		
1.02.01. 07	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI				8.281.898.480
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya administrasi perkantoran	0%		4.649.689.960
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70%		
1.02.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	0 Bulan	smd	4.649.689.960
		Kualitas layanan administrasi RS	100%		
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	0%		864.800.000
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		
1.02.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	0 unit	smd	148.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kualitas layanan administrasi RS	100%		
1.02.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	0 unit	smd	716.000.000
		Alat kesehatan, alat kantor dan gedung terpelihara	1 Tahun		
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	0%		746.350.000
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%		
1.02.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	0 Kali	smd	323.750.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 Kali		
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	100%		
1.02.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	0 Orang	smd	422.600.000
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	70%		
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	10%		722.268.120
1.02.15. 01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	0 Jenis	smd	722.268.120
		Ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis sesuai standar	84%		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	100%		959.850.000
1.02.23. 08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan			smd	959.850.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	0%		288.000.000
		Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	90%		
1.02.26. 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alat kesehatan yang diadakan	100 unit	smd	31.500.000
1.02.26. 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan logistik RS/ Balai yang diadakan	100 Bahan	smd	256.500.000
		Jumlah bahan-bahan logistik RS yang diadakan	100 unit		
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	100%		50.940.400
1.02.27. 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat kesehatan, alat kantor dan gedung terpelihara	1 Tahun	smd	50.940.400
1.02.01. 08	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI (BLUD)				2.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Presentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal	100%		2.000.000.000
1.02.47. 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	12 bulab	smd	2.000.000.000
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda				514.021.997.536
1.02.02. 01	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda				27.997.522.531

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%		870.512.500
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kualitas layanan administrasi RS	80%	smd	870.512.500
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	69%		309.000.000
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah	0 laporan	smd	309.000.000
		Jumlah laporan SAKIP	1 Laporan		
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Stock out dan stagnansi obat dan bhp medis	6%		5.000.000.000
1.02.15.01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis sesuai standar	100%	smd	5.000.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	90%		8.662.164.133
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Kesesuaian sapras RS sesuai standar RS kelas A	90%	smd	3.272.950.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Kesesuaian peralatan medis sesuai standar RS kelas A	90%	smd	286.240.000
1.02.26.19	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah Gedung yang diadakan	1 Gedung	smd	-
1.02.26.24	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	5 Unit/ Set	smd	1.030.974.133
1.02.26.28	Pengadaan Peralatan Non Medis	Kesesuaian peralatan non medis sesuai standar kebutuhan	100%	smd	1.340.000.000
1.02.26.29	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kendaraan	10 unit	smd	2.732.000.000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	90%		6.447.840.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan medis sesuai jadwal pemeliharaan	90%	smd	6.147.840.000
1.02.27.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Ketepatan waktu pemeliharaan sapras sesuai jadwal pemeliharaan	95%	smd	-
1.02.27.21	Pemeliharaan Peralatan Non Medis	Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan non medis sesuai jadwal pemeliharaan	90%	smd	300.000.000
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM	85%		188.484.000
1.02.56.05	Peningkatan Keterampilan SDM	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan 20 jam per tahun	70%	smd	188.484.000
1.02.10.2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pasien	85%		100.000.000
1.02.10.2.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dalam 1 tahun	2 Kali	smd	100.000.000
1.02.10.4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit	80%		5.678.969.398
1.02.10.4.05	Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM	Persentase pencapaian SPM 22 Pelayanan Untuk Mencapai Target Indikator	84%	smd	5.678.969.398

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.10 5	Program Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan mutu luaran peserta didik (peningkatan IPK/Tahun)	03.02		80.400.000
1.02.10 5.01	Pendidikan dan Penelitian di RS. Pendidikan	Jumlah Program Studi yang terlibat dalam proses pembelajaran secara Interprofessional education (IPE)	3 Jenis Program studi	smd	80.400.000
		Tersedianya best practice dan model interprofesional education	15%		
		Tersedianya Modul IPE	2 Modul		
1.02.10 6	Program Peningkatan Tata Kelola RS. dan Tata Kelola Klinis	Pencapaian indikator kinerja utama RS	84%		580.080.000
1.02.10 6.01	Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai hasil penilaian kinerja BLUD	75%	smd	342.362.500
1.02.10 6.02	Pelaksanaan Peningkatan Tata Kelola Klinis	Penerapan clinical pathway & panduan praktik klinis	70%	smd	237.717.500
1.02.10 7	Program Tata Kelola Keuangan	Cost recovery	78%		80.072.500
1.02.10 7.01	Pelaksanaan Kegiatan Keuangan	Nilai Rasio Keuangan (0-19)	11 Nilai	smd	80.072.500
		Nilai kepatuhan pengelolaan BLUD (0-11)	6 Nilai		
1.02.02. 02	RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda (BLUD)				486.024.475.005
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit	100%		486.024.475.005
1.02.47. 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan	3 Jenis belanja BLUD	smd	486.024.475.005
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				332.977.380.800
1.02.03. 01	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				91.758.826.967
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	79%		532.200.000
1.02.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bpn	532.200.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	85 unit		2.012.900.000
1.02.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan , Kelengkapan sarana dan prasarana yang dipenuhi	200 unit / stell	bpn	2.012.900.000
1.02.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah perlengkapan dan peralatan RS yang terpelihara secara rutin dan berkala	130 unit / set	bpn	-
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%		-
1.02.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegaitan Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	300 Orang	psr, smd, luarPrv	-
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	90 Orang		
1.02.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/Bimtek	550 orang	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	-
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72.5 %		200.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	bpn	-
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Yang ditindak lanjuti	0 Dokumen	bpn	200.000.000
		Jumlah laporan capaian kinerja	4 Laporan		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	100%		-
1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Akreditasi Rumah Sakit SNARS Versi 1	1 Sertifikat	bpn	-
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit	80%		78.615.534.967
1.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Pembangunan Gedung	2 Gedung	bpn	17.516.900.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat Kesehatan	30 Unit/Set	bpn	44.054.200.000
1.02.26.24	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Alat Kesehatan	85 Unit/Set	bpn	17.044.434.967
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar	90%		-
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Peralatan Kesehatan yang dilakukan peliharaan.	300 Unit	bpn	-
1.02.27.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah perlengkapan dan peralatan RS yang terpelihara secara rutin dan berkala	0 unit / set	bpn	-
		Jumlah infrastruktur RS yang terpelihara sarana rutin dan berkala	2 Gedung		
1.02.27.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit			bpn	-
1.02.10.4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	85%		10.398.192.000
1.02.10.4.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah Pasien dengan kasus Khusus / KDRT	15 Orang	bpn	10.398.192.000
1.02.03.02	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				241.218.553.833
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B	19 Instalasi / unit		241.218.553.833
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Kunjungan Pasien	183659 Orang	bpn	241.218.553.833
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				42.429.793.333
1.02.04.01	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				21.228.557.122
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Admininstrasi Perkantoran	100%		12.129.291.762
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Admininstrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	12.129.291.762
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana Aparatur	100%		315.945.393
1.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan penunjang pelayanan	8 Jenis	smd	217.446.393
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	98.499.000
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	81%		319.805.596

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek Kompetensi	150 Orang	smd	319.805.596
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	71%		245.000.000
1.02.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen	smd	245.000.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan standar Pelayanan Keperawatan	75%		10.325.000
1.02.16. 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Kegiatan Terapi Keperawatan Keluarga	100 Kegiatan	smd	10.325.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Indikator Keselamatan Pasien	60%		160.000.000
1.02.23. 08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5 Kegiatan	smd	160.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar	75%		2.970.963.900
1.02.26. 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	5 Jenis	smd	62.800.000
1.02.26. 19	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK) yang diadakan	2 Jenis	smd	1.032.970.900
1.02.26. 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah jenis Pengadaan logistik Pasien	2 jenis	smd	201.250.000
1.02.26. 25	Pengadaan Meubeler Rumah Sakit	Jumlah mebeler rumah sakit yang diadakan	4 Jenis	smd	404.650.000
1.02.26. 26	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	5 Jenis	smd	1.269.293.000
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Rumah Sakit yang memiliki sarana/prasarana penunjang sesuai standart	90%		785.163.016
1.02.27. 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Jenis Alat Kesehatan RS yang Terpelihara Dengan Baik	9 Jenis	smd	286.400.000
1.02.27. 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dipelihara dengan baik	1 Instalasi	smd	285.091.450
1.02.27. 20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	Jumlah Perlengkapan Rumah Sakit Yang terpelihara	2 Jenis	smd	213.671.566
1.02.61	Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit	Persentase teknologi/aplikasi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	75%		729.905.000
1.02.61. 61	Pengembangan SIM-RS	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi RS	27 aplikasi	smd	729.905.000
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Piutang rumah sakit yang telah terbayarkan	180000000 Rupiah		73.981.400
1.02.62. 62	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah laporan / Dokumen koordinasi dengan kab/kota	43 Laporan	smd	73.981.400
1.02.63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku	100%		192.100.000
1.02.63. 12	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Jenis pakaian kerja lapangan yang diadakan	8 Jenis	smd	192.100.000
1.02.63. 63	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Jenis pakaian dinas yang diadakan	3 Jenis	smd	-
1.02.10 4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase Capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit	85%		3.296.076.055

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.02.10 4.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah fasilitas/bangunan/sarana pelayanan yang diadakan/terpelihara sesuai SPM	2 Gedung/fasilitas	smd	3.296.076.055
1.02.04. 02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)				21.201.236.211
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat`	95%		21.201.236.211
1.02.47. 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 Bulan	smd	21.201.236.211
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.098.578.132.110
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1.098.578.132.110
1.03.01. 01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				930.804.095.467
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%		15.928.224.720
1.03.04. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	15.928.224.720
		Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%		
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	7 unit		9.254.247.653
1.03.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	16 Unit	smd	6.173.308.450
1.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur	0%	smd	3.080.939.203
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan		
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi	100 m2		
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		2.063.700.000
1.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur	0%	smd	1.534.500.000
		Jumlah pelaksanaan koordinasi luar dan dalam daerah	12 Bulan		
1.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	0%	smd	529.200.000
		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	40 Orang		
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	79%		1.084.128.000
1.03.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	smd	398.850.000
1.03.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	smd	685.278.000
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi	58.88 %		415.144.181.064
1.03.15. 01	Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan	25 Dokumen	smd	45.080.339.030
1.03.15. 02	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	36 Km	bru, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, smd	319.967.232.034

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.15. 03	Pembangunan Jembatan, Pembangunan Turap/Talut/Bronjong dan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Jembatan yang terbangun	11 Buah	kkr, mah	50.096.610.000
		Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang Dibangun	1 Buah		
		Panjang saluran drainase yang dibangun	1500 Meter		
1.03.15. 04	Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang Jalan yang Dibangun	9.8 Km	bru, ppu	-
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku	8322 L/detik		134.497.511.591
1.03.16. 01	Pembangunan Prasarana Air Baku, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	0.019 Kilometer	kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	96.686.726.919
		Jumlah lokasi banjir yang ditangani	2 lokasi		
		Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun	0 Unit		
1.03.16. 02	Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	12 Kilometer	bru, kkr	12.350.764.795
1.03.16. 03	Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Prasarana SDA yang direncanakan	9 Unit	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	21.276.580.877
		Jumlah Peraturan Gubernur yang Ditetapkan	0 Pergub		
		Jumlah Pembangunan Prasarana SDA yang Diawasi	1 Unit		
1.03.16. 04	Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	Luar Daerah Irigasi Yang Terbangun	0 Hektar	kkr	4.183.439.000
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan	66.12 %		279.396.464.711
1.03.17. 01	Pembangunan dan Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung yang dibangun/direhabilitasi	29 Bangunan Gedung	kkr, ppu, bpn, smd, luarPrv	232.921.940.166
1.03.17. 02	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah SPAM (unit)	4 Unit	ktm, bpn, btg, smd	24.239.433.044
1.03.17. 03	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Jumlah Gedung yang disusun perencanaannya (unit)	27 Unit	kkr, ktm, ppu, bpn, smd, luarPrv	22.235.091.501
		Jumlah SPAM, IPAL, IPLT dan TPA yang disusun Perencanannya (unit)	4 Unit		
		Jumlah Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan pengawasan (unit)	33 Unit		
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	24066 Orang		3.023.812.500
1.03.18. 01	Penyelenggaraan Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah Perda dan Pergub pengaturan jasa konstruksi	1 Perda/Pergub	smd	1.037.475.000
		Jumlah Peraturan/Pedoman Jasa Konstruksi	5 Dokumen		
		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Jasa Konstruksi	220 Orang		
1.03.18. 02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi	270 Orang	smd	1.568.337.500

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Peserta Pelatihan MTU di Kab/Kota	0 Orang		
		Jumlah Kegiatan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 Laporan		
1.03.18.03	Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	8 Paket	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	418.000.000
		Jumlah Kegiatan Pengawasan tertib Usaha Jasa Konstruksi	14 Lokasi		
		jumlah kegiatan pengawasan tertib pemanfaatan dan kinerja	0%		
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	75.34 %		6.244.194.596
1.03.70.01	Perencanaan Penataan Ruang	Prosentase Jumlah RRTR KSP yang mendapat Persetujuan Substansi	7%	smd	1.935.613.500
1.03.70.02	Pemanfaatan Ruang & Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi pemanfaatan ruang	2 Kabupaten/Kota	smd	1.655.530.596
1.03.70.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi pada Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang	150 Lokasi	smd	2.653.050.500
		Operasionalisasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 Kegiatan		
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	41722 unit		64.167.630.631
1.04.15.01	Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU (unit)	4 Unit	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	48.153.313.200
		Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	600 unit		
1.04.15.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang ditangani	7 ha	kkr, bpn, btg, smd	10.000.542.431
1.04.15.03	Perencanaan & pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang direncanakan	13 unit	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	6.013.775.000
		Jumlah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pengawasan	19 unit		
1.03.01.02	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I				58.395.784.103
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%		2.736.877.920
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bpn	2.736.877.920
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		2.962.775.446
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	bpn	1.350.025.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	1.612.750.446

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		733.300.000
1.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	bpn	552.500.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	100 Kegiatan		
1.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	25 Orang	bpn	180.800.000
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah I	59%		51.962.830.737
1.03.19. 01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	6 Buah	bpn	43.435.766.752
		Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan	214 KM		
1.03.19. 02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah I	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara	40 Ha	bpn	8.527.063.986
1.03.01. 03	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II				66.209.556.380
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%		3.513.902.640
1.03.04. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	3.513.902.640
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		6.532.169.358
1.03.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	30 Unit	smd	5.203.490.000
1.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	1.328.679.358
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi	1100 m2		
		Jumlah gedung yang dibangun/direhabilitasi	1 Unit		
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		570.000.000
1.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50 Kegiatan	kkr, smd, luarPrv	495.000.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	150 Kegiatan		
		Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	1000 Porsi		
1.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi dan kursus-kursus singkat	20 Orang	bpn, smd, luarPrv	75.000.000
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah II	58%		55.593.484.382
1.03.20. 01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	6 Buah	kbr, kkr, mah, smd	47.635.966.072
		Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan	7 KM		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.03.20.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah II	Luas daerah irigasi yang dipelihara	16 Hektar	kkr, smd	7.957.518.310
		Jumlah bangunan pengendali banjir yang dipelihara efektif	1 Lokasi		
1.03.01.04	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III				43.168.696.160
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86%		3.379.311.160
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bru, ktm	3.379.311.160
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		3.448.683.900
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	6 Unit	bru, ktm	2.015.300.600
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru, ktm	1.433.383.300
		Luas bangunan yang dipelihara	1301 M2		
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		763.041.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kegiatan	bru, ktm, luarPrv	566.125.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	113 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	10 Bulan		
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	8 Orang	smd, luarPrv	196.916.000
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah III	58%		35.577.660.100
1.03.21.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	Panjang jalan yang dipelihara Fungsional UPTD Wilayah III	405 KM	bru, ktm	26.610.205.100
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif	20 Buah		
1.03.21.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana & prasarana SDA & CK Wilayah III	Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terpelihara	13597 Ha	bru, ktm	8.967.455.000
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				21.165.091.600
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				7.306.587.540
1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)				7.306.587.540
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		4.934.518.200
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	4.934.518.200
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		456.782.440
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	smd	648.432.440
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	31 unit	smd	(191.650.000)
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	40%		461.265.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28 kegiatan	bpn, smd, luarPrv	452.165.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
1.05.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10 Kegiatan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	9.100.000
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	78.5 %		158.498.000
1.05.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran	4 dokumen	bpn, smd	88.041.000
1.05.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	23 dokumen	bpn, smd, luarPrv	70.457.000
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	85%		294.797.500
1.05.60. 02	Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan produk Hukum daerah	Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pembinaan Perda dan Perkada	5 dokumen	smd	160.335.000
		Koordinasi pelaksanaan dan kerjasama pengawasan Perda dan Perkada	5 dokumen		
		Penyuluhan Pelanggaran Perda dan perkada	10 dokumen		
1.05.60. 04	Penyelenggaran Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Fasilitasi PPNS se Kaltim	5 dokumen	smd	134.462.500
		Rapat Koordinasi teknis PPNS	2 dokumen		
		Deteksi Dini pelanggaran perda dan perkada se kaltim	10 dokumen		
		Pendampingan dan pelaksanaan penegakan perda provinsi kabupaten Kota se Kaltim	10 dokumen		
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketentraman Umum dan Ketertiban masyarakat	Percentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawalan dan Patroli	83%		381.852.000
1.05.63. 01	Peningkatan Pelaksanaan Operasional dan Pengendalian	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	279 kegiatan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	263.777.000
1.05.63. 02	Peningkatan Pengamanan dan Pengawalan Protokoler	Jumlah kegiatan pengawalan dan pengamanan protokoler	93 kegiatan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	118.075.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	kapasitas satlinmas daerah	83 persen		246.974.000
1.05.64.01	Pelaksanaan Bina Potensi masyarakat	pendataan satlinmas Se Kaltim	10 dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	100.500.000
		FGD Kelembagaan Satlinmas	1 dokumen		
		Bimtek Satlinmas Se Kaltim	2 dokumen		
1.05.64.02	Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat	Perbantuan penanganan bencana musibah di daerah	10 dokumen	smd	146.474.000
1.05.65	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat tanggap darurat bencana kebakaran	70%		371.900.400
1.05.65.01	Pencegahan dan Pengendalian Bidang Kebakaran	Kordinasi dan fasilitasi pencegahan kebakaran se Kaltim	10 dokumen	smd	264.800.400
		Pelaksanaan, pengendalian dan Pencegahan kebakaran	24 dokumen		
		Pemetaan daerah rawan kebakaran dan pendataan sistem proteksi kebakaran se kaltim	10 dokumen		
1.05.65.02	Pelatihan dan pembinaan bidang kebakaran	Pelatihan petugas pemadam kebakaran se kaltim	2 dokumen	smd	107.100.000
		Pembinaan Petugas Pemadam Kebakaran dan masyarakat se kaltim	4 dokumen		
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				5.953.510.700
1.05.02.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				5.953.510.700
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%		413.498.400
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	413.498.400
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		487.350.000
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	97.950.000
1.05.08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan ASN Kesbangpol Prov. Kaltim	50%	smd	389.400.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		470.550.000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Dearah	12 Bulan	smd	418.750.000
1.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur Kesbangpol	50 Orang	smd	51.800.000
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58%		393.405.000
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran	10 Dokumen	smd	193.405.000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Laporan	6 Dokumen	smd	200.000.000
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	102 Konflik		984.350.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.15.01	Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	smd	381.822.313
1.05.15.05	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Sinergitas dan kebersamaan yang harmonis antara aparat keamanan dan pemerintah serta masyarakat	22 Rencana Aksi	smd	316.929.587
1.05.15.29	Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi Perundang-Udangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	Meningkatnya SDM Aparatur dalam upaya maksimalisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman	150 Orang	smd	140.765.600
1.05.15.34	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen	Tenaga terlatih dan Profesional	30 Orang	smd	144.832.500
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%)	5%		852.348.300
1.05.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya Kesadaran Bela Negara	600 Orang	smd	335.924.250
1.05.17.08	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Meningkatnya pemahaman Wawasan kebangsaan	3200 Orang	smd	516.424.050
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	74.5 %		1.203.144.000
1.05.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dalam menjaga kondusifitas di Daerah	500 Orang	smd	471.728.200
		Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dalam menjaga kondusifitas di Daerah	4 Dokumen		
1.05.21.22	Penyusunan IDI	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Tim Pokja IDI	100 Orang	smd	421.797.000
1.05.21.23	Penyusunan data base partai politik	Terlaksananya Kegiatan dan Tersusunnya Dokumen Parpol	100 Orang	smd	226.434.000
1.05.21.24	Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Partai Politik	Terlaksananya Kegiatan dan Verifikasi Berkas Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	100 Orang	smd	83.184.800
1.05.21.25	Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara	100 Orang	smd	-
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	120 Ormas		1.148.865.000
1.05.62.01	Peningkatan Kapasitas Ormas	Jumlah SKT/SKM diterbitkan	30 SKT	smd	336.555.000
1.05.62.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	100 Orang	smd	318.955.000
		Jumlah pembinaan terhadap ormas	30 Ormas		
1.05.62.03	Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Data Ekonomi, dan Sosbud di 10 Kab/Kota	4 Dokumen	smd	358.370.000
1.05.62.09	Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	Terlaksananya Kegiatan Forum Diskusi Aktual Agama dan Kepercayaan	100 Orang	smd	134.985.000
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				7.904.993.360
1.05.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				7.904.993.360
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		2.427.665.070

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.427.665.070
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit		430.407.500
1.05.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	367.807.500
1.05.08. 03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah barang peningkatan sarana dan prasarana peralatan kantor	18 unit	smd	62.600.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	17.39 %		332.893.800
1.05.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	16 Kegiatan	smd, luarPrv	300.093.800
		Jumlah Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	48 Kegiatan		
		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
1.05.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/bimtek	40 orang	smd	32.800.000
		Jumlah Seragam PNS	0 orang		
		Jumlah Seragam Tenaga Teknis/ Non Teknis	0 orang		
		Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	53 stel		
		Jumlah Pakaian Olahraga	0 Stel		
		Jumlah Pakaian Seragam Tertentu	0 Stel		
		Jumlah Pakaian Seragam Lengkap Satpam	12 Stel		
		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	0 Stel		
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai		241.781.951
1.05.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd, luarPrv	43.231.951
1.05.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	120 Orang	bpn, smd, luarPrv	198.550.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen		
		Jumlah BPBD yang dilakukan Penilaian	10 Kabupaten/Kota		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10 Kabupaten/Kota		
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Percentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	85 Persen		4.008.111.345
1.05.49. 13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana	17 kali	bpn, smd	3.639.374.345
		Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana	2 Laporan		
		Jumlah operasi penangan kejadian bencana	20 kali		
1.05.49. 14	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana yang Tersedia	75 Unit	smd, luarPrv	259.835.000
		Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana	70 Orang		
		Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	120 Orang		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah logistik penanggulangan bencana	100 barang		
1.05.49. 15	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Peringatan Bulan PRB	10 Orang	bpn, smd	4.500.000
		Jumlah peserta pelatihan SAR	30 Orang		
		Jumlah peserta pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30 Orang		
1.05.49. 16	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah Pendataan, Kaji Cepat PB dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	10 Kab/Kota	kbr, ktm, ppu, bpn, smd, luarPrv	104.402.000
		Jumlah Laporan Kegiatan Pusdalops PB	12 Laporan		
		Jumlah laporan pemantauan titik panas	12 Laporan		
		Jumlah laporan pemantauan early warning system	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Kejadian Kebencanaan	12 Laporan		
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini bencana	8 Desa / Kelurahan		205.704.794
1.05.51. 03	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)	60 Orang	smd	13.227.155
		Jumlah peserta Bimtek Relawan Penanggulangan Bencana	0 Orang		
		Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	240 Orang		
		Jumlah peserta penyegaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana	30 Orang		
		Jumlah peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh Bencana	180 Orang		
		Jumlah dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana	6 Dokumen		
		Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	8 Dokumen		
		Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana	240 Orang		
		Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana	210 Orang		
		Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	120 Orang		
		Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana	6 Peta		
		Jumlah Rambu-rambu Destana	90 Buah		
		Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana	1 Laporan		
		Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional	15 Orang		
1.05.51. 04	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Jumlah Peta Rawan Bencana	0 Peta	smd	14.082.500
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana	1 Dokumen		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)/review	1 Dokumen		
1.05.51. 16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	10 Kabupaten/Kota	smd, luarPrv	98.532.139
		Jumlah dokumen Kajian Teknis Bencana	1 Dokumen		
		Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS)	3 Unit		
		Jumlah pemantauan peralatan Peringatan Dini (EWS)	9 Unit		
		Jumlah dokumen SOP peringatan dini/review	1 Dokumen		
		Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan	3 Media		
		Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	0 Aplikasi		
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	0 Orang		
		Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	0 Orang		
1.05.51. 17	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan	Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	100 Orang	smd, luarPrv	79.863.000
		Jumlah peserta Jambore Relawan Bencana	500 Orang		
		Jumlah peserta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional	250 Orang		
		Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		
		Jumlah dokumen review Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Apel Siaga	500 Orang		
		Jumlah lokasi pemasangan Peta dan Rambu Bencana	1 Kab/Kota		
		Jumlah Kab/kota yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	10 Kab/Kota		
		Jumlah Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	26 Orang		
		Jumlah dokumen Profil Kesiapsiagaan	0 Dokumen		
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Percentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	40 Persen		258.428.900
1.05.55. 01	Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi (bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	30 orang	bpn, luarPrv	60.488.900
		Jumlah Peserta Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	30 Orang		
		Jumlah Laporan Sosialisasi (Bimtek JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1 Laporan		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Laporan Kegiatan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1 Laporan		
1.05.55.02	Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	30 orang	ppu, luarPrv	-
		Jumlah Peserta Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	35 orang		
		Jumlah Peserta Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi	30 orang		
		Jumlah Dokumen Rapat Pembentukan TIM JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1 dokumen		
		Jumlah Dokumen Workshop JITUPASNA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Rakornis Penyusunan JITUPASNA dan Rencana Aksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1 Dokumen		
1.05.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Kab/Kota Yang Dilaksanakan Pendampingan/Supervisi Kajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10 Kab/Kota	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	77.060.000
		Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan Paku Seng Kepada Masyarakat Pascabencana	1500 Lembar		
		Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	10 Laporan		
1.05.55.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	120.880.000
		Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	10 Kab/Kota		
1.06	Sosial				23.381.387.860
1.06.01	Dinas Sosial				23.381.387.860
1.06.01.01	Dinas Sosial				9.071.887.580
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran	60 bulan		3.018.634.880
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	3.018.634.880
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial	60 bulan		1.216.148.000
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	21 Unit	smd	300.500.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.06.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	smd	915.648.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	60 bulan		1.387.575.900
1.06.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	12 Bulan	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	1.152.600.000
1.06.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	50 Orang	bpm	234.975.900
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	55 Dokumen		371.150.000
1.06.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Disusun	7 Dokumen	bru, smd	286.100.000
1.06.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas	6 Laporan	bru, smd	85.050.000
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	1000 Orang		109.800.000
1.06.17. 03	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar Luar Panti yang mendapatkan bantuan sosial	200 Orang	smd	109.800.000
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	435 Orang		670.500.000
1.06.18. 03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelayanan	250 Orang	bpm, smd	670.500.000
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	190 Orang		183.750.000
1.06.20. 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan	38 Orang	bpm, smd	183.750.000
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	20 Lembaga		245.885.200
		Menguatnya kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan keberfungsiannya	5 Lembaga		
1.06.21. 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	4 Lembaga	smd	98.570.000
1.06.21. 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilaksanakan	3 Kegiatan	bru, kkr	147.315.200
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	11710 Orang		1.070.563.800
1.06.23. 01	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah WRSE dan KUBE yang diberdayakan	2040 Orang	btg	664.420.000
1.06.23. 02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	0 KPM	smd	199.068.800

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial	75 KPM		
1.06.23.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	0 Orang	kbr, smd	207.075.000
		Jumlah Lansia luar panti yang mendapat pelayanan	270 Orang		
1.06.24	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya	0 Orang		698.170.000
		Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2000 Orang		
1.06.24.01	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Permakanan Orang Terlantar	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	1518 Kegiatan	kkr	698.170.000
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	5 unit		99.709.800
1.06.25.01	Pengadaan Sarana dan Prasaran Bagi Keluarga Miskin	Jumlah MCK bagi keluarga miskin KAT yang dibangun	1 unit	bru	99.709.800
1.06.01.02	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri				4.582.447.960
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.083.254.960
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	1.083.254.960
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				242.398.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	0 bulan	smd	242.398.000
		Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	4 Unit		
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				97.000.000
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	0 Bulan	smd	97.000.000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				3.159.795.000
1.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	3 Panti	smd	3.159.795.000
1.06.01.03	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma				3.484.287.840
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.026.857.840
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	1.026.857.840
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				666.776.800
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	100 Unit	smd	545.226.800
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	0 bulan	smd	121.550.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	5 Unit		
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				85.000.000
1.06.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	12 Bulan	smd	85.000.000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				1.705.653.200
1.06.19. 03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	80 Panti	smd	1.657.903.200
1.06.19. 04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80 Panti	smd	47.750.000
1.06.01. 04	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan				3.456.850.200
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran	60 bulan		1.012.569.380
1.06.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	1.012.569.380
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial	0 bulan		553.329.000
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit		
1.06.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	0 bulan	smd	225.900.000
		Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	5 Unit		
1.06.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	smd	327.429.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	60 bulan		87.500.000
		Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	0%		
1.06.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	12 Bulan	bru	87.500.000
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	5 Panti		1.803.451.820
1.06.19. 03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	1 Panti	smd	1.794.451.820
1.06.19. 04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Panti	smd	9.000.000
1.06.01. 05	UPTD Panti Sosial Bina Remaja				2.455.365.620
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran	0 bulan		1.075.157.620
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%		
1.06.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	1.075.157.620
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	0 Bulan		518.800.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit		
1.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	smd	274.700.000
		Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	0 Unit		
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan peralatan dan kelengkapan kantor yang dipelihara	0 bulan	smd	244.100.000
		Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor	5 Unit		
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	0 bulan		100.500.000
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%		
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	0 Bulan	smd	100.500.000
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti		760.908.000
		Persentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani	95%		
1.06.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	0 Orang	kbr, psr, smd	760.908.000
1.06.01.06	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia				330.548.660
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		188.309.320
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	188.309.320
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial	12 bulan		42.788.000
1.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	10 unit	smd	42.788.000
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 bulan		50.000.000
1.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi baik didalam dan keluar daerah	12 Bulan	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	50.000.000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	150 Orang		49.451.340
1.06.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	1 Panti	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	49.451.340
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				205.566.866.179
2.01	Tenaga Kerja				27.531.959.280

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				27.531.959.280
2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				18.056.887.040
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Administrasi Perkantoran	0%		3.716.477.040
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88%		
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	3.716.477.040
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	0%		1.632.700.000
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan da Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor	100 unit	smd	918.400.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasaran Kantor	12 Bulan	smd	714.300.000
		Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	0 Bulan		
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	0%		1.487.000.000
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50 Kegiatan	smd	1.353.800.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	65 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10 Orang	smd	133.200.000
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	0%		1.093.675.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%		
2.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	399.575.000
2.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	694.100.000
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasaran kerja	75%		3.249.075.000
2.01.15.01	pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya	500 Orang	smd	1.950.130.000
2.01.15.02	Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	smd	-
2.01.15.03	peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan	Jumlah Instruktur yang Dilatih	0 Orang	smd	479.545.000
		Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	1 Kimtrans		
2.01.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi	15 LSP	smd	819.400.000
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase Penempatan Tenaga Kerja	31%		1.991.365.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.01.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Informasi bursa Tenaga Kerja	2 Dokumen	smd	464.625.000
2.01.16.05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih Berwirausaha	0 Orang	smd	521.625.000
		Jumlah Laporan Pencari Kerja yang Dilatih Kewirausahaan	1 Dokumen		
2.01.16.06	Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah lokasi yang memiliki potensi daerah	2 Lokasi	smd	69.525.000
		Jumlah Laporan pencari kerja yang memiliki keterampilan	0 Dokumen		
2.01.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	Jumlah pencari kerja yang mendapat pekerjaan sementara	204 Orang	smd	935.590.000
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%		1.867.260.000
2.01.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Dibina	150 Perusahaan	smd	295.000.000
2.01.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen sesuai PP 78 Tahun 2015	3 Dokumen	smd	1.572.260.000
2.01.17.15	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industrial	Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial	50 Perusahaan	smd	-
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Keterampilan Berwirausaha	120 Orang		-
		Persentase Wirausaha Baru dan Pencari Kerja	30%		
2.01.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih Berwirausaha	120 Orang	smd	-
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang dibina dan diawasi	250 Perusahaan		2.178.635.000
2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Riksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1056 Objek	smd	755.000.000
2.01.27.08	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah Perusahaan yan di Periksa dan dibina	0 Perusahaan	smd	718.635.000
		Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi	3300 Perusahaan		
2.01.27.09	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	36 Perusahaan	smd	705.000.000
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya	80%		-
2.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah yang Dilatih Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	160 Orang	smd	-
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Meningkatnya Lulusan Pelatihan yang di Tempatkan	80%		-
		Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya	0%		
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	4 Jurusan	smd	-
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja	160 Orang	smd	-
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	4 Kimtrans		840.700.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kesepakatan Bersama dengan provinsi lain	3 Dokumen	bru, kkr, ktm, mah, psr	160.200.000
3.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Tersedianya Lahan Transmigrasi	5 Dokumen	bru, ktm, psr, smd	335.500.000
3.08.15.11	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Disediakan Sarana dan Prasarana Sosial	3 Kimtrans	psr	200.000.000
3.08.15.12	Koordinasi Ketransmigrasian	Terciptanya Perencanaan dan Dokumen Usulan Program Transmigrasi se Kalimantan Timur	100 Orang	smd	70.000.000
3.08.15.14	Evaluasi Penyediaan Tanah Transmigrasi	Tersedianya Lahan Transmigrasi	3 Dokumen	smd	75.000.000
2.01.01.02	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan				5.370.660.200
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				685.399.200
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn	685.399.200
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.779.996.000
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan da Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor	12 unit	bpn	1.181.500.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasaran Kantor	12 Bulan	bpn	598.496.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				505.500.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	5 Kegiatan	bpn	230.500.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	2 Orang	bpn	275.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja				2.399.765.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	2 Jurusan	bpn	1.600.250.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	160 Orang	bpn	799.515.000
2.01.01.03	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				4.104.412.040
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				670.887.040
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	btg	670.887.040
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.036.475.000
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan da Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor	2 unit	bpn	420.025.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasaran Kantor	12 Bulan	btg	616.450.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				248.750.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2 Kegiatan	btg	196.750.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	5 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	2 Orang	bpn	52.000.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja				2.148.300.000
2.01.30.04	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	Jumlah Kejuruan yang Dipersiapkan Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	2 Jurusan	btg	1.002.000.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	160 Orang	btg	1.146.300.000
2.01.01.04	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan				-
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	-
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-
2.01.08.01	Penyediaan Peralatan da Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan Dan Kelengkapan Kantor	2 unit	smd	-
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Dan Kelengkapan Prasarana Kantor	12 Bulan	smd	-
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				-
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5 Kegiatan	smd	-
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	5 Kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan		
2.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	1 Orang	smd	-
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan				-
2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Riksa Uji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1056 Objek	smd	-
2.01.27.08	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah Perusahaan yan di Periksa dan dibina	3300 Perusahaan	smd	-
2.01.27.09	Peningkatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	36 Kasus	smd	-
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				9.551.912.520
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				9.551.912.520
2.02.01.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				9.551.912.520

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	100%		2.013.404.520
2.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	0 Tahun	smd	2.013.404.520
		Pelayanan Perkantoran	12 Bulan		
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial	100%		1.035.400.000
		Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1%		
2.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kantor	25 Sapras	smd	1.035.400.000
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%		330.000.000
		Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100%		
2.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	presentase capaian target kinerja	100%	smd	330.000.000
		capaian target kinerja	40 Trip		
2.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	diklat yang diikuti pegawai	0 diklat	smd	-
		Jumlah diklat yang diikuti pegawai	0 Diklat		
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	40%		315.800.000
		Unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100%		
2.02.10.01	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	laporan capaian kinerja	6 dokumen	smd, luarPrv	134.000.000
		Dokumen laporan capaian kinerja	0 Laporan		
2.02.10.02	Rakor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak	1 rekomendasi	ppu, smd, luarPrv	78.900.000
		Jumlah rekomendasi rakor pemberdayaan perempuan	0 Rekomendasi		
2.02.10.03	Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA	Persentase Kab/Kota menuju layak anak	50%	smd, luarPrv	102.900.000
		Jumlah dokumen bidang kependudukan, PP dan PA	1 Rekomendasi		
2.02.10.04	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang ekonomi	0 Orang	smd	-
		Jumlah pameran yang diikuti	0 Pameran		
2.02.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	0%		51.237.500
		Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP)	6%		
2.02.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha	84 orang	kbr, ppu, luarPrv	51.237.500
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	7%		61.312.500

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur	82%		
2.02.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	pemetaan hak anak di bidang pendidikan	50 dokumen	psr	61.312.500
		Jumlah anak yang mendapatkan KIE tentang hak sipil anak	50 Anak		
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memperoleh akses pelayanan administrasi kependudukan	0%		328.353.000
		Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	0%		
2.02.27.01	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Persentase penduduk yang mendapatkan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	0%	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	328.353.000
		Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak	99.1 Kebijakan		
2.02.35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0%		126.750.000
		Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	5%		
2.02.35.01	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase pelayanan perlindungan terpadu	0%	smd, luarPrv	126.750.000
		Jumlah usaha KK perempuan berbasis ICT	60 Usaha		
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	0%		539.162.500
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	40%		
2.02.36.01	Tumbuh Kembang Anak	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tumbuh kembang anak	80 Orang	kbr, mah	328.125.000
		Persentase Kab/Kota menuju layak anak	20%		
		Jumlah SDM terlatih konvensi hak anak	1100 SDM		
2.02.36.02	Perlindungan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan anak	50 Orang	kbr, mah	96.062.500
		Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak	1 Kebijakan		
		Jumlah perangkat daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana	10 Perangkat Daerah		
2.02.36.03	Perlindungan Perempuan	Jumlah profil perlindungan perempuan Kaltim	1 Profil	smd, luarPrv	114.975.000
		Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	2 Kebijakan		
		Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Perlindungan anak	40 orang/peserta		
		Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan	25 orang/peserta		
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	35%		400.260.000
		Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial	35%		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.02.38.01	Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	meningkatnya ketersediaan kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik	0 kebijakan	smd, luarPrv	141.150.000
		Jumlah kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	2 Kebijakan		
		Persentase perempuan dalam jabatan politik	2%		
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum	50 Orang		
		Jumlah profil pembangunan berbasis gender	1 Profil		
2.02.38.02	Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang sosial dan budaya	50 Orang	smd, luarPrv	139.500.000
		Jumlah program kegiatan berbasis PPRG	5 Program		
		Jumlah diklat yang diikuti pegawai	0 Diklat		
		Jumlah kebijakan PUG	1 Kebijakan		
2.02.38.03	Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha	100 orang	kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd	119.610.000
		Jumlah usaha KK perempuan berbasis ICT	25 Usaha		
		Jumlah forum koordinasi dan sinkronisasi kesetaraan gender bidang ekonomi	1 Forum		
		Jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang dibina	5 Desa Prima		
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang ekonomi	100 Orang		
2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	Rasio KDRT	0%		156.625.000
		Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	35%		
2.02.39.01	Data dan Informasi Gender	Jumlah profil pembangunan berbasis gender	50 Profil	smd, luarPrv	33.250.000
		Persentase data gender	25%		
		Jumlah pokja data pilah	15 Pokja		
2.02.39.02	Data dan Informasi Anak	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	30 Kebijakan	smd, luarPrv	75.500.000
		Jumlah data pilah anak dengan Perangkat Daerah terkait	15 Data Pilah		
		Persentase data anak	25%		
2.02.39.03	Informasi dan Partisipasi	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	smd, luarPrv	47.875.000
		Jumlah peserta rakortek SIGA	40 Orang		
		Kebijakan terkait pengembangan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	1 Kebijakan		
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga (LSM)	35%		362.962.500
2.08.23.01	Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengendalian penduduk	230 Orang	smd, luarPrv	145.250.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.08.23. 02	Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga	250 Orang	ppu, luarPrv	106.762.500
2.08.23. 03	Keluarga Berencana	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan keluarga berencana	200 Orang	kkr, smd	110.950.000
2.08.24	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Perentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	70%		3.830.645.000
2.08.24. 01	Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk	50 Orang	smd, luarPrv	3.653.150.000
2.08.24. 02	Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pencatatan sipil	50 Orang	smd, luarPrv	60.632.500
2.08.24. 03	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	5 Perangkat Daerah	smd, luarPrv	116.862.500
2.03	Pangan				39.044.521.460
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				39.044.521.460
2.03.01. 01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				21.436.160.780
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		2.582.464.600
2.03.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2.582.464.600
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		1.251.100.000
2.03.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	20 Unit	smd	603.450.000
2.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	647.650.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		809.925.000
2.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	5 Kegiatan	smd	759.925.000
2.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	25 Orang	smd	50.000.000
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66%		1.205.975.000
2.03.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 dokumen	smd	604.350.000
2.03.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd	601.625.000
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	416 Desa		2.380.500.000
2.03.25. 01	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan	4 Laporan	smd	1.010.050.000
2.03.25. 04	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan beras provinsi	325 Ton	smd	1.093.100.000
2.03.25. 07	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Informasi harga pangan yang tersedia	3 Laporan	smd	277.350.000
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.9 Skor		1.741.050.000
2.03.27. 01	Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan analisis PPH Konsumsi	1 Laporan	smd	217.150.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.03.27.02	Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan	9 Jenis	smd	710.275.000
2.03.27.03	Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Sertifikat	smd	813.625.000
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	240245 Ton		2.600.133.680
3.03.41.01	Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas tanaman hortikultura	21.81 Ton/Ha	smd	1.559.428.680
3.03.41.02	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura yang disertifikasi	6 Unit	smd	485.819.400
3.03.41.03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Hortikultura	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan	20 Kelompok Tani	smd	554.885.600
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Padi	262500 Ton		8.865.012.500
3.03.51.03	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas tanam padi	24000 Ha	smd	2.376.225.000
3.03.51.04	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Rata-rata percepatan penanganan pasca panen padi	9 Hari/Ha	smd	230.075.000
3.03.51.05	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Peningkatan indeks pertanaman	1.4 IP	smd	6.258.712.500
2.03.01.02	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				2.053.513.160
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		954.094.070
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	954.094.070
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		373.057.240
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	1 Unit	smd	128.530.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	244.527.240
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		268.327.500
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	smd	268.327.500
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	165 Ha		458.034.350
3.03.49.01	Sertifikasi Benih Unggul Pertanian	Jumlah sertifikat/label benih unggul	5000 Label	smd	308.190.000
3.03.49.03	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah rekomendasi produsen benih yang dikeluarkan	25 Rekomendasi	smd	149.844.350
2.03.01.03	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				2.668.996.980
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		1.334.842.480
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1.334.842.480

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		324.429.500
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1 Unit	smd	205.565.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	118.864.500
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		76.250.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	smd	76.250.000
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Serangan OPT	6139 Ha		933.475.000
3.03.48.02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT	24000 Ha	smd	232.425.000
3.03.48.03	Perbanyak Agens Hayati dan Petisida Ramah Lingkungan	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan dan dilayani	72 Unit	smd	66.250.000
3.03.48.04	Pembangunan/Perbaikan UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah UPTD yang mendapat Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	1 Unit	smd	634.800.000
2.03.01.04	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				5.592.610.040
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		1.559.017.040
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	kkr	1.559.017.040
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		1.610.473.000
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	1 Unit	kkr	1.413.050.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	kkr	197.423.000
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		190.000.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	kkr	190.000.000
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat	81%		2.233.120.000
3.03.46.01	Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang bersertifikat	30 Ton	kkr	386.300.000
3.03.46.03	Peningkatan Produksi Benih Hortikultura	Jumlah Produksi Benih dasar dan pokok tanaman hortikultura yang bersertifikat	5500 Batang	kkr	481.620.000
3.03.46.04	Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah UPTD yang mendapat Pembangunan/Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	1 Unit	kkr	1.365.200.000
2.03.01.05	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				7.293.240.500
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		1.328.292.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	1.328.292.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		648.860.700
2.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	1 Unit	smd	228.500.000
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	12 Unit	smd	420.360.700
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		272.500.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	1 Kegiatan	smd	272.500.000
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina	711 Desa		5.043.587.800
2.03.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Penyuluhan yang dibina	693 Orang	smd	4.309.212.800
2.03.15.03	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	150 Orang	smd	734.375.000
2.05	Lingkungan Hidup				13.176.498.240
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				13.176.498.240
2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup				13.176.498.240
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran	100 Percentase		4.165.458.240
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		
2.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	4.165.458.240
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		1.365.950.000
2.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	bru, kbr, kkr, ktm, smd	1.365.950.000
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		644.000.000
2.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 Kali	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	644.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	40 Kali		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
2.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang terlatih	20 orang	bru, smd	-
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	60 Nilai AKIP		595.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Rapat Koordinasi, Hari Lingkungan Hidup	6 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	268.000.000
2.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, Profil LH Sekaltim, SPM	5 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	327.000.000
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran	8 Indeks (Tercemar Sedang)		1.885.390.000
2.05.30.01	Pemantauan lingkungan	Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan	231 Frekuensi	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	1.113.090.000
2.05.30.02	Pengendalian pencemaran lingkungan	Penurunan beban pencemaran	10%	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	520.300.000
2.05.30.03	Pengendalian kerusakan lingkungan	Luas Kerusakan Lingkungan	7.317 Juta Ha	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	252.000.000
2.05.30.04	Pemantauan Air Sungai Mahakam (DAK)	Alat Pemantauan Kualitas Air Sungai Mahakam Metode Onlimo	1 Alat	smd	-
2.05.58	Program Penataan, Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase ketataan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%		1.113.250.000
2.05.58.01	Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	294.000.000
2.05.58.02	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Persentase pengawasan terhadap penanggungjawab dan/atau usaha kegiatan yang diberi izin	100%	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	262.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.05.58.03	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah lembaga/orang yang memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam penilaian lingkungan hidup	65 Lembaga	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	557.250.000
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	550 Kegiatan		2.512.700.000
2.05.59.01	Penyusunan, evaluasi dan pelaporan dokumen lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang d'integrasikan kebijakan pembangunan daerah	100%	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	1.475.000.000
2.05.59.02	Koordinasi penyusunan dan penilaian kajian dampak lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang dinilai/diperiksa	100%	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	373.500.000
2.05.59.03	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Jumlah Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di integrasikan dengan dokumen RAD GRK	82.61 %	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	664.200.000
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Percentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	12%		894.750.000
2.05.60.01	Pengelolaan sampah	Persentase timbulan sampah yang dikelola	62%	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	332.800.000
2.05.60.02	Pengelolaan limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan	11000 Ton	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	281.700.000
2.05.60.03	Pengembangan fasilitas teknis dan penerapan teknologi ramah lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan teknologi pengelolaan sampah	2 Kab/Kota	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	280.250.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				7.737.820.280
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				7.737.820.280
2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				7.737.820.280

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	75%		2.277.039.580
2.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2.277.039.580
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		760.682.560
2.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	760.682.560
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Presentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	40%		701.250.000
2.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 Kegiatan	smd	701.250.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67%		220.103.788
2.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	ktm, bpn, smd	169.103.788
2.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen	smd	51.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa		546.830.840
2.07.15.01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina	5 Kabupaten/Kota	kkr, ppu, bpn, btg, smd	209.895.227
		Jumlah PKK yang dibina	5 Kabupaten/Kota		
		Jumlah LPM yang dibina	4 Kota		
		Jumlah Lembaga Adat yang dibina	3 Kabupaten		
		Jumlah Posyandu yang dibina	3 Posyandu		
		Laporan Rapat Koordinasi Kelembagaan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
		Laporan Rapat Koordinasi Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	0 Laporan		
		Laporan Blmbingan Teknis Sistem Informasi Posyandu (SIP)	0 Laporan		
2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal	70%	psr, ppu, smd	59.000.000
2.07.15.08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang dilatih dan dbina	150 Orang	kbr, kkr, mah, smd	183.392.727
2.07.15.09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dibina	1 MHA	smd	94.542.886
		Laporan Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV-AIDS Tingkat Provinsi Kalimantan TImur	0 Laporan		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laporan Rapat Koordinasi PMT-AS Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	0 Laporan		
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDes yang Aktif	360 BUMDes		233.477.200
2.07.16.01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdes yang Terbentuk	0 unit	smd	233.477.200
		Jumlah BUMDesa yang aktif	25 Unit		
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80%		30.000.000
2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Monev	80%	ktm	30.000.000
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen		276.350.000
2.07.21.01	Sinkronisasi dan penyerasan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	1 Kali	bru	276.350.000
		Jumlah kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/ Kota		
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	18 Unit		155.646.700
2.07.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang Memiliki Daya Saing Pasar	0 Posyantek	smd	85.716.700
		jumlah posyantek yang aktif	20 unit		
2.07.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	Jumlah Alat TTG untuk Pengolahan Air Bersih	0 Unit	smd	69.930.000
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang melaksanakan Konservasi lingkungan/Perdesaan/Kecamatan	0 Pokmas		
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan	165 PKK		1.060.500.000
2.07.26.01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan	Jumlah TP.PKK yang dibina	65 Orang	smd	720.750.000
2.07.26.02	Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	Kader PKK yang dilatih	75 Orang	smd	32.100.000
2.07.26.03	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang bina	80 Orang	smd	290.500.000
2.07.26.04	Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Kader PKK dan Masyarakat yang dibina	100 Orang	smd	17.150.000
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat pemanfaat TTG dalam rangka penanggulangan kemiskinan	10 Unit		2.000.000
2.07.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Posyantek Percontohan yang Dibina	0 Posyantek	smd	2.000.000
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memperoleh Pembinaan	80%		993.263.025

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	363 Desa		
2.07.28.01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kepala Desa yang berhasil dilatih	0 Orang	smd	690.000.000
		Jumlah Anggota BPD yang berhasil dilatih	0 Orang		
		Data aparatur Desa/kelurahan dan badan Permusyawarahan Desa yang belum dilakukan peningkatan Kapasitas	10 Kabupaten/Kota		
2.07.28.02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan Pengelola Keuangan Desa	7 Kabupaten	bru, kbr, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	144.371.525
2.07.28.03	Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa dan Kelurahan di Kab/Kota se Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi	10 Kabupaten/Kota	smd	158.891.500
		Desa dan Kelurahan di Kab/Kota se Kaltim yang mengikuti Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	10 Kabupaten/Kota		
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang	329 Desa		299.576.587
2.07.29.01	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten yang dibina	7 Kabupaten	bru, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	118.451.787
		Pendamping Desa yang dibina	90 Orang		
2.07.29.02	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	1 Laporan	bru, smd	100.136.400
2.07.29.03	Penguatan Informasi Pembangunan	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	1 kali	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	80.988.400
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Jumlah Kampung/Desa Iklim	40 Desa		181.100.000
2.07.30.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa / Village Low Emission Development / VLED	Jumlah Kampung/Desa/Kelurahan iklim	20 Kampung/Desa/Kelurahan	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	181.100.000
2.09	Perhubungan				22.808.672.143
2.09.01	Dinas Perhubungan				22.808.672.143
2.09.01.01	Dinas Perhubungan				20.464.226.603
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%		6.458.961.953
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	6.458.961.953
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit		2.609.490.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik	85%	smd	1.651.640.000
2.09.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Taman, Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional & Jabatan	85%	smd	957.850.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	30%		1.894.725.000
2.09.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi	100%	smd, luarPrv	1.620.875.000
2.09.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualifikasi SDM Perhubungan	30%	bpn, luarPrv	273.850.000
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	71%		1.406.785.000
2.09.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya Renja, RKA, DPA	5 Dokumen	ktm, psr, bpn, btg, smd, luarPrv	1.201.035.000
2.09.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan	20 Dokumen	smd	205.750.000
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	615 Kasus		6.151.288.050
2.09.15. 01	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan	120 km	kkr, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	5.607.013.050
2.09.15. 02	Pembinaaan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina	24 Badan Usaha	smd, luarPrv	271.800.000
2.09.15. 03	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi	10%	bpn, btg, smd, luarPrv	272.475.000
2.09.15. 04	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan (DAK)	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan	120 km	smd	-
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	83 Unit/%		685.205.000
2.09.16. 01	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	Jumlah dan Progres Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas yang dibangun	1 (Unit/%)	kbr, ktm, bpn, smd, luarPrv	149.780.000
2.09.16. 02	Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelaikan berlayar	16%	bpn, smd, luarPrv	141.265.000
2.09.16. 03	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina	60 Badan Usaha	bpn, smd, luarPrv	394.160.000
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu	1 Simpul		1.257.771.600
2.09.17. 01	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perekeretaapian	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan	1 Lintasan	bpn, smd, luarPrv	220.535.000
2.09.17. 02	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan	2 Perencanaan	ktm, psr, smd, luarPrv	943.876.600

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.09.17.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pemandu moda	2 Perencanaan	bru, bpn, smd, luarPrv	93.360.000
2.09.01.02	UPTD Terminal				2.344.445.540
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%		1.401.569.040
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.401.569.040
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		757.876.500
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang laik	85%	smd	330.240.000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Taman, Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional & Jabatan	85%	smd	427.636.500
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%		95.000.000
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi	100%	bru, kkr, psr, btg, smd, luarPrv	95.000.000
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	700000 Penumpang		90.000.000
2.09.18.01	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan	2 Terminal	btg, smd	80.000.000
2.09.18.02	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan	1 Terminal	kbr, psr, smd	10.000.000
2.1	Komunikasi dan Informatika				14.459.066.656
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				14.459.066.656
2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				14.459.066.656
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaniinya Administrasi Perkantoran	12 Bulan		4.371.253.674
2.10.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	4.371.253.674
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan		1.876.277.500
2.10.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	100 Unit	smd	941.970.000
2.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	934.307.500
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah	12 Bulan		861.525.000
2.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, ktm, kkr, kbr, luarPrv	555.625.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan		
2.10.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	14 orang	smd	305.900.000
		Jumlah Pakaian Dinas Aparatur	133 Stel		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%		48.000.000
2.10.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	8 Dokumen	smd, luarPrv	10.000.000
2.10.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd, luarPrv	38.000.000
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlanyarnya Peningkatan Kualitas SDM bidang TIK serta Terciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU	100 Persen		30.056.660
2.10.11.01	Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat) 2. Jumlah Bimbingan teknis Pranata komputer	22 Sekolah, Kegiatan	smd, luarPrv	30.056.660
2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Meningkatnya Peran Kominfo dalam penyebarluasan informasi publik	4 Kegiatan		898.768.340
2.10.12.01	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo	1 Laporan	smd	104.800.000
2.10.12.02	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Workshop, bimtek, sarana dan prasarana kegiatan jurnalistik dll	60 Orang	bpn, smd, luarPrv	67.260.000
2.10.12.03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial	2 Kerjasama	smd, luarPrv	726.708.340
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Publik	84%		1.255.497.600
2.10.13.01	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho	55 Kegiatan	bpn, smd	360.740.000
2.10.13.02	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi	96 Dialog	smd	42.750.000
2.10.13.03	Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM	2 Laporan	smd, luarPrv	648.517.600
2.10.13.04	Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	1 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	191.690.000
2.10.13.05	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah	4 Pameran	smd	11.800.000
2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Presentase Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi	84 Persen		236.975.000
2.10.14.06	Pengembangan Sumber Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring	28 PD	ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	236.975.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengelolaan pelayanan dan informasi			
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlanyarnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.6 Indeks		2.260.564.452
2.10.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kapasitas Bandwidth Internet	100 Bandwidth (Mbps)	smd, luarPrv	810.350.000
2.10.15.03	Interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan	20 Perangkat Daerah	smd	809.700.000
2.10.15.04	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim& Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi	3 Aplikasi	smd, luarPrv	127.623.600
2.10.15.09	Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota	10 Kab/Kota	smd, luarPrv	143.525.000
2.10.15.10	Penguatan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE	15 Perangkat Daerah	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, luarPrv	369.365.852
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta Tersedianya data dan Informasi KPU/USO, Telekomunikasi dan Penyiaran, Informasi sandi yang ter-enkripsi	100%		2.289.469.463
2.10.16.04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC	20 Aplikasi	smd	1.907.275.000
2.10.16.07	Pelaksanaan audit TIK	Terstandarisasinya Audit TIK	1 Dokumen	smd, luarPrv	68.490.500
2.10.16.08	Penangan Insiden Keamanan Informasi	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD	20 OPD	smd	53.187.500
2.10.16.09	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Tersedianya Sarana Pendukung Layanan	1 Perangkat	bru, kkr, smd, luarPrv	-
2.10.16.10	Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	Terlanyarnya informasi dan data KPU/USO	1 dokumen	smd	-
2.10.16.11	Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi)	Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran	1 dokumen	smd	-
2.10.16.12	Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	Tersedianya data dan informasi yang ter-enkripsi	1 dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	216.371.188
2.10.16.13	Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan	4 Aplikasi	smd, luarPrv	44.145.275
		Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola	25 sub domain		
2.14.16	Program penguatan dan evaluasi data dan statistik	Tersedianya data dan Informasi Statistik	1 Buku		330.678.967

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.14.16.01	Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel	1 buku	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	330.678.967
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				24.784.619.010
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				24.784.619.010
2.11.01.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				18.720.344.730
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		4.088.025.581
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 bulan	smd	4.088.025.581
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		2.148.858.657
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	25 unit	smd	898.429.908
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	smd	1.250.428.749
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	55%		1.327.775.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	156 kegiatan	smd	1.086.775.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 orang	smd	241.000.000
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	76 Nilai AKIP		1.422.806.493
2.11.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd	260.850.000
2.11.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	1.161.956.493
2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas	200 UKM		3.802.304.000
		Jumlah koperasi Berkualitas	100 Koperasi		
2.11.20.01	Pembinaan Lembaga Koperasi dan UKM	jumlah kebijakan dan program yang bersinergi antar pusat dan daerah	17 Kebijakan dan Program	smd	314.438.000
2.11.20.02	Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran	Jumlah Koperasi dan UKM yang Meningkatkan Kapasitas Usahanya	200 KUMK	kkr, bpn, smd	790.863.000
2.11.20.03	Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	700 Koperasi	smd	397.003.000
2.11.20.04	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan	695 KUKM	bru, kbr, kkr, mah, ppu, smd	2.300.000.000
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.	80%		1.465.470.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah BPSK	2 BPSK	bru, smd	455.864.500
		Kompetensi SDM BPSK dan Sekretariat	0 orang		
3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	17 Barang/Jasa	smd	687.963.400
3.06.15.08	Koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	jumlah pengaduan Konsumen yang dapat diselesaikan	25 pengaduan	smd	321.642.100
		jumlah konsumen yang tereduksi	600 orang		
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara	1.43 Miliar US\$		1.612.280.000
3.06.34.01	Perdagangan Dalam Negeri	Rata- rata Rentang Waktu Kecukupan Stok Barang dan Barang Penting	2.5 bulan	smd	494.850.000
3.06.34.02	Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	30 Eksportir	bpn, smd	544.750.000
3.06.34.03	Kerjasama Perdagangan	jumlah UKM yang menjalin Kerjasama Perdagangan	10 UKM	bpn, smd	572.680.000
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	1%		2.852.825.000
3.07.33.03	Perencanaan Pembangunan Industri	Jumlah perusahaan industri di kawasan peruntukan industri/ kawasan industri	1 Perusahaan	smd	1.583.000.000
3.07.33.04	Pengembangan dan Pembinaan Indsutri	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan	25 unit	bpn, smd	1.122.825.000
3.07.33.05	Pengembangan Informasi Industri	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia	10000 data	bpn, smd	147.000.000
2.11.01.02	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				2.933.078.800
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Administrasi perkantoran	100%		1.345.588.800
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 bulan	smd	1.345.588.800
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%		464.490.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	smd	464.490.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah	5%		324.750.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	6 kegiatan	smd, luarPrv	284.750.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	8 orang	smd, luarPrv	40.000.000
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	5%		798.250.000
3.06.33.01	Penerapan dan Pengamanan Standararisasi Jaminan Mutu Barang	Peningkatan Kapasitas laboratorium Pengujian,Kalibrasi dan lembaga Sertifikasi	15 Komoditi dan Ruang lingkup	smd, luarPrv	381.850.000
3.06.33.02	Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Peningkatan,Pelayanan jasa teknis pengujian,kalibrasi dan sertifikasi	1400 Sertifikat	smd	416.400.000
3.06.33.03	Pengadaan Peralatan Laboratorium (DAK)	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	0 unit	smd	-
2.11.01.03	UPTD Pelatihan Koperasi				3.131.195.480
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		1.416.485.480
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12 bulan	smd	1.416.485.480

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		661.200.000
2.11.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	20 unit	smd	146.600.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	smd	514.600.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		319.560.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	18 kegiatan	smd, luarPrv	247.560.000
2.11.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	5 orang	smd, luarPrv	72.000.000
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah KUKM terlatih	300 Orang		733.950.000
2.11.19.01	Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	Jumlah Dokumen Kajian & Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	1 dokumen	smd, luarPrv	260.000.000
2.11.19.02	Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelatihan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan	8 pelatihan	smd	473.950.000
2.12	Penanaman Modal				15.342.205.540
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				15.342.205.540
2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				15.342.205.540
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	72%		3.855.616.080
2.12.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	3.855.616.080
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit		1.475.141.960
2.12.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim	8 paket	smd	490.810.000
2.12.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 bulan	smd	984.331.960
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		3.598.225.000
2.12.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman dan jumlah belanja publikasi	12 bulan	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	3.598.225.000
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	61 Nilai AKIP		279.337.500
2.12.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran	9 Dokumen	bpm, smd	181.050.000
2.12.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	smd	98.287.500
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	13 Hari		1.501.875.000
2.12.18.02	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan	1100 Izin/ Non Izin	smd	720.525.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.12.18.03	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	1500 Izin/ Non Izin	smd	88.850.000
2.12.18.04	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan	18000 NIB	smd	187.300.000
2.12.18.05	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh kualifikasi bintang dari BKPM RI	4 PTSP	bpn, smd	505.200.000
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 perusahaan industri baru		705.000.000
2.12.27.02	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	8 LKPM	bpn, smd	83.600.000
2.12.27.03	Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah dokumen realisasi investasi Kalimantan Timur	5 Dokumen	bpn, smd	226.000.000
2.12.27.04	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi	5 Perusahaan	bpn, smd	395.400.000
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	2 Kebijakan		1.579.500.000
2.12.28.01	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Pergub tentang Penanaman Modal yang disusun	1 dokumen	bru, ppu, bnn, btg, smd	820.250.000
2.12.28.02	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah	1 Dokumen	kkr, psr, bnn, smd	759.250.000
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan	100%		776.775.000
2.12.29.02	Pelayanan informasi perizinan	Jumlah layanan aplikasi perizinan yang dihasilkan	1 Aplikasi	smd	503.090.000
2.12.29.03	Pelayanan Advokasi Perizinan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	15 kasus	smd	273.685.000
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	3 MoU		1.570.735.000
2.12.30.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi	1 Event	bru, bnn, smd	1.304.735.000
2.12.30.02	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	1 Pertemuan Bisnis	bnn, smd	266.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				25.403.719.900
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				25.403.719.900
2.13.01.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				13.769.608.320
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89.55 %		4.191.085.440
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	4.191.085.440
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		1.646.411.800
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasrama	12 Bulan	smd	1.646.411.800
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		1.382.200.000
2.13.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	25 Kegiatan	bru, smd, btg, bnn, ppu, psr,	1.382.200.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58.6 %		224.100.000
2.13.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	bpn, smd, luarPrv	157.600.000
2.13.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10 Dokumen	bpn, smd, luarPrv	66.500.000
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Difasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas Tenaga Sumberdaya Pemuda, Iptek dan Imtaq serta Kreativitas Pemuda	0.16 Persen		993.560.000
2.13.30. 09	Apresiasi Kreativitas Pemuda	Jumlah Kreatifitas Pemuda	1167 Orang	smd	200.000.000
2.13.30. 10	Seleksi Jambore Pemuda Daerah	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi Jambore Pemuda Daerah	100 Orang	bru, kkr, luarPrv	604.460.000
2.13.30. 11	Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah Pemuda yang dikirim mengikuti Jambore Pemuda Indonesia	20 Orang	luarPrv	40.000.000
2.13.30. 12	Sosialisasi dan Pelatihan Pemuda Anti Narkoba dan HIV/AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan pemuda anti narkoba dan HIV/AIDS	1000 Orang	kkr	149.100.000
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase Pemuda Kader Kependidikan, Kepeloporan, Keterlibatan dalam Pembinaan Sosial, Politik, Ekonomi, Kewirausahaan, Budaya dan Hukum	0.13 %		1.869.683.020
2.13.31. 04	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	118 Orang	smd	1.380.973.020
2.13.31. 06	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan	500 Orang	smd	488.710.000
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	14.94 %		815.230.060
2.13.32. 01	Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah atlet yang dibina	30 Orang	smd	205.706.000
2.13.32. 02	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar mahasiswa dan masyarakat yang berpartisipasi	2000 Orang	smd	413.524.060
2.13.32. 03	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah penerima penghargaan	810 Orang	smd	196.000.000
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Pelaku Olahraga Prestasi	14.44 %		2.099.708.000
2.13.33. 04	Partisipasi Event dan Multi Event olahraga	Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga	1100 Orang	smd	281.425.000
2.13.33. 05	Peningkatan SDM Pelatih dan Wasit Olahraga	Jumlah SDM pelatih dan wasit olahraga yang berkompeten	433 Orang	smd	319.300.000
2.13.33. 06	Pelaksanaan Even dan Multi Even Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti event dan multi event olahraga	600 Orang	smd	1.265.003.000
2.13.33. 12	Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga	Jumlah kapasitas sarana dan prasarana olahraga masyarakat	1 Orang	smd	114.300.000
		Presentasi sarana olahraga yang berstandarisasi nasional	30%		
2.13.33. 18	workshop Iptek Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	40 Orang	smd	119.680.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.13.35	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha	0.15 Persen		547.630.000
2.13.35.01	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kompetensi berwirausaha	75 Orang	smd	547.630.000
2.13.01.02	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga				11.634.111.580
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPT (SKM)	89.55 %		8.904.611.580
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	8.904.611.580
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 Unit		1.722.000.000
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasrama	12 Bulan	smd	1.722.000.000
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah even olahraga yang memanfaatkan fasilitas olahraga di Stadion Utama dan Madya	30 Event		1.007.500.000
2.13.34.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasrama yang dipelihara	9 Gedung	smd	1.007.500.000
2.17	Perpustakaan				5.725.871.150
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				5.725.871.150
2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				5.725.871.150
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.67 %		2.388.807.315
2.17.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2.388.807.315
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit		1.042.653.400
2.17.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasrama	Terpenuhinya sarana dan prasrama Aparatur	100%	smd	337.554.000
2.17.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasrama	Terpenuhinya sarana dan prasrama Aparatur	100%	smd	705.099.400
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	92%		709.947.304
2.17.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 kegiatan	smd, luarPrv	709.947.304
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	40 kegiatan		
2.17.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	35 ASN	smd, luarPrv	-
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelegaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	95.5 %		136.095.776
2.17.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	15 dokumen	smd	18.395.776
2.17.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6 dokumen	smd, luarPrv	117.700.000
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mendayagunakan perpustakaan	205700 Pemustaka		530.026.940
2.17.23.01	Pengembangan Layanan Perpustakaan	.Peningkatan Jumlah pemustaka Onsite	197000 Pemustaka	smd	314.923.350

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.23. 02	Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan	.Peningkatan Jumlah pemustaka Online	8700 Pemustaka	smd	175.220.140
2.17.23. 03	Pengembangan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah dokumen MoU dan PKS dibidang Perpustakaan dan Kearsipan	10 Mou/PKS	smd	39.883.450
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan	3550 Judul		244.013.194
2.17.24. 01	Pengelolaan Depository dan Alih Media Konten Lokal	Jumlah konten lokal yang berhasil dikumpulkan	550 Judul	smd	118.013.194
		Jumlah konten lokal yang diolah	550 Judul		
		Jumlah konten lokal yang dilestarikan (alihmedia)	30 Judul		
2.17.24. 02	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan	3000 judul	smd	96.000.000
		Jumlah bahan pustaka yang dikonservasi	16538 eksemplar		
2.17.24. 03	Pengolahan dan Perawatan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah	400 judul	smd	30.000.000
		Jumlah perbaikan buku rusak	600 judul		
		Jumlah penjilidan majalah	10 bundel		
		Jumlah penjilidan surat kabar	36 bundel		
2.17.24. 04	Pengembangan Koleksi dan Penyediaan Bahan Pustaka (DAK)	Jumlah bahan perpustakaan yang dikembangkan	3000 judul	smd	-
		Jumlah bahan pustaka yang dikonservasi	16538 eksemplar		
2.17.26	Program Pegembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar	20 Perpustakaan		152.772.500
2.17.26. 01	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Perpustakaan	Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Perpustakaan yg dibina dan dikembangkan	30 orang	smd	152.772.500
		Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	6 Kegiatan		
		Jumlah Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	20 Perpustakaan		
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang terkelola dengan baik	1100 berkas		204.010.121
2.18.19. 01	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Laporan hasil Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	0 laporan	smd	83.219.900
		Jumlah akuisisi arsip statis	100 berkas		
		Jumlah Arsip Inaktif yang disusutkan	1000 berkas		
2.18.19. 02	Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip	Jumlah arsip yang dipelihara	600 lembar	smd	45.816.000
2.18.19. 03	Peningkatan Kualitas Layanan Kearsipan	.Meningkatnya Jumlah Pengunjung Kearsipan	50 orang	smd	74.974.221
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	Jumlah lembaga instansi yang dibina	50 Lembaga/Inta nsi		317.544.600
2.18.25. 01	Pembinaan Internal dan Supervisi	jumlah dokumen Peraturan/Kebijakan mengenai kearsipan	2 dokumen	smd	96.200.000
		Jumlah pembinaan internal dan supervisi lembaga / instansi	40 Lembaga/Inta nsi		
2.18.25. 02	Pembinaan Eksternal dan Supervisi	Jumlah Pembinaan Eksternal, Supervisi dan Tata Kelola LKD Kab /Kota	10 LKD	smd	112.129.600

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.18.25.03	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Kearsipan	Jumlah Tenaga Fungsional Dan Tenaga Kearsipan yg dibina dan dikembangkan	20 orang	smd	109.215.000
3	Urusan Pilihan				654.200.921.150
3.01	Kelautan dan Perikanan				33.658.914.283
3.01.01.	Dinas Kelautan Dan Perikanan				33.658.914.283
3.01.01.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				26.248.606.763
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		8.352.466.120
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bru, ktm, ppu, bpn, btg, smd	8.352.466.120
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	8 unit		2.819.100.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	35 Unit	smd	1.256.300.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru, ktm, ppu, bpn, btg, smd	1.562.800.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		1.874.951.050
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah	100 Kali	smd	1.335.951.050
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	5 Orang	smd	539.000.000
		Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS	225 Stel		
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	63 Nilai		1.035.500.000
3.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	7 Dokumen	bpm, smd	638.350.000
3.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	2 Dokumen	bpm, smd	397.150.000
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	108862 Ton		5.760.725.000
3.01.21.08	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina	30 KUB	bru, btg, bpm, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	1.554.940.000
		Indeks Kesejahteraan Nelayan	100 NTN		
3.01.21.09	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah Perizinan Kapal Ikan	120 Izin	bru, kkr, ktm, psr, bpm, smd	859.100.000
3.01.21.10	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional	6 Unit	bru, ktm, ppu, bpm, btg, smd	3.091.065.000
3.01.21.11	Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (DAK)	Jumlah Ketersedian Fasilitas Pokok dan Fungsional Sarpras Pelabuhan Perikanan	3 PPI	btg, smd	255.620.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	144584 Ton		2.763.980.093
		Angka Konsumsi Ikan	52 Kg/Kapita		
3.01.25.01	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Unit Pemberian yang bersertifikat CPIB (Cara Pemberian Ikan yang Baik)	5 Unit	bru, kkr, ppu, bpn, btg, smd	1.835.123.500
		Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) skala kecil dan skala besar	60 Unit		
		Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	60 Sampel		
3.01.25.02	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	4 Kelompok Pembudidaya Ikan (PODAKAN)	bru, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	614.690.900
		Jumlah Bidang Lahan Budidaya yang disiapkan sertifikatnya	50 Bidang		
		Indeks Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	100 NTPi		
3.01.25.03	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan dan Sertifikasi	11 UKM	bru, kbr, kkr, ktm, mah, ppu, bpn, btg, smd	314.165.693
		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran	15 Izin		
3.01.25.04	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Fasilitasi (Promosi) Pendukung Pemasaran Produksi Perikanan	0 Promosi	smd	-
		Volume Eksport Perikanan	2900 Ton		
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	1 Kawasan yang di restorasi		2.134.180.000
3.01.26.01	Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Wilayah Pesisir yang Memiliki Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	smd	874.150.000
		Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan yang Ditetapkan menjadi Pergub	0 Dokumen		
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang Dibina/Difasilitasi	0 Kelompok Masyarakat		
3.01.26.02	Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan	Jumlah Pelaku Investasi Jasa Kelautan yang difasilitasi	1 Pelaku Investasi	bru, kkr, ktm, bpn, btg, smd	256.350.000
3.01.26.03	Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan yang direhabilitasi	4 Hektare	smd	848.680.000
3.01.26.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi (DAK)	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi	1 unit	bru	155.000.000
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	37.07 Persen		1.507.704.500

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.01.27. 01	Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	Jumlah Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	10 Operasi	smd	762.985.000
3.01.27. 02	Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10 Operasi	smd	409.050.000
3.01.27. 03	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	2 Dokumen	smd	335.669.500
3.01.01. 02	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan				1.149.191.320
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		602.576.320
3.01.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	602.576.320
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	3 Unit		153.450.000
3.01.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	8 Unit	smd	23.450.000
3.01.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	130.000.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		271.000.000
3.01.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Maupun Dalam daerah	17 Kali	smd	209.500.000
3.01.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	3 Orang	smd	61.500.000
		Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS	23 Stel		
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	210 Sampel		122.165.000
3.01.28. 01	Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	110 Sampel	smd	122.165.000
3.01.28. 02	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang Menerapkan Mutu Hasil Perikanan sesuai Standar	0 Sampel	smd	-
3.01.01. 03	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar				4.200.826.800
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		735.421.800
3.01.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	bpn	735.421.800
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	3 Unit		241.150.000
3.01.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Unit	bpn	88.900.000
3.01.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	152.250.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		411.125.000
3.01.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	15 Kali	bpn	374.375.000
3.01.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang	bpn	36.750.000
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	2700000000 Ekor		2.813.130.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.01.29.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Komoditas benih udang windu/ ikan air laut yang berkualitas	4 komoditas	bpn	273.600.000
3.01.29.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang	Jumlah Unit Pemberian udang windu/ ikan air laut yang Operasional	2 Unit	bpn	734.150.000
3.01.29.04	Rehab sarana dan prasarana perbenihan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Rehab	2 Unit	bpn	1.028.400.000
3.01.29.06	Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbenihan (UPTD Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut (DAK)	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Perbenihan dan Percontohan Budidaya Laut	5 unit	smd	776.980.000
3.01.01.04	UPTD Sentra Pemberian Air Payau dan Air Laut Sebulu				2.060.289.400
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		841.480.800
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	kkr	841.480.800
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	3 Unit		512.540.000
3.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Unit	kkr	123.670.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kkr	388.870.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		248.102.600
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	17 Kali	kkr	166.502.600
3.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	6 Orang	kkr	81.600.000
		Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS dan Non PNS	0 Stel		
3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Air Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah / Ikan Air Laut	70000 Ekor		458.166.000
3.01.31.01	Peningkatan Kualitas Mutu Benih	Jumlah Komoditas Spesifik Benih Udang Galah/ Ikan yang berkualitas	2 Komoditas	kkr	305.550.000
3.01.31.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Laut	Jumlah Unit Pemberian Udang Galah dan Ikan Air Payau/Laut yang Operasional	2 Unit	kkr	152.616.000
3.02	Pariwisata				12.166.932.220
3.02.01	Dinas Pariwisata				12.166.932.220
3.02.01.01	Dinas Pariwisata				12.166.932.220
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%		2.811.845.869
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	90%		
3.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.811.845.869
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		862.545.494
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		
3.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	16 Item	smd	432.770.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.02.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	429.775.494
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 Kali		565.237.657
		Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	55%		
3.02.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	41 Orang/Tahun	smd, luarPrv	565.237.657
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%		574.409.100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	75 nilai AKIP		
3.02.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	3 Dokumen	smd, luarPrv	467.916.450
3.02.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	smd, luarPrv	106.492.650
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Kawasan		1.940.720.000
3.02.16. 01	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	3 Unit	smd	1.279.990.000
3.02.16. 02	Pengembangan destinasi unggulan alam dan buatan	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	2 Destinasi	smd	319.900.000
3.02.16. 04	Pengembangan destinasi unggulan bahari dan minat khusus	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	2 Destinasi	smd	340.830.000
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan	8 Destinasi		1.959.344.500
3.02.17. 01	Penguatan analisa pasar pariwisata	Jumlah laporan analisa pasar pariwisata	0 Laporan	smd	252.125.000
3.02.17. 02	Penguatan data dan informasi pariwisata	Jumlah data dan informasi pariwisata yang diumumkan	10 Jenis	smd	369.144.500
3.02.17. 03	Pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata	Jumlah kerjasama dan promosi yang dilakukan	6 Kegiatan	smd	1.338.075.000
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan	520 Orang		1.501.876.200
3.02.18. 01	Pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye Sapta Pesona	Jumlah anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dilatih	109 Orang	smd	544.288.000
3.02.18. 02	Pengembangan pengendalian usaha sarana pariwisata	Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina	80 Orang	smd	322.105.000
3.02.18. 03	Peningkatan SDM dan profesionalisme usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	100 Orang	smd	635.483.200
3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	270 orang		1.950.953.400
3.02.19. 01	Peningkatan kualitas dan kreatifitas seni budaya pertunjukan	Jumlah pelaku ekraf seni pertunjukan yang dilatih	40 Orang	smd	585.075.000
3.02.19. 02	Pengembangan pengelolaan karya seni budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang ditingkatkan karyanya	50 Orang	smd	1.037.300.000
3.02.19. 03	Pengembangan wisata budaya	Jumlah SDM pelaku ekraf wisata budaya yang dilatih	30 Orang	smd	328.578.400
3.03	Pertanian				61.315.067.260
3.03.01	Dinas Perkebunan				27.364.386.598

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.03.01. 01	Dinas Perkebunan				19.739.500.640
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83%		3.032.338.140
3.03.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	3.032.338.140
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		1.895.089.500
3.03.08. 01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	15 Unit	smd	1.222.639.500
3.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	672.450.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		1.461.883.000
3.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd	1.447.883.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
3.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 Orang	smd	14.000.000
		Jumlah pakaian dinas	0 Stel		
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai		1.152.060.000
3.03.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	smd	778.120.000
3.03.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	smd	373.940.000
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	74060 Ton		10.387.335.000
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	16717254 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	3307 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	5849 ton		
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	12468 Ton		
		Produksi komoditas perkebunan	16812938 Ton		
3.03.58. 04	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	19.5 Ton/Ha	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd	3.299.585.000
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1.35 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0.8 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0.7 Ton/Ha		
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1.15 Ton/Ha		
3.03.58. 05	Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	100 Ha	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd	6.729.502.500

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	125 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	80 Ha		
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	135 Ha		
3.03.58.06	Pengembangan Kelembagaan Perkebunan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	20 unit	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd	358.247.500
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4.08 Juta ton CO2eq		491.400.000
3.03.76.04	Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	bru, kkr, bpn, smd	165.600.000
3.03.76.05	Perlindungan Lahan Konservasi di Areal Perkebunan	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	101500 Ha	smd	123.100.000
3.03.76.06	Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan	Jumlah KTPA yang dibentuk dan dibina	5 KTPA	smd	202.700.000
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan		475.065.000
3.03.80.04	Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrasikan	25 koperasi	smd	158.390.000
3.03.80.05	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan	2 konflik	smd	120.300.000
3.03.80.06	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina	20 perusahaan	smd	196.375.000
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	2 Produk		844.330.000
3.03.93.01	Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	3 Kelompok Tani	smd	331.792.500
3.03.93.02	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	2 Produk	smd	381.765.000
3.03.93.03	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti	1 event	smd	130.772.500
3.03.01.02	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan				2.029.350.320
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83%		379.715.320
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	379.715.320
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		1.112.850.000
3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	16 Unit	smd	668.750.000
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	444.100.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		194.825.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd	194.825.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	0 Orang	smd	-
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar	2905176 Benih		341.960.000
3.03.94. 01	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih	Persentase peredaran benih yang illegitim	3.08 %	smd	234.450.000
3.03.94. 02	Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi	2000000 Benih	smd	107.510.000
3.03.01. 03	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				1.964.352.240
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83%		651.239.740
3.03.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	651.239.740
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		359.670.000
3.03.08. 01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	1 Unit	smd	300.000
3.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	359.370.000
3.03.08. 06	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah peralatan dan kelengkapan	7 Unit	smd	-
		Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang	0 Unit		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		219.137.500
3.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	bru, kbr, kkr, ppu, bpn, smd, luarPrv	219.137.500
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
3.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	0 Orang	luarPrv	-
3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	1087534440 Rupiah		734.305.000
3.03.95. 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Lahan yang di Kendalikan	229 Ha	smd	454.245.000
3.03.95. 02	Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	Jumlah APH yang Diperbanyak	5000 Kg	smd, luarPrv	280.060.000
		Jumlah APH yang Diperbanyak	500 Liter		
3.03.01. 04	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				3.631.183.398
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83%		481.486.830
3.03.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	481.486.830
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		1.573.329.400
3.03.08. 01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	2 Unit	smd	190.551.400

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	kkr, smd	207.299.000
3.03.08. 05	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana pendukungnya (DAK)	Jumlah peralatan dan kelengkapan	4 Unit	smd	1.175.479.000
		Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang	1 Unit		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		141.225.000
3.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	smd	141.225.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4 Kegiatan		
3.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	0 Orang	smd	-
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Percentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85%		1.435.142.168
3.03.88. 03	Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	50000 benih	kkr, smd	800.805.868
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15000 benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	25000 benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 benih		
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10000 benih		
3.03.88. 04	Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	45000 benih	kkr, smd	634.336.300
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	25000 benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10000 benih		
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	10000 benih		
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				33.950.680.662
3.03.02. 01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				26.977.439.060
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		3.187.586.560
3.03.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	2600 Surat	smd	3.187.586.560
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		3.793.410.000
3.03.08. 01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	86 Unit	smd	2.085.800.000
3.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	74 Unit	smd	1.707.610.000
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya	4427 M2		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	12%		1.382.666.000
3.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	143 Kegiatan	smd	1.219.450.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10 Orang	smd	163.216.000
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78.86 Nilai		1.516.665.500
3.03.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	12 Dokumen	smd	628.550.000
3.03.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	17 Laporan	smd	888.115.500
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	11%		1.915.932.500
3.03.23. 02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	2 Unit usaha	kbr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	583.550.000
3.03.23. 03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazar	50000000 Rp	bru, kbr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv	641.140.000
3.03.23. 04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	30 Unit usaha	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, ktm, kkr, kbr, luarPrv	691.242.500
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	118.5 Konstanta		4.533.375.000
		Jumlah Miniranch yang terregister	12 Unit		
3.03.34. 02	Pengembangan Kawasan Peternakan	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	70000 Stek/Pols	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd	3.100.900.000
3.03.34. 03	Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan	4 Dokumen	smd	295.000.000
3.03.34. 04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE,dll)	30 Orang	smd	1.137.475.000
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana	10 Unit		2.481.387.500
3.03.89. 01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah hewan yang divaksinasi	7600 Ekor	smd	1.362.037.500
3.03.89. 02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	7 Kab/Kota	smd	273.250.000
3.03.89. 03	Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah hewan/ternak yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan	1100 ekor	smd	846.100.000
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi	20%		8.166.416.000
		Calving Interval	18 Bulan		
3.03.90. 01	Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah Ternak Sapi Bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 Ekor	smd	4.311.963.500
		Service per Conception	1.75 Indeks		
3.03.90. 02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	1 Kelompok	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, ktm, kkr,	972.250.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kbr, luarPrv	
3.03.90. 03	Peningkatan Kelembagaan Peternak	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	14 Proposal	smd	2.882.202.500
3.03.02. 02	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak				3.993.944.722
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		1.572.950.572
3.03.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	250 Surat	ppu	1.572.950.572
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		599.348.650
3.03.08. 01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	ppu	76.400.000
3.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	5 Unit	ppu	522.948.650
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya	1000 M2		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	12%		374.295.500
3.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	140 Kegiatan	ppu, luarPrv	358.437.500
3.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	3 Orang	ppu	15.858.000
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Percentase produksi bibit ternak berkualitas	11%		1.447.350.000
		Peningkatan produksi bibit ternak	10%		
3.03.92. 03	Pembangunan/Perbaikan UPTD PIB Api-Api dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	ppu	-
3.03.92. 04	Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak	Jumlah Kelahiran Sapi Bibit dan Rusa Bibit	40 Ekor	ppu	596.500.000
3.03.92. 05	Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT	750 Ton	ppu	850.850.000
		Jumlah bibit HPT yang diproduksi	5000 Stek/Pols		
3.03.02. 03	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				2.979.296.880
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	81%		1.018.572.780
3.03.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	240 Surat	smd	1.018.572.780
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	2 unit		514.349.100
3.03.08. 01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	19 Unit	smd	204.070.000
3.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	39 Unit	smd	310.279.100
		Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihannya	686 M2		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	9%		396.175.000
3.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	21 Kegiatan	smd	281.875.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	6 orang	smd	114.300.000
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Ksmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan	12%		1.050.200.000
3.03.91. 01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan	2500 sampel	smd	426.100.000
3.03.91. 02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan	400 sampel	smd	624.100.000
3.03.91. 03	Pembangunan/Perbaikan UPTD Laboratorium Keswan dan Ksmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	smd	-
3.04	Kehutanan				511.849.788.547
3.04.01	Dinas Kehutanan				511.849.788.547
3.04.01. 01	Dinas Kehutanan				177.426.203.518
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		3.849.436.119
3.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd, luarPrv	3.849.436.119
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		2.414.485.000
3.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	1.851.650.000
3.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	562.835.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		2.563.750.000
3.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru, psr, smd, luarPrv	2.185.000.000
3.04.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	170 Stell	smd, luarPrv	378.750.000
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70 Nilai AKIP		1.081.600.000
3.04.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 dokumen	bru, smd, luarPrv	568.100.000
3.04.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen	bru, psr, ppu, smd, luarPrv	513.500.000
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	165 Miliar Rupiah		2.293.960.000
3.04.16. 01	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	Persentase realisasi produksi hasil hutan kayu (realisasi/target)	70%	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	904.950.000
3.04.16. 02	Pendampingan Penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA	Jumlah IUPHHK-HA yang menerapkan RIL / RIL C	2 IUPHHK-HA	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah,	92.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ktm, kkr, kbr, luarPrv	
3.04.16. 03	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Tata Hutan	9 Dokumen	smd	500.500.000
3.04.16. 05	Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase penanganan tertib Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) pada Unit Manajemen	80%	bru, smd, luarPrv	596.510.000
3.04.16. 06	Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen penyelesaian	6 Dokumen	smd	200.000.000
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat	13.98 %		563.175.000
3.04.39. 05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38500 Ha	bru, kbr, kkr, ktm, ppu, bpn, smd, luarPrv	110.000.000
3.04.39. 15	Pengelolaan DAS	Jumlah DAS/SUB DAS yang dimonitoring	3 DAS/SUB DAS	kbr, kkr, ktm, smd, luarPrv	296.175.000
3.04.39. 16	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Laporan Peredaran dan Pengadaan Bibit	10 Laporan	smd	157.000.000
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1.75 %		229.375.000
3.04.41. 24	Pengendalian dan Pengamanan Hutan	luas hutan yang dimanfaatkan tanpa Izin yang semakin berkurang	1150 Ha	bpn, smd, luarPrv	-
3.04.41. 25	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas Areal Kebakaran Hutan yang Semakin Menurun	24000 Ha	smd, luarPrv	-
3.04.41. 26	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang Meningkat	4000 Ha	smd	229.375.000
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	32000 Ha		619.347.921
3.04.42. 36	Penyuluhan Kehutanan	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi	5 KTH	kbr, kkr, mah, bpn, smd, luarPrv	124.235.185
3.04.42. 37	Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Unit Usaha Masyarakat Hutan	10 Unit	smd, luarPrv	321.135.536
		Luas permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	35000 Ha		
3.04.42. 38	Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat	Luas pembinaan wilayah Hutan Adat/Hutan Hak	48.85 Ha	kbr, ktm, ppu, smd, luarPrv	173.977.200
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	5 Unit Usaha		2.722.000.000
3.04.43. 04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	4 Laporan	bru, ktm, smd, luarPrv	1.409.925.000
3.04.43. 06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan	15 Laporan	smd	539.050.000
3.04.43. 09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	50 Peserta	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr,	773.025.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kbr, luarPrv	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	10 Jumlah Usulan		3.628.000.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Laporan Identifikasi/Inventarisasi/Pemetaan Resolusi Konflik, Pembinaan dan Pendampingan Hutan Adat serta Monev Hutan Adat	23 Laporan	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	2.600.000.000
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Fasilitasi Perhutanan Sosial	10 Laporan		
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	14 Laporan	bru, ktm, mah, smd, luarPrv	1.028.000.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	4 Laporan	ktm, smd, luarPrv	-
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		7.800.000.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	92 Unit	smd, luarPrv	-
		jumlah kegiatan monev	75 laporan		
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	12 Kegiatan	smd	1.415.790.000
		jumlah kegiatan monev	8 laporan		
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	10 Laporan	smd, luarPrv	-
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	70 Laporan	smd, luarPrv	-
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	19 Dokumen	smd, luarPrv	594.000.000
3.04.45.12	Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Monev Operasional Pemadaman dan Penanganan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan	50 Laporan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	560.550.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	18 Unit	smd, luarPrv	323.450.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	177 Unit	smd, luarPrv	435.000.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	bru, smd, btg, bpn, ppu, mah,	1.132.260.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ktm, kkr, kbr, luarPrv	
3.04.45. 20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	70 Laporan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	1.032.950.000
3.04.45. 21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	20 Laporan	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, luarPrv	1.095.413.600
3.04.45. 24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	21 Kegiatan	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, luarPrv	1.210.586.400
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	39 kasus Tindak Pidana		2.600.000.000
3.04.46. 02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	13 Laporan	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd	532.620.000
3.04.46. 04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	44 Laporan	bru, kbr, kkr, ktm, ppu, smd, luarPrv	2.067.380.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	400 Hektar		9.364.230.000
3.04.47. 01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	500 Hektar	smd, luarPrv	178.700.000
3.04.47. 02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	400 Hektar	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	7.429.780.000
3.04.47. 03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	25 Laporan	smd, luarPrv	1.755.750.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	37 SK/Sertifikat		2.800.000.000
		Jumlah Bibit	60000 Bibit		
3.04.48. 09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit	63330 bibit	kkr, bpn, smd	726.587.500
3.04.48. 10	Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan (DBH DR)	Jumlah penyelenggaraan sertifikasi perbenihan	10 sertifikasi	kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	384.550.000
3.04.48. 11	Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM) (DBH DR)	Jumlah Pembinaan perbenihan tanaman hutan (bimtek, monev, pelayanan perijinan dan peningkatan kualitas SDM)	3 Kegiatan	kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, luarPrv	1.688.862.500
3.04.51	Program Pengelolaan KPPh	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPPh dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	36 Unit Usaha		133.918.427.703

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	1611386.43 Hektar	kkr	133.918.427.703
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR meningkat	25%		978.416.775
3.04.52.01	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	3 Laporan	smd, luarPrv	978.416.775
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	50 Ha		-
3.04.53.11	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas Penataan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Secara Lestari	50 Ha	bpn	-
3.04.53.12	Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari	50 Ha	mah, bpn	-
3.04.01.02	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto				26.316.070.307
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		1.062.293.481
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.062.293.481
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		505.821.090
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	194.500.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	311.321.090
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		9.412.500
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	kkr, smd, luarPrv	9.412.500
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	114 Stell	kkr, smd, luarPrv	-
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	4 Unit Usaha		788.400.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	8 Laporan	kkr, smd, luarPrv	788.400.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	5 Jumlah Usulan		1.695.050.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	10 Laporan	kkr, ppu	1.695.050.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		14.160.866.775
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	750 Unit	smd, luarPrv	-
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	5 Kegiatan	kkr, smd, luarPrv	-
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	5 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	-
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	46 Laporan	kkr, smd, luarPrv	-

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.45. 13	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	473.540.000
3.04.45. 15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	25 Unit	smd, luarPrv	1.164.070.000
3.04.45. 16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	1011 Unit	smd, luarPrv	7.929.350.000
3.04.45. 18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah Luas Penaksiran Kebakaran	50 Hektar	kkr, ppu, smd, luarPrv	506.500.000
3.04.45. 19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	815.844.775
3.04.45. 20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	72 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	1.459.500.000
3.04.45. 21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	35 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	598.502.000
3.04.45. 22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah Pendampingan	5 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	473.880.000
3.04.45. 24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	24 Kegiatan	kkr, ppu, smd, luarPrv	739.680.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		2.079.700.000
3.04.46. 01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	8 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	721.300.000
3.04.46. 04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	25 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	1.358.400.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	300 hektar		5.904.550.000
3.04.47. 01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	300 Hektar	kkr, ppu, smd, luarPrv	242.000.000
3.04.47. 02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	300 Hektar	kkr, ppu, smd, luarPrv	5.308.550.000
3.04.47. 03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	7 Laporan	kkr, ppu, smd, luarPrv	354.000.000
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	150 Hektar		109.976.461
3.04.50. 01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas penataan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari	150 Ha	kkr, smd, luarPrv	42.801.238
3.04.50. 02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Penanganan degradasi dan deforestasi serta konflik tenurial	150 Hektar	kkr, smd, luarPrv	8.192.000
3.04.50. 03	Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (DAK)	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura	1 Unit	kkr	-
3.04.50. 04	Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura (Pendamping DAK)	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Wisata di Tahura	1 Unit	kkr	58.983.223
3.04.01.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				52.772.196.389

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		1.382.482.219
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru	1.382.482.219
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		1.992.169.108
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru	1.807.898.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bru	184.271.108
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		452.740.407
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bru	426.440.407
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	73 Stell	bru	26.300.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	5 Unit Usaha		1.170.994.400
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	26 Laporan	bru, smd, luarPrv	814.994.400
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan	4 Unit/Demplot	bru	356.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	4 Jumlah Usulan		1.960.679.149
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	36 Laporan	bru, smd, luarPrv	995.700.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	36 Laporan	bru, smd, luarPrv	964.979.149
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		24.041.660.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	84 Unit	bru, bpn, smd	1.615.660.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	1294 Unit	bru, bpn, smd, luarPrv	15.664.850.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah Luas Penaksiran Kebakaran	300 Hektar	bru	438.200.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	32 Laporan	bru, smd	1.094.720.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	36 Laporan	bru, smd	1.791.150.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	36 Laporan	bru, smd	1.998.200.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah Pendampingan	24 Laporan	bru, smd	1.090.730.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	24 Kegiatan	bru, bpn, smd	348.150.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	5 kasus Tindak Pidana		4.483.043.600
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	26 Laporan	bru, smd, luarPrv	944.400.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	40 Laporan	bru, smd, luarPrv	1.494.160.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	60 Laporan	bru	2.044.483.600
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	200 Hektar		946.200.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	800 Hektar	bru, smd, luarPrv	946.200.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	8 SK/Sertifikat		1.955.080.000
		Jumlah Bibit	25000 Bibit		
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit	22000 bibit	bru, bpn, smd, luarPrv	1.955.080.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	8 Unit Usaha		14.387.147.506
		Percentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	20 Ha	bru	1.096.113.485
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	8 Unit Manajemen		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	100 Ha	bru, smd, luarPrv	240.684.021
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	4 Unit Usaha		
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	14651553 Hektar	bru, bpn, smd, luarPrv	13.050.350.000
3.04.01.04	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				35.813.724.895
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		1.695.373.717
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn	1.695.373.717
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		1.429.828.101
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	931.690.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	498.138.101
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		270.966.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bpn	113.766.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	45 Stell	bpn	157.200.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	2 Unit Usaha		1.214.082.300
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	5 Laporan	bpn	469.568.500
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	11 Laporan	kbr, psr, ppu, bpn	393.513.800
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	100 Peserta	bpn	-
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	425 Peserta	kbr, psr, ppu, bpn	351.000.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	3 Jumlah Usulan		881.037.500
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	10 Laporan	bpn	881.037.500
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	4 Laporan	bpn	-
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		17.832.147.500
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	55 Unit	bpn	-
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	15 Kegiatan	kbr, psr, ppu, bpn	818.220.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	5 Kegiatan	bpn	-
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	4 Laporan	bpn	-
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	10 Laporan	bpn	-
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Laporan	bpn	-
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Laporan	bpn	-
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	5 Dokumen	bpn	-
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	9 Kegiatan	kbr, psr, ppu, bpn	624.787.500
3.04.45.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah pembentukan regu pertambuan DALKARHUTLA	3 Regu/MPA	bpn	-
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	16 Unit	kbr, psr, ppu, bpn	752.712.500
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	571 Unit	kbr, psr, ppu, bpn	11.168.275.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah Luas Penaksiran Kebakaran	200 Hektar	kbr, psr, ppu, bpn	281.025.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.45. 19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	25 Laporan	kbr, kkr, psr, ppu, bpn	1.260.712.500
3.04.45. 20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	30 Laporan	kbr, kkr, psr, ppu, bpn	886.602.500
3.04.45. 21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	14 Laporan	kbr, psr, ppu, bpn	466.200.000
3.04.45. 22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah Pendampingan	17 Laporan	kbr, psr, ppu, bpn	932.650.000
3.04.45. 24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	15 Kegiatan	kbr, psr, ppu, bpn	640.962.500
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 kasus Tindak Pidana		1.644.327.500
3.04.46. 01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	10 Laporan	kbr, psr, ppu, bpn	523.725.000
3.04.46. 03	Penjagaan di Tempat - Tempat Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penjagaan	6 Laporan	bpn	-
3.04.46. 04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	25 Laporan	kbr, psr, ppu, bpn	1.120.602.500
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	350 Hektar		4.487.088.975
3.04.47. 01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	350 Hektar	bpn	283.363.975
3.04.47. 02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	350 Hektar	bpn	3.870.600.000
3.04.47. 03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	19 Laporan	bpn	333.125.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	1 SK/Sertifikat		503.425.000
		Jumlah Bibit	100000 Bibit		
3.04.48. 03	Penyediaan Benih	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih	1 Sertifikat	bpn	-
3.04.48. 04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	bpn	-
3.04.48. 07	Pengelolaan sumber benih (DBH DR)	Jumlah Pengelolaan Sumber Benih	1 Kegiatan	kbr, psr, ppu	-
3.04.48. 09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit	35000 bibit	kbr, psr, ppu	503.425.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	4 Unit Usaha		5.855.448.302
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51. 01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	1000 Ha	bpn	28.084.702
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	8 Unit Manajemen		
3.04.51. 02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	200 Ha	bpn	74.490.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	3 Unit Usaha		
3.04.51. 05	Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas areal pemeliharaan tanaman	100 Hektar	bpn	-

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.51.06	Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	Luas areal pemeliharaan tanaman	100 Hektar	bpn	30.398.600
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	350000 Hektar	kbr	5.722.475.000
3.04.01.05	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				25.975.496.135
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		680.702.772
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kbr, kkr, ppu, bpn, smd, luarPrv	680.702.772
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		474.400.000
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	bpn	12.000.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kbr, kkr, ppu, bpn, smd, luarPrv	462.400.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		143.678.588
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	bpn, luarPrv	130.578.588
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	38 Stell	kbr, kkr, ppu, bpn, luarPrv	13.100.000
3.04.43	Program Penyaluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	5 Unit Usaha		668.400.000
3.04.43.01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	8 Laporan	kkr, bpn, smd, luarPrv	341.200.000
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	200 Peserta	kbr, kkr, psr, ppu, bpn, luarPrv	-
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	200 Peserta	kbr, kkr, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	327.200.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	3 Jumlah Usulan		680.025.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	6 Laporan	bpn, luarPrv	324.750.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	2 Laporan	bpn, luarPrv	355.275.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	10 Laporan	bpn, luarPrv	-
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		7.059.772.175
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Dokumen	bpn, luarPrv	-
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse	2 Kegiatan	bpn, luarPrv	424.250.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL			
3.04.45. 03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	6 Kegiatan	bpn, luarPrv	-
3.04.45. 04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	6 Laporan	bpn, luarPrv	-
3.04.45. 05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	4 Laporan	bpn, luarPrv	-
3.04.45. 06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	20 Laporan	bpn, luarPrv	-
3.04.45. 07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Laporan	bpn, luarPrv	-
3.04.45. 09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	4 Kegiatan	bpn, luarPrv	497.500.000
3.04.45. 10	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura, Silvopastura dan Kegiatan Sejenisnya (DBH SDA DR)	Luas Kegiatan Agroforestry, Agrosylvopastura, Sylvopastura	100 Hektar	kkr, ppu, bpn, luarPrv	1.222.450.000
3.04.45. 11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah pembentukan regu pertambuan DALKARHUTLA	9 Regu/MPA	kbr, bpn, smd, luarPrv	-
3.04.45. 14	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Dokumen	kbr, kkr	92.275.000
3.04.45. 16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	8 Unit	kbr, kkr, psr, ppu	2.187.322.175
3.04.45. 18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah Luas Penaksiran Kebakaran	600 Hektar	kbr, kkr, psr, ppu, bpn	157.950.000
3.04.45. 19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Laporan	kbr, kkr, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	388.250.000
3.04.45. 20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	20 Laporan	kbr, kkr, psr, ppu, bpn, luarPrv	936.500.000
3.04.45. 21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	5 Laporan	kbr, kkr, psr, ppu, bpn, luarPrv	510.250.000
3.04.45. 22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah Pendampingan	8 Laporan	kbr, kkr, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	406.775.000
3.04.45. 24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	6 Kegiatan	kbr, kkr, psr, ppu	236.250.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 kasus Tindak Pidana		2.049.550.000
3.04.46. 01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	5 Laporan	bpn, luarPrv	492.625.000
3.04.46. 04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	20 Laporan	kbr, kkr, ppu,	1.556.925.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				bpn, luarPrv	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		8.686.197.600
3.04.47. 01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	370 Hektar	kkr, bpn, smd, luarPrv	354.817.600
3.04.47. 02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	400 Hektar	kkr, ppu, bpn, luarPrv	8.095.330.000
3.04.47. 03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	9 Laporan	kkr, bpn	236.050.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	1 SK/Sertifikat		451.700.000
		Jumlah Bibit	10000 Bibit		
3.04.48. 04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	25000 Bibit	kkr, bpn, luarPrv	-
3.04.48. 09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit	50000 bibit	kkr, smd	451.700.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	2 Unit Usaha		5.081.070.000
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51. 01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	200 Ha	bpn, luarPrv	48.148.000
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	5 Unit Manajemen		
3.04.51. 02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	100 Ha	bpn, luarPrv	-
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	2 Unit Usaha		
3.04.51. 07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	387488 Hektar	ktm	5.032.922.000
3.04.01. 06	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				34.791.378.283
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		1.279.454.398
3.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr	1.279.454.398
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		903.331.774
3.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	psr	595.260.880
3.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	psr	308.070.894
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		244.201.518
3.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	psr	206.234.768
3.04.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 Stell	psr	37.966.750
3.04.43	Program Penyaluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	4 Unit Usaha		1.361.435.225

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.43. 01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	4 Laporan	psr	140.265.000
3.04.43. 06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluhan	6 Laporan	psr	105.812.500
3.04.43. 07	Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot (DBH DR)	Jumlah Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplot	1 Unit/Demplot	psr	103.630.225
3.04.43. 08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan	42 Unit/Demplot	psr	427.750.000
3.04.43. 09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	510 Peserta	psr	583.977.500
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	10 Jumlah Usulan		1.158.550.000
3.04.44. 01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	40 Laporan	psr	575.275.000
3.04.44. 02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	2 Laporan	psr	583.275.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		12.605.865.000
3.04.45. 02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	4 Kegiatan	psr	253.325.000
3.04.45. 14	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Dokumen	psr, luarPrv	1.078.300.000
3.04.45. 15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	49 Unit	psr, luarPrv	1.132.600.000
3.04.45. 16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	2055 Unit	psr, luarPrv	4.243.450.000
3.04.45. 17	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)	Jumlah Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air	2 Unit	psr	1.614.102.500
3.04.45. 19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Laporan	psr, luarPrv	456.850.000
3.04.45. 20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	30 Laporan	psr, luarPrv	1.778.200.000
3.04.45. 21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	10 Laporan	psr, luarPrv	1.828.337.500
3.04.45. 22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah Pendampingan	4 Laporan	psr	144.150.000
3.04.45. 24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Kegiatan	psr	76.550.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	1 kasus Tindak Pidana		2.957.628.550
3.04.46. 01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	16 Laporan	psr	581.933.550
3.04.46. 02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	5 Laporan	psr	187.495.000
3.04.46. 04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	41 Laporan	psr	2.188.200.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	100 Hektar		5.541.605.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	150 Hektar	psr	474.150.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	216 Hektar	psr	4.542.105.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	3 Laporan	psr	525.350.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	25000 Bibit		301.375.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit	17500 bibit	psr	301.375.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	6 Unit Usaha		8.437.931.818
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	20 Ha	psr, luarPrv	12.535.185
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	2 Unit Manajemen		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	200 Ha	psr	67.271.633
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	6 Unit Usaha		
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	387.189 Hektar	psr	8.358.125.000
3.04.01.07	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				35.154.564.335
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		1.140.814.560
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.140.814.560
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		1.246.021.400
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	915.435.600
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	330.585.800
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		183.920.800
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	smd	125.250.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	68 Stell	smd	58.670.800
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	3 Unit Usaha		1.789.040.000
3.04.43.04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	2 Laporan	kkr, ktm, btg, smd	181.500.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan	9 Unit/Demplot	kkr, ktm	348.000.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	225 Peserta	kkr, ktm, btg	1.259.540.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	10 Jumlah Usulan		1.314.050.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	10 Laporan	kkr, ktm, btg, smd	629.500.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	4 Laporan	kkr, ktm, btg, smd	684.550.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		13.401.850.000
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	2 Kegiatan	kkr, btg, smd	808.650.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	49 Unit	kkr, ktm, btg, smd	1.069.100.000
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	1510 Unit	kkr, ktm, btg, smd	7.215.950.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah Luas Penaksiran Kebakaran	50 Hektar	kkr, ktm, btg	231.500.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	kkr, ktm, btg, smd	572.000.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	22 Laporan	kkr, ktm, btg, smd	943.150.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	20 Laporan	kkr, ktm, btg	795.025.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah Pendampingan	10 Laporan	kkr, ktm, btg, smd	587.125.000
3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	kkr, ktm, btg	538.400.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Kegiatan	kkr, ktm, btg, smd	640.950.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	2 kasus Tindak Pidana		1.877.000.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	10 Laporan	kkr, btg, smd	447.000.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	10 Laporan	kkr, ktm, smd	256.000.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	22 Laporan	kkr, ktm, btg, smd	1.174.000.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	350 Hektar		5.702.995.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	550 Hektar	ktm, btg	428.050.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	250 Hektar	kkr, ktm, btg, smd	4.865.145.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	15 Laporan	ktm, btg	409.800.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	200000 Bibit		375.500.000
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	jumlah Pembuatan/pengadaan bibit	35000 bibit	kkr, ktm	375.500.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPPh	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	1 Unit Usaha		8.123.372.575

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	60 Ha	kkr, smd	254.073.600
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	11 Unit Manajemen		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	250 Ha	smd	45.150.200
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	1 Unit Usaha		
3.04.51.03	Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	Jumlah Kantor Resort KPH	1 unit	kkr, smd	-
3.04.51.04	Pembangunan Kantor Resort KPH (Dana Pendamping DAK)	Jumlah Kantor Resort KPH	1 unit	kkr, smd	-
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	1217304 Hektar	ktm	7.824.148.775
3.04.01.08	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan				35.329.204.775
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		2.324.333.500
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	2.324.333.500
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		507.137.500
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	155.200.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	351.937.500
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		137.200.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	smd	62.500.000
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	140 Stell	smd	74.700.000
3.04.43	Program Penyaluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	2 Unit Usaha		1.461.193.750
3.04.43.03	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	540 Peserta	smd	-
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan	16 Unit/Demplot	kkr, smd	464.550.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	510 Peserta	kkr	996.643.750
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	5 Jumlah Usulan		3.311.945.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi	10 Laporan	smd	2.714.720.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	11 Laporan	smd	597.225.000
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		13.339.138.025

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	4031 Unit	smd	-
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	18 Kegiatan	smd	1.136.480.000
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	6 Kegiatan	smd	-
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	2 Laporan	smd	-
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	6 Laporan	kkr, smd	-
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	12 Laporan	kkr, smd	-
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Laporan	smd	-
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	8 Dokumen	smd	-
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	11 Kegiatan	smd	397.097.000
3.04.45.11	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah pembentukan regu pertambuan DALKARHUTLA	11 Regu/MPA	smd	-
3.04.45.13	Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Investigasi Sebab-Sebab Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Laporan	kkr	322.890.000
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	40 Unit	kkr, smd	1.650.327.500
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	1472 Unit	kkr, smd	4.692.489.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah Luas Penaksiran Kebakaran	430 Hektar	kkr	251.430.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	kkr	985.977.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	28 Laporan	kkr	1.359.264.225
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	25 Laporan	kkr	891.913.300
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah Pendampingan	11 Laporan	kkr	696.550.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Kegiatan	kkr	954.720.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	5 kasus Tindak Pidana		1.402.520.000
3.04.46.02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	24 Laporan	kkr, smd	462.850.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	27 Laporan	smd	939.670.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	340 Hektar		4.386.262.000
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	400 Hektar	smd	779.831.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	240 Hektar	smd	3.025.126.000
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	4 Laporan	smd	581.305.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	100000 Bibit		836.100.000
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	smd	-
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)	Jumlah bibit yang tersedia	100000 Bibit	kkr	836.100.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	4 Unit Usaha		7.623.375.000
		Percentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	20 Ha	smd	-
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	8 Unit Manajemen		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	200 Ha	kkr, smd	75.950.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	2 Unit Usaha		
3.04.51.05	Pemeliharaan Tanaman (DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	100 Ha	kkr	-
3.04.51.06	Pemeliharaan Tanaman (Dana Pendamping DAK)	Luas Areal Pemeliharaan Tanaman	100 Ha	smd	-
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	1111637.43 Hektar	kkr, smd	7.547.425.000
3.04.01.09	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				34.816.823.695
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		1.191.758.120
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ktm	1.191.758.120
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		843.667.200
3.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	ktm	512.150.000
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	ktm	331.517.200
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		306.459.800
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	ktm, luarPrv	231.800.000
		Jumlah Bulan Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan		
3.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	65 Stell	ktm	74.659.800
3.04.43	Program Penyaluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	5 Unit Usaha		631.170.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.43.02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	5 Laporan	ktm	208.795.000
3.04.43.06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan	4 Laporan	ktm	131.850.000
3.04.43.08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan	2 Unit/Demplot	ktm, smd, luarPrv	93.500.000
3.04.43.09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	60 Peserta	ktm	197.025.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	2 Jumlah Usulan		808.050.000
3.04.44.01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, pendampingan dan Fasilitasi	5 Laporan	ktm	519.900.000
3.04.44.02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	8 Laporan	ktm	288.150.000
3.04.44.03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	4 Laporan	ktm	-
3.04.44.04	Pembinaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	2 Laporan	ktm	-
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		8.099.729.000
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	11 Unit	ktm	-
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	9 Kegiatan	ktm	506.612.500
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	3 Kegiatan	ktm	-
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	3 Laporan	ktm	-
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	6 Laporan	ktm	-
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	12 Laporan	ktm, smd, luarPrv	-
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	4 Dokumen	ktm	-
3.04.45.15	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Unit	ktm, smd, luarPrv	352.607.500
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	11 Unit	ktm, smd, luarPrv	3.643.700.000
3.04.45.17	Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air (DBH SDA DR)	Jumlah Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air	1 Unit	ktm, smd, luarPrv	175.400.000
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah Luas Penaksiran Kebakaran	300 Hektar	ktm	451.005.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Laporan	ktm, smd, luarPrv	489.325.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	12 Laporan	ktr, smd, luarPrv	1.046.295.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	15 Laporan	ktr, smd, luarPrv	1.035.934.000
3.04.45.23	Deteksi Dini (DBH SDA DR)	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	ktr	264.250.000
3.04.45.24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	3 Kegiatan	ktr	134.600.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	4 kasus Tindak Pidana		1.314.170.000
3.04.46.01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	6 Laporan	ktr	327.095.000
3.04.46.04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	4 Laporan	ktr	987.075.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	600 Hektar		13.011.166.775
3.04.47.01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	1260 Hektar	ktr, smd, luarPrv	51.040.000
3.04.47.02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	600 Hektar	ktr	12.699.726.775
3.04.47.03	Monitoring dan Evaluasi	jumlah kegiatan monev	5 laporan	ktr	260.400.000
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat		835.698.000
		Jumlah Bibit	50000 Bibit		
3.04.48.04	Penyediaan Bibit	Jumlah bibit yang tersedia	50000 Bibit	ktr	-
3.04.48.09	Pembuatan/pengadaan bibit (DBH DR)			ktr	835.698.000
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	2 Unit Usaha		7.774.954.800
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51.01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	100 Ha	ktr	95.164.800
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	10 Unit Manajemen		
3.04.51.02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	250 Ha	ktr	95.190.000
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	2 Unit Usaha		
3.04.51.07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	64.72649 Hektar	ktr, luarPrv	7.584.600.000
3.04.01.10	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				53.454.126.215
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	85%		1.943.436.480
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kbr, mah, smd	1.943.436.480
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit		2.030.490.800

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kbr, mah, smd	1.149.050.000
3.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	kbr, mah, smd	881.440.800
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		779.690.800
3.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	kbr, mah, smd, luarPrv	493.390.800
3.04.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	82 Stell	kbr, mah, smd, luarPrv	286.300.000
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	5 Unit Usaha		2.704.695.000
3.04.43. 01	Pendampingan Kegiatan RHL	Jumlah Pendampingan Kegiatan RHL	15 Laporan	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	-
3.04.43. 02	Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)	20 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.43. 04	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah laporan metode dan materi penyuluhan	10 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	291.775.000
3.04.43. 06	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	Jumlah laporan monev kegiatan penyuluhan	40 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	243.840.000
3.04.43. 08	Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan (DBH DR)	Jumlah Pemenuhan kebutuhan sapras penyuluhan kehutanan	34 Unit/Demplot	kbr, mah, smd, luarPrv	938.800.000
3.04.43. 09	Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH DR)	Jumlah Peserta Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	10 Peserta	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	1.230.280.000
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	5 Jumlah Usulan		2.753.480.000
3.04.44. 01	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi	20 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	1.595.680.000
3.04.44. 02	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	22 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	1.157.800.000
3.04.44. 03	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	10 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.44. 04	Pembinaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	11 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Percentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25 %		20.192.003.275

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.45.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	10 Unit	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.45.02	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimbingan Teknis PKHL (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Pelatihan/ Pembekalan/ Inhouse Training/penyegaran/bimbingan teknis PKHL	20 Kegiatan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.45.03	Penetapan Posko Dalkarhut (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Darkarhutla	10 Kegiatan	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	-
3.04.45.04	Penaksiran Luas Kebakaran dan Investigasi Penyebab Kebakaran (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Penaksiran Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan dan Investigasi Penyebab Kebakaran	5 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.45.05	Sosialisasi/Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Pencegahan	50 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.45.06	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Laporan Kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	30 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.45.07	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah laporan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.45.08	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi Areal Bekas Terbakar (DBH SDA DR)	Jumlah dokumen kegiatan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar	5 Dokumen	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.45.09	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Gerakan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	5 Kegiatan	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	-
3.04.45.16	Pengembangan Sarana Prasarana Penanggulangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sarpras Penanggulangan	884 Unit	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	12.243.103.275
3.04.45.18	Penaksiran Luas (DBH SDA DR)	Jumlah Luas Penaksiran Kebakaran	400 Hektar	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	519.880.000
3.04.45.19	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	1.598.400.000
3.04.45.20	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Patroli Pencegahan PKHL	10 Laporan	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	1.920.600.000
3.04.45.21	Pemadaman Langsung (DBH SDA DR)	Jumlah Pemadaman Langsung	10 Laporan	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	1.506.340.000
3.04.45.22	Pendampingan (pembentukan/pembinaan) masyarakat peduli api (DBH SDA DR)	Jumlah Pendampingan	10 Laporan	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	1.806.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.04.45. 24	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Jumlah Kegiatan Penetapan Posko Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Kegiatan	kbr, mah, smd, luarPrv	597.680.000
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	10 kasus Tindak Pidana		6.278.980.000
3.04.46. 01	Sosialisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi	15 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	2.301.800.000
3.04.46. 02	Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	10 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	1.391.000.000
3.04.46. 04	Patroli Pengamanan	Jumlah laporan patroli	20 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	2.586.180.000
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	250 Hektar		1.724.200.000
3.04.47. 01	Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	1000 Hektar	kbr, mah, smd, luarPrv	1.724.200.000
3.04.47. 02	Pelaksanaan	Luas Penanaman	500 Hektar	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.47. 03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	40 Laporan	kbr, mah, smd, luarPrv	-
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	9 Unit Usaha		15.047.149.860
		Persentase kerusakan kawasan hutan yang menurun	1.95 %		
3.04.51. 01	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Luas pengelolaan Wilayah Tertentu (WT) di KPHP	15 Ha	kbr, mah, smd	597.866.400
		Jumlah pembinaan/pemantauan unit manajemen pemegang izin di dalam kawasan KPHP	15 Unit Manajemen		
3.04.51. 02	Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	luas kerusakan hutan dan konflik tenurial di tingkat tapak	10 Ha	kbr, mah, smd	506.023.960
		jumlah unit usaha produktif masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di tingkat tapak	4 Unit Usaha		
3.04.51. 07	Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DBH DR)	Luas Kawasan Hutan yang di kelola	1810377 Hektar	kbr, mah, bpn, smd, luarPrv	13.943.259.500
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				35.210.218.840
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				35.210.218.840
3.05.01. 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				35.210.218.840
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayan PD (SKM)	85%		3.763.943.940

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	3.763.943.940
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		1.430.212.000
3.05.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	32 Unit	smd	741.750.000
3.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	95 Unit	smd	688.462.000
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		1.102.350.000
3.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat konsultasi keluar daerah	12 Kali	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	1.050.350.000
		Jumlah kegiatan rapat/koordinasi/konsultasi ke dalam daerah	26 Kali		
3.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	40 Orang	smd, luarPrv	52.000.000
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 Nilai AKIP		1.117.215.800
3.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	409.015.800
3.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	12 Kali	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, smd, luarPrv	708.200.000
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	989607 KK		1.749.831.100
3.05.37.01	Pembangunan Ketenagalistrikan	Penambahan Desa/Kelurahan berlistrik	2 Desa	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	923.667.350
3.05.37.06	Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang mendapat Rekomendasi teknis	45 Perusahaan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	405.025.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.05.37.07	Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Keselamatan ketenagalistrikan	40 Perusahaan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	421.138.750
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Percentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	67%		998.941.000
3.05.45.01	Pemetaan dan perhitungan Sumberdaya Geologi	Jumlah Inventarisasi dan verifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara, Mineral yang CnC	425 Perusahaan	bru, smd, btg, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	399.091.000
3.05.45.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah Rekomtek	120 Rekomtek	bru, smd, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	279.250.000
		Jumlah sumur yang diawasi	120 Sumur		
3.05.45.03	Pengawasan Mutu dan Muka Air Tanah	Data mutu/muka air tanah	10 Kab/Kota	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	320.600.000
		Sumur Pantau	2 Sumur		
		Peta zona konservasi air tanah	2 CAT		
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	45 Perusahaan		2.007.016.000
3.05.46.01	Pembinaan dan Pengawasaan Teknis Minerba	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	65 Perusahaan	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	690.445.000
3.05.46.02	Pembinaan dan Pengawasaan pengusahaan minerba	Jumlah perusahaan CnC yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20%	35 Perusahaan	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, smd, luarPrv	577.766.000
3.05.46.03	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Minerba	Jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban pembayaran Royalty	80 Perusahaan	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, smd, luarPrv	738.805.000
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT	4.82 %		23.040.709.000
3.05.47.01	Pengembangan dan pemanfaatan Bioenergi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	40 Rumah	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	1.301.125.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.05.47.02	Pengembangan dan Pemanfaatan Aneka Energi	Desa yang dialiri listrik Energi Terbarukan	6 Desa	bru, smd, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	21.450.759.000
3.05.47.03	Konservasi Energi dan Air	Jumlah penyalur BBM bersubsidi	50 penyalur	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	288.825.000
		Jumlah penyalur LPG bersubsidi	50 penyalur		
		Jumlah instansi yang melakukan upaya efisiensi listrik dan air	23 Instansi		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				443.655.176.165
4.01	Kesekretariatan Daerah				254.504.375.417
4.01.03	Sekretariat Daerah				147.195.957.437
4.01.03.01	Biro Umum				89.908.791.717
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	75%		19.970.450.560
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	19.970.450.560
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	2 unit		42.139.153.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	0 Unit	smd	20.992.375.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	21.146.778.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	65%		19.186.771.240
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	45 Kegiatan	smd	18.493.829.030
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi	190 Orang	smd	692.942.210
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	73%		100.425.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	smd	55.425.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	18 Dokumen	smd	45.000.000
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum	12 bulan		2.338.531.700
4.01.30.01	Pelayanan Administrasi Biro	jumlah PNS	190 orang	smd	437.321.400
4.01.30.02	Pengelolaan Arsip dan Dokumen Setda	jumlah arsip in aktif yang dikelola dengan baik	0 Dokumen	smd	303.520.000
		jumlah arsip/dokumen inaktif yang telah ditata dengan baik	4000 dokumen		
4.01.30.03	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Jumlah surat pimpinan yang terdistribusi tepat waktu	1500 Dokumen	smd	440.751.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.30.04	Pengelolaan Admistrasi Keuangan Setda	Jumlah Dokumen Rapergub dan Kepgub yang disusun	2 dokumen	smd	870.054.600
		jumlah laporan rekonsiliasi belanja pegawai	12 dokumen		
		jumlah laporan rekonsiliasi perjadin	12 dokumen		
4.01.30.05	Pelayanan Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Setda	jumlah laporan realisasi anggaran dan register SPM	11 dokumen	smd	286.884.700
		jumlah ASN yang mengikuti di lingkup SETDA	40 orang		
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga	200 buah		6.173.460.217
4.01.40.01	Pengelolaan Barang Aset Setda	Jumlah Gedung Aset Setda Yang Dikelola	8 Gedung	smd	687.500.000
4.01.40.02	Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	jumlah kegiatan pimpinan yang terlaksana dengan baik	95 acara	smd	5.485.960.217
4.01.03.02	Biro Hubungan Masyarakat				20.571.954.560
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	90%		2.079.302.120
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	2.079.302.120
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		964.377.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	11 Unit	smd	856.027.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	11 Bulan	smd	108.350.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		790.250.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	11 Kegiatan	smd	738.250.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	22 Kegiatan	smd	52.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74%		9.250.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	smd	5.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	4 Dokumen	smd	4.250.000
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Jumlah kerjasama Pemerintah Provinsi dengan pihak Pemerintah lainnya dan non Pemerintah yang di fasilitasi	0 laporan		3.888.384.000
		Percentase Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti	90 Persen		
4.01.37.01	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Laporan kerjasama dengan lembaga non perintah	22 Laporan	smd	1.726.959.000
4.01.37.02	Peningkatan dan Pembinaan Admininstrasi Kerjasama	Jumlah Administrasi Kerjasama yang Terdokumentasi	22 Dokumen	smd	602.675.000
4.01.37.03	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Laporan kerjasama antar perintah	22 laporan	smd	1.558.750.000
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Percentase Penurunan Berita Negatif	5 Persen		11.962.789.190
4.01.88.02	Kerjasama media	Jumlah jejaring kehumasan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	smd	646.137.500

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kerjasama media	22 Media Massa		
4.01.88.03	Penyelenggaraan Peliputan dan Publikasi	Jumlah berita positif yang terpublikasi	1100 Berita	smd	10.919.971.190
4.01.88.04	Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah pengumpulan dan penyediaan data dan informasi	24 Laporan	smd	396.680.500
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan	90%		877.602.250
4.01.90.03	Pelayanan Tamu dan Pimpinan Keprotokolan	Jumlah Tamu Pemda	99 Instansi	smd	311.464.750
4.01.90.04	Penatacaraan kegiatan Pemda	Jumlah Kepenataacaraan kegiatan pemda yang terjadwalkan	110 Kegiatan	smd	566.137.500
4.01.03.03	Biro Hukum				3.893.802.120
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Administrasi Perkantoran	0%		539.145.120
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%		
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	539.145.120
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	90%		29.075.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang diadakan	0 Unit	smd	1.700.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	27.375.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90%		274.750.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	smd	274.750.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	5 Jumlah	smd	-
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	95%		8.250.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	smd	6.050.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Anggaran	10 Dokumen	smd	2.200.000
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapainya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	80%		364.075.000
4.01.26.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	20 Jumlah	smd	364.075.000
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Persentase rancangan peraturan yang menjadi produk hukum	80%		504.000.000
4.01.28.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	600 Jumlah	smd	504.000.000
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Informasi Hukum yang terdokumentasi dengan baik	87%		269.957.000
4.01.29.01	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyebar Luasan Publikasi Informasi Hukum	600 Jumlah	smd	269.957.000
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan produk	83%		461.500.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.32. 01	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	250 Jumlah	smd	461.500.000
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase Perkara/Kasus Sengketa Pemerintah Provinsi yang terselesaikan tepat waktu	78%		1.007.800.000
4.01.33. 01	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Advice dan pertimbangan hukum Penyelesaian Sengketa yang diberikan kepada OPD/Masyarakat dengan cepat dan sesuai aturan yang berlaku	10%	smd	702.700.000
4.01.33. 02	Peningkatan Penyelesaian Sengketa	Terpenuhinya Kepuasan masyarakat terhadap Kepastian Hukum, penyelesaian Perkara dengan cepat	73%	smd	305.100.000
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya sadar hukum Aparatur dan Masyarakat	80%		435.250.000
4.01.36. 01	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Pembinaan Kab/Kota Peduli HAM dan Sadar akan Hukum dan HAM	80%	smd	435.250.000
4.01.03. 04	Biro Organisasi				5.727.627.700
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	90%		350.179.400
4.01.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	0 Bulan	smd, luarPrv	350.179.400
		Laporan Administrasi Perkantoran	23 Laporan		
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		245.450.000
4.01.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	0 Unit	smd, luarPrv	224.850.000
4.01.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	0 Unit	smd	20.600.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		183.654.000
4.01.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi yang telah dilakukan	1 Laporan	smd, luarPrv	128.654.000
4.01.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis/diklat	0 Orang	smd, luarPrv	55.000.000
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	61%		576.052.300
4.01.42. 03	Penerapan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey yang direviu	1 Laporan	smd, luarPrv	273.495.000
4.01.42. 04	Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik	Jumlah Nominasi	3 Nominasi	smd, luarPrv	302.557.300
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	100%		203.100.000
4.01.51. 01	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Setda	1 Dokumen	smd, luarPrv	203.100.000
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	70.5 Skor		1.225.117.000
4.01.53. 01	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	smd, luarPrv	1.068.880.000
4.01.53. 02	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang difasilitasi pembentukan kelompok Budaya Kerja	38 PD	smd, luarPrv	156.237.000
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK)	75%		1.055.075.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.60.01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang terfasilitasi pelaksanaan SAKIP	38 PD	smd, luarPrv	1.055.075.000
4.01.80	Program Penguatan Kelembagaan	Prosentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	90%		1.638.250.000
4.01.80.05	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi/evaluasi kelembagaan	38 PD	smd, luarPrv	768.545.000
4.01.80.07	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penguatan kelembagaan	10 Kab/Kota	smd, luarPrv	373.080.000
4.01.80.08	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun	1 Dokumen	smd, luarPrv	496.625.000
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Percentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	68.42 %		250.750.000
4.01.81.02	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah SOP Perangkat Daerah yang diverifikasi	2080 SOP	smd, luarPrv	250.750.000
4.01.03.05	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah				6.431.640.160
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	75%		474.120.320
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	474.120.320
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit		59.400.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	2 Unit	smd	44.900.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	2 Unit	smd	14.500.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%		691.318.790
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja makanan dan minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Bimtek	12 Bulan	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	557.518.790
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kontribusi BIMTEK	2 Kegiatan	smd	133.800.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%		4.650.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	2 Dokumen	smd	3.600.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	1 Dokumen	smd	1.050.000
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1 Dokumen		450.462.500
4.01.16.16	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota	Laporan kedinasan pejabat negara	1 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	450.462.500
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya kepastian Hukum Batas, Daerah Otonomi Baru dan Teridentifikasi serta pemberian/pembakuan Nama Rupabumi	100%		587.050.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.27.04	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya proses pembentukan daerah persiapan	2 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	165.200.000
4.01.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan nama Rupabumi di wilayah Kaltim	1 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	136.300.000
4.01.27.11	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah penegasan Batas Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota Se Kalimantan timur secara jelas dan pasti	5 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	285.550.000
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan, Kebijaksanaan Pertanahan dan Kamtibmas di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	100%		2.184.222.000
4.01.31.04	Penataan Masalah Pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan Kebijakan Pertanahan, laporan Koordinasi Pertanahan	1 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	549.750.000
4.01.31.05	Pembinaan Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi kalimantan Timur	1 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	1.634.472.000
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaran Otonomi Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Otda	1 Dokumen		1.433.510.300
4.01.34.10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Laporan Koordinasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	1.433.510.300
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		546.906.250
4.01.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen/Laporan	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	546.906.250
4.01.03.06	Biro Kesejahteraan Rakyat				7.979.164.600
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	75%		828.279.200
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd, luarPrv	828.279.200
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	2 unit		182.400.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	20 Unit	smd	99.500.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	82.900.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		477.500.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 Kegiatan	smd, luarPrv	477.500.000
		Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring ke dalam daerah	40 Kegiatan		
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 bulan		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	10 Orang	smd, luarPrv	-
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	73%		52.210.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd	12.760.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	14 Dokumen	smd	39.450.000
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti	85%		1.449.000.000
4.01.17.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang keagamaan	14 Dokumen	smd, luarPrv	1.020.000.000
4.01.17.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kesehatan	14 Dokumen	smd, luarPrv	429.000.000
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	85 Persen		1.001.000.000
4.01.18.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Pendidikan dan Kebudayaan	14 Dokumen	smd, luarPrv	644.200.000
4.01.18.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kepemudaan dan Olahraga	14 Dokumen	smd, luarPrv	204.300.000
4.01.18.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Perpustakaan dan Kearsipan	14 Dokumen	smd, luarPrv	152.500.000
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85 Persen		999.625.400
4.01.19.01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang kesejahteraan sosial	14 Dokumen	smd, luarPrv	344.510.600
4.01.19.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang tenaga kerja dan transmigrasi	14 Dokumen	smd, luarPrv	197.800.000
4.01.19.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak	14 Dokumen	smd, luarPrv	457.314.800

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase hibah bansos yang tepat sasaran	100%		2.989.150.000
4.01.79.01	Pelayanan Administrasi Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Dokumen Hibah dan Bantuan Sosial yang tersusun	4 Dokumen	smd, luarPrv	2.841.700.000
4.01.79.02	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	smd, luarPrv	104.450.000
4.01.79.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	smd, luarPrv	43.000.000
4.01.03.07	Biro Perekonominian				2.417.188.320
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya Administrasi Perkantoran	100%		620.088.320
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	620.088.320
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%		18.307.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang diadakan	9 Unit	smd	2.500.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	9 Unit	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	15.807.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%		458.643.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kegiatan	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	458.643.000
		jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 kegiatan		
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 bulan		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	100%		-
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	smd	-
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Persentase kebijakan pengembangan bidang produksi daerah yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%		382.750.000
4.01.48.01	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Pertanian	jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi pertanian dalam arti luas	3 kali	smd	144.000.000
4.01.48.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan	1 kali	smd	53.000.000
4.01.48.03	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Kehutanan dan Perkebunan	jumlah koordinasi pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan	2 kali	smd	165.091.481
4.01.48.04	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup	1 kali	smd	20.658.519

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Persentase kebijakan peningkatan investasi daerah dan kinerja BUMD yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%		491.650.000
4.01.49.01	Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan Daerah	Jumlah kebijakan penanaman modal, perizinan dan non perizinan daerah	1 kebijakan	smd	175.000.000
4.01.49.03	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan	7 kali	smd	204.550.000
4.01.49.04	Koordinasi Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	Bahan Promosi Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah	1 Dokumen	smd	112.100.000
4.01.50	Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa	Persentase Kebijakan Bidang Industri dan Jasa ditindaklanjuti/terlaksana	100%		445.750.000
4.01.50.01	Peningkatan Sinergi Kebijakan Perekonomian Daerah	Hasil Rakor yang ditindaklanjuti menjadi Surat Edaran/SK (Kebijakan)	3 Dokumen	smd	258.000.000
4.01.50.02	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pariwisata dan Perhotelan	Koordinasi bidang pariwisata dan perhotelan	2 kali	smd	94.000.000
4.01.50.03	Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Bidang Koperasi dan UKM	Jumlah koordinasi dan pembinaan koperasi	2 kali	smd	93.750.000
4.01.03.08	Biro Administrasi Pembangunan				6.321.564.760
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	75%		1.110.735.720
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	1.110.735.720
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit		202.900.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	30 Unit	smd	19.500.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kendaraan, alat kantor	8 Unit	smd	183.400.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%		53.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	130 kegiatan	smd	53.000.000
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	10 Orang	smd	-
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%		11.250.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen perencanaan dan anggaran	8 Dokumen	smd	7.150.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	smd	4.100.000
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase layanan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	80%		2.117.762.400
4.01.25.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan yang dilayani	421 Pengadaan	smd	681.300.000
		Jumlah pengadaan langsung yang dilayani	700 Pengadaan		
4.01.25.02	Evaluasi dan Pembinaan SDM Pengadaan	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan/ peningkatan kapasitas	30 orang	smd	356.750.000
4.01.25.03	Pengembangan dan Layanan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah pengadaan elektronik yang dilayani	421 paket	smd	1.079.712.400

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase permasalahan program/kegiatan yang ditindaklanjuti	70%		1.619.250.000
4.01.46.01	Monitoring dan Evaluasi APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	smd	503.800.000
4.01.46.02	Monitoring dan Evaluasi Sektoral	Dokumen monitoring dan evaluasi APBN dan Sektoral	1 Dokumen	smd	702.000.000
4.01.46.03	Administrasi dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi pelaporan pembangunan	3 dokumen	smd	413.450.000
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan	90%		1.206.666.640
4.01.47.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	Dokumen Rakor Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	smd	17.721.640
4.01.47.02	Perencanaan dan Pengendalian Program	Petunjuk teknis Rencana kerja anggaran Prov. Kaltim yang disusun	1 Dokumen	bru, ktm, bpn, btg, smd, luarPrv	627.525.000
		Rencana Kerja Anggaran yang diasistensi dalam 1 tahun	46 RKA		
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran pergeseran yang difasilitasi	2 Dokumen		
4.01.47.03	Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan	Dokumen perencanaan Setda	2 Dokumen	smd	561.420.000
4.01.03.09	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya				3.944.223.500
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	90%		480.275.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	480.275.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		20.000.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	1 Unit	smd	-
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan / Kelengkapan Kantor yang dipelihara	3 Unit	smd	20.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		609.500.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi yang telah dilakukan	14 Laporan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	609.500.000
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/terlaksana	80%		1.357.545.000
4.01.67.01	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan	1 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	146.070.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.67.02	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum	1 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	425.225.000
4.01.67.03	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	786.250.000
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/ terlaksana	80%		701.187.500
4.01.68.02	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	1 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	173.500.000
4.01.68.03	Koordinasi Pengembangan Kawasan	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan	1 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	340.687.500
4.01.68.04	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	Dokumen hasil Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	1 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	187.000.000
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti/terlaksana	80%		775.716.000
4.01.69.01	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi	Dokumen hasil koordinasi kebijakan pengembangan energi	1 Dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	294.191.000
4.01.69.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Dokumen hasil koordinasi kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, smd	481.525.000
4.01.04	Sekretariat DPRD				99.641.248.160
4.01.04.01	Sekretariat DPRD Provinsi				99.641.248.160

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%		23.850.869.735
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	23.850.869.735
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit		16.941.051.738
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan yang tersedia	300 Unit	smd	1.886.795.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	11.872.756.738
4.01.08.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12 bulan	smd	3.181.500.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	72%		8.120.644.427
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	12 bulan	smd	6.532.946.527
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dan Anggota yang mengikuti pelatihan	100 Orang	smd	1.587.697.900
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%		1.901.136.775
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	9 Dokumen	smd	703.667.042
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	21 dokumen	smd	577.369.733
4.01.12.03	Penyusunan dan verifikasi laporan pelaksanaan anggaran	jumlah verifikasi laporan	12 laporan	smd	620.100.000
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Percentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP	77%		48.827.545.485
4.01.15.02	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang tersusun	10 Dokumen	smd	1.743.858.000
4.01.15.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses Anggota DPRD	3 kali	kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	14.827.593.473
4.01.15.09	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang dikaji	4 Kasus	smd	-
4.01.15.10	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah kasus Hukum yang diadvokasi	1 kasus	smd	-
4.01.15.15	Pelayanan Acara-acara Persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	Jumlah acara-acara persidangan dan Kehumasan Sekretariat DPRD yang terselenggara dengan baik	850 Kali	smd	4.619.994.012
4.01.15.16	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan	224 Kali	smd	27.636.100.000
4.01.05	Badan Penghubung Provinsi				7.667.169.820
4.01.05.01	Badan Penghubung Provinsi				7.667.169.820
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	75%		4.226.200.320
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	4.226.200.320

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	75%		
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	2 unit		1.963.469.500
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	10 Jenis	smd	828.969.500
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	2 Unit		
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	1.134.500.000
		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	2 Unit		
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%		786.200.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	42 Kegiatan	smd	397.800.000
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%		
4.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	50 Orang	smd	388.400.000
		Jumlah pakaian dinas	240 Stel		
		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66%		142.700.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	smd	40.350.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66 Nilai		
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Laporan	smd	102.350.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66 Nilai		
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey	250 Orang		227.525.000
4.01.38.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Jumlah laporan kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	15 Laporan	smd	118.275.000
		Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey kepuasan	250 Orang		
4.01.38.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Jumlah laporan kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta	0 Laporan	smd	-
		Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey kepuasan	250 Orang		
4.01.38.04	Propaganda penerangan	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan	1 Laporan	smd	109.250.000
		Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey kepuasan	250 Orang		
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	80%		321.075.000
4.01.39.01	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Banyaknya pejabat daerah/pusat yang difasilitasi	40 Kali	smd	216.745.000
		Jumlah laporan kegiatan sosial kemasyarakatan	0 Laporan		
		Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	80%		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.01.39.02	Pelayanan mess	Jumlah pengunjung mess yang mengisi form survey kepuasan	600 Orang	smd	104.330.000
4.02	Pengawasan				10.371.176.280
4.02.01	Inspektorat				10.371.176.280
4.02.01.01	Inspektorat				10.371.176.280
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		1.726.982.560
4.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 bulan	smd	1.726.982.560
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	2 unit		967.631.000
4.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	2 unit	smd	742.931.000
4.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terpilihara	10 unit	smd	224.700.000
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	85%		878.651.900
4.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda yang dilaksanakan	60 Kegiatan	smd	373.939.900
4.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kapasitas Sumber Daya Aparatur	65 orang	smd	504.712.000
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	78 Skor		176.975.000
4.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	9 dokumen	smd	176.975.000
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah		222.605.000
4.02.97.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	smd	222.605.000
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	13 laporan		147.105.000
4.02.98.02	Reviu atas laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Keuangan yang diterbitkan.	13 Laporan	smd	147.105.000
4.02.99	Program pencegahan KKN	Terwujudnya Pencegahan KKN	10 Kegiatan		1.416.454.100
4.02.99.04	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/investigasi yang diterbitkan	20 Laporan	smd	267.945.000
4.02.99.05	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	5 perangkat daerah	smd	89.685.000
4.02.99.06	Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan	4 kegiatan	smd	52.700.000
4.02.99.07	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	25 Laporan	smd	-
4.02.99.08	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan WBS dan Benturan Kepentingan yang ditangani	5 Laporan	smd	15.000.000
4.02.99.09	Monev LHKPN dan LHKASN	Jumlah kegiatan Monev LHKPN dan LHKASN yang dilaksanakan	1 Kegiatan	smd	49.324.100

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.02.99.10	Koordinasi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Jumlah kegiatan koordinasi TP4D, APIP dan APH yang dilaksanakan	4 Kegiatan	smd	250.500.000
4.02.99.11	Operasional SABERPUNGLI	Jumlah kegiatan operasional Saberpungli yang dilaksanakan	4 Kegiatan	smd	525.750.000
4.02.99.12	Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan survey penilaian integritas yang dilaksanakan	1 Kegiatan	smd	165.550.000
4.02.99.13	Pembangunan Budaya Integritas	Jumlah kegiatan budaya integritas yang dilaksanakan	2 kegiatan	smd	-
4.02.10 0	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	55 orang		1.168.543.100
4.02.10 0.01	Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri	12 Kegiatan	smd	120.600.000
4.02.10 0.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	smd	665.847.500
4.02.10 0.03	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	2 Kegiatan	smd	382.095.600
4.02.10 1	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota	10 Kegiatan		2.539.380.000
4.02.10 1.01	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	smd	480.025.000
4.02.10 1.02	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang diterbitkan	8 laporan	smd	164.125.000
4.02.10 1.03	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan.	12 Laporan	smd	366.600.000
4.02.10 1.04	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil reviu, monitoring dan evaluasi pengawasan yang diterbitkan	8 Laporan	smd	1.176.605.000
4.02.10 1.05	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah kegiatan Monev tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	smd	249.850.000
4.02.10 1.06	Pemberian Advis dan Konsultasi	Jumlah advis dan konsultasi yang dilaksanakan.	20 Laporan	smd	40.500.000
4.02.10 1.07	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	smd	61.675.000
4.02.10 2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemda Kab/Kota	10 Kegiatan		1.126.848.620
4.02.10 2.01	Evaluasi EKPPD Kab/kota	Jumlah Laporan Hasil EKPPD Pemda Kab/Kota yang diterbitkan	10 Laporan	smd	619.766.000
4.02.10 2.02	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang diterbitkan	10 Laporan	smd	320.710.000
4.02.10 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemda Lab/Kota yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	smd	186.372.620
4.03	Perencanaan				30.308.766.930
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				30.308.766.930
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				30.308.766.930
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya administrasi perkantoran	100 Persen		6.594.751.430
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	70 Jumlah Instansi/Lemb agai	smd	6.594.751.430
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen		5.112.652.800

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.03.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	172 unit	smd	967.256.000
4.03.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	smd	4.145.396.800
		Jumlah Aset Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi yang Baik	126 Unit		
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90 Persen		2.003.937.500
4.03.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	12 Bulan	smd	1.773.987.500
		Jumlah Rapat Koordinasi	40 Rapat		
4.03.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	40 Orang	smd	229.950.000
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80 Persen		4.832.950.000
4.03.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	smd	375.950.000
4.03.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	smd	589.500.000
4.03.10. 03	Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawalan Percepatan Pembangunan	5 Dokumen	smd	3.867.500.000
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	90 Persen		1.541.400.000
4.03.30. 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RAD Pangan Dana Gizi (RAD-PG)	5 Laporan	smd	741.300.000
		Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	4 Laporan		
4.03.30. 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	smd	413.500.000
		Jumlah laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 Laporan		
4.03.30. 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	smd	386.600.000
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				2.070.600.000
4.03.42. 01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan APBD/APBN. Laporan TPRA dan LKPJ	3 Dokumen	smd	1.172.100.000
4.03.42. 03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 Laporan	smd	898.500.000
		Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen		
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya				2.102.400.200
4.03.46. 01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	smd	668.000.100

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan		
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan sosial	1 laporan	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	559.000.100
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 Laporan		
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	smd	875.400.000
		Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan		
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah				2.349.675.000
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	smd, luarPrv	947.200.000
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1 Laporan	bru, smd, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	711.274.900
		Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Dokumen		
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	1 Laporan	smd, luarPrv	691.200.100
		Profil Pembangunan Bidang Kecepatakaryaan, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman	1 Laporan		
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.588.450.000
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	3 Laporan	smd	167.264.000
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	3 Dokumen	smd	1.854.144.700
4.03.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD)	2 dokumen	smd	348.853.700
4.03.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang Diverifikasi/Evaluasi	112 dokumen	smd	218.187.600
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah				1.111.950.000
4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan	14 Dokumen	smd	457.750.000
4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik	200 IGT	smd	654.200.000
4.04	Keuangan				100.784.649.238
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				65.205.606.898

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.04.01. 01	Badan Pendapatan Daerah				35.345.798.960
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		5.240.317.260
4.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru, kbr, kkr, ktm, psr, ppu, bpn, btg, smd	5.240.317.260
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		14.880.105.200
4.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	8 Jenis	smd	13.125.587.400
4.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11 Jenis	smd	1.754.517.800
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	63%		1.883.955.000
4.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	45 Koordinasi / Konsultasi	smd	1.665.605.000
4.04.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 PNS	smd	218.350.000
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	325 Stel		
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68 nilai AKIP		829.521.000
4.04.10. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	smd	99.021.000
4.04.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5 Dokumen / Laporan	smd	730.500.000
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%		4.262.510.500
4.04.31. 01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	60000000000 Rupiah	smd	785.665.250
4.04.31. 02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	82400000000 0 Rupiah	smd	1.865.675.500
		Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	85600000000 0 Rupiah		
4.04.31. 03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	29960000000 00 Rupiah	smd	1.611.169.750
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	12000000000 Rupiah		
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	16050000000 0 Rupiah		
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100%		801.525.000
4.04.32. 01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	33620185000 Rupiah	smd	376.950.000
4.04.32. 02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22711200000 0 Rupiah	smd	166.375.000
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	78592400000 0 Rupiah		
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	12420000000 Rupiah		
4.04.32. 03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	30077200000 00 Rupiah	smd	258.200.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah realisasi DAU	81569400000 0 Rupiah		
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18 Dokumen		636.870.000
4.04.33. 02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan	3 Jenis Pendapatan	smd	286.550.000
4.04.33. 03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan	5 Dokumen Peraturan	smd	350.320.000
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	4 Obyek		6.810.995.000
4.04.35. 01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru	4 Sumber	smd	4.264.125.000
4.04.35. 02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	2 Kajian	smd	2.546.870.000
4.04.01. 02	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				5.384.772.018
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		3.754.854.000
4.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	3.754.854.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		1.201.868.018
4.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	13 unit/Jenis	smd	209.300.000
4.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	smd	992.568.018
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		117.800.000
4.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5 Koordinasi / Konsultasi	smd	117.800.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	100%		310.250.000
4.04.34. 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	5000000000 Rupiah	smd	41.400.000
4.04.34. 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	42000000000 0 Rupiah	smd	268.850.000
4.04.01. 03	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				4.459.178.240
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		2.970.964.240
4.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kkr	2.970.964.240
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		938.554.000
4.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	21 unit/Jenis	kkr	92.000.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 Jenis	kkr	846.554.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		115.800.000
4.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	kkr	115.800.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	100%		433.860.000
4.04.34. 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar	2000000000 Rupiah	kkr	200.740.000
4.04.34. 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kukar	22100000000 0 Rupiah	kkr	233.120.000
4.04.01. 04	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				2.659.934.880
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		1.408.662.800
4.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ktm	1.408.662.800
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		586.322.080
4.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	12 unit/Jenis	ktm	87.754.000
4.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 Jenis	ktm	498.568.080
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		113.250.000
4.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5 Koordinasi / Konsultasi	ktm	113.250.000
4.04.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 PNS	ktm	-
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	100%		551.700.000
4.04.34. 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim	4000000000 Rupiah	ktm	43.750.000
4.04.34. 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutim	10700000000 0 Rupiah	ktm	507.950.000
4.04.01. 05	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				2.587.310.640
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		1.724.860.640
4.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	kbr	1.724.860.640
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		342.500.000
4.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	10 unit/Jenis	kbr	86.200.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	kbr	256.300.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		215.800.000
4.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	kbr	215.800.000
4.04.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	56 Stel	kbr	-
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar	100%		304.150.000
4.04.34. 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar	750000000 Rupiah	kbr	77.100.000
4.04.34. 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kubar	47500000000 Rupiah	kbr	227.050.000
4.04.01. 06	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				4.255.302.720
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		2.791.786.620
4.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bpn	2.791.786.620
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		854.216.100
4.04.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13 Jenis	bpm	276.616.000
4.04.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11 Jenis	bpm	577.600.100
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		187.500.000
4.04.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	bpm	187.500.000
4.04.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 PNS	bpm	-
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	93 Stel		
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	100%		421.800.000
4.04.34. 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB se - Kaltim	5000000000 Rupiah	bpm	84.600.000
4.04.34. 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	45000000000 0 Rupiah	bpm	337.200.000
4.04.01. 07	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				2.261.071.440
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		1.169.541.440
4.04.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	btg	1.169.541.440

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		437.730.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	10 unit/Jenis	btg	131.510.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8 Jenis	btg	306.220.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		209.900.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10 Koordinasi / Konsultasi	btg	209.900.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	6 PNS	btg	-
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44 Stel		
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	100%		443.900.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	4000000000 Rupiah	btg	107.300.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	7000000000 Rupiah	btg	336.600.000
4.04.01.08	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				2.443.938.160
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		1.208.158.160
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	ppu	1.208.158.160
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		599.730.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10 Jenis	ppu	100.530.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	ppu	499.200.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		249.300.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	6 Koordinasi / Konsultasi	ppu	249.300.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	100%		386.750.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	500000000 Rupiah	ppu	98.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	40000000000 Rupiah	ppu	288.750.000
4.04.01.09	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				3.151.221.840
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		1.359.401.840
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	psr	1.359.401.840

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		981.720.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10 Jenis	psr	489.450.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	psr	492.270.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		231.200.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	12 Koordinasi / Konsultasi	psr	231.200.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser	100%		578.900.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	1000000000 Rupiah	psr	104.500.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	70000000000 Rupiah	psr	474.400.000
4.04.01.10	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				2.657.078.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87%		1.227.118.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	bru	1.227.118.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		802.260.000
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10 Jenis	bru	367.002.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10 Jenis	bru	435.258.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%		271.550.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	13 Koordinasi / Konsultasi	bru	271.550.000
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4 PNS	bru	-
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	100%		356.150.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	1000000000 Rupiah	bru	61.000.000
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68000000000 Rupiah	bru	295.150.000
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				35.579.042.340
4.04.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				35.579.042.340
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%		6.540.449.180

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	15 dokumen	smd	6.540.449.180
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80%		2.106.044.750
4.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	27 unit	smd	1.824.344.750
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana	38 Unit	smd	281.700.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Percentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%		2.540.347.860
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	105 orang	bru, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	1.829.547.860
4.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	105 orang	smd	710.800.000
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Percentase anggaran belanja Program/Kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah	80%		18.466.035.250
4.04.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Penyusunan Analisa Standar Belanja	1 dokumen	smd	289.300.000
4.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah APBD	2 dokumen	smd	1.647.500.000
4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	2 pergub	smd	1.402.308.000
4.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6 dokumen	smd	579.266.000
4.04.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	smd	656.800.000
4.04.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	3 dokumen	smd	530.500.000
4.04.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah sistem informasi manajemen keuangan daerah	3 dokumen	smd	702.600.000
4.04.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Jumlah rekonsiliasi keuangan daerah	12 dokumen	smd	835.000.000
4.04.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	Jumlah belanja hibah, bantuan sosial dan penyertaan modal	500 dokumen	smd	801.600.000
4.04.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	12 dokumen	smd	1.207.275.000
4.04.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	282 dokumen	smd	270.600.000
4.04.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Jumlah pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	10000 Berkas	smd	1.031.600.000
4.04.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	Jumlah Pengelolaan Perbendaharaan	10000 Berkas	smd	1.713.737.500
4.04.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Jumlah bantuan keuangan kepada kabupaten/kota	12 dokumen	smd	949.300.000
4.04.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah aset yang dilakukan pemanfaatan BMD dan penilaian pemanfaatan BMD	6 dokumen	smd	694.900.000
4.04.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelayanan publik terlayani melalui sistem informasi teknologi	1 dokumen	smd	2.991.700.000

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.04.17. 44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	Jumlah buku standarisasi harga dan kebutuhan BMD	50 dokumen	bru, smd, btg, bpn, ppu, psr, mah, ktm, kkr, kbr, luarPrv	574.700.000
4.04.17. 46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan BUMD dan BLUD	12 dokumen	smd	924.848.750
4.04.17. 47	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	0 Dokumen	smd	662.500.000
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Percentase belanja program/kegiatan dalam Dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi	80%		1.886.437.500
4.04.18. 01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Jumlah terevaluasinya rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	20 dokumen	smd	332.500.000
4.04.18. 02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Jumlah Terevaluasinya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota	20 dokumen	smd	299.500.000
4.04.18. 07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah terevaluasinya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 dokumen	smd	127.500.000
4.04.18. 08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Jumlah terevaluasinya rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kabupaten/Kota	10 dokumen	smd	132.500.000
4.04.18. 09	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah terbinanya fasilitas APBD Kabupaten/Kota	10 dokumen	smd	440.250.000
4.04.18. 11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Jumlah dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi	12 dokumen	smd	554.187.500
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Percentase aset tetap (Tanah dan Bangunan) Daerah yang diamankan dan dimanfaatkan	80%		4.039.727.800
4.04.22. 01	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Pengamanan dan Persertifikatan Barang Milik Daerah	1 dokumen	smd	2.077.050.000
4.04.22. 04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Jumlah Prasarana fisik pemerintah yang direhab/diperbaiki/dipelihara	1 dokumen	smd	807.527.800
4.04.22. 05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyesunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah aset yang telah dihapuskan, dinilai dan Pergub tentang aset	5 dokumen	smd	1.155.150.000
4.05	Kepegawaian				24.321.478.740
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah				20.889.860.540
4.05.01. 01	Badan Kepegawaian Daerah				20.889.860.540
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		2.077.418.190
4.05.07. 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	smd	2.077.418.190
		Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun yang terselesaikan	2 Laporan		
		Jumlah GU/LS/TUP yang diselesaikan	200 Dokumen		
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit		1.564.749.224

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.05.08. 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	38 Unit	smd	479.284.000
4.05.08. 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	smd	1.085.465.224
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	11%		1.106.232.440
4.05.09. 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55 kegiatan	bpn, smd, luarPrv	562.142.500
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80 kegiatan		
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	12 bulan		
4.05.09. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional	17 PNS	smd	137.714.000
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0 Stel		
4.05.09. 03	Sinkronisasi dan Pemantapan ASN	Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	2 Laporan	bpn, smd, luarPrv	406.375.940
		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kepegawaian	1 Laporan		
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	76 Nilai		319.948.410
4.05.10. 01	Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan	2 Dokumen	smd	77.498.000
		Jumlah Dokumen DPA dan DPA Perubahan	2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra	2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 Dokumen		
		Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja	21 Dokumen		
4.05.10. 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja	4 Laporan	bpn, smd, luarPrv	242.450.410
		Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan	12 Laporan		
		Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim	81 Nilai		
		Jumlah Dokumen LPPD	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja	19 Dokumen		
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang dimutasi sesuai dengan job description	89%		1.425.270.750
4.05.15. 01	Administrasi Kepangkatan PNS	Jumlah Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) PNS	1144 PNS	bpn, smd, luarPrv	381.766.000
		Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol.IV/b kebawah	715 PNS		
		Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS Provinsi Gol.IV/c ke atas	18 PNS		
		Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/Kota Gol.IV/b ke bawah	880 PNS		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS Kab/Kota Gol.IV/c ke atas	70 PNS		
4.05.15.02	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah PNS yang Melaksanakan Ujian Dinas	0 PNS	bpn, smd, luarPrv	891.015.000
		Jumlah PNS yang melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah	30 PNS		
		Jumlah dokumen dalam rangka seleksi CPNS	1 Dokumen		
		Jumlah CPNS menjadi PNS	286 PNS		
		Jumlah PNS yang melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji PNS	286 PNS		
		Jumlah pengadaan CPNS dari sekolah kedinasan (IPDN)	3 CPNS		
4.05.15.03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	60 PNS	bpn, smd, luarPrv	152.489.750
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim	50 PNS		
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim	60 PNS		
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim	20 PNS		
		Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim	30 PNS		
		Jumlah PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	50 PNS		
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Percentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan	75%		6.241.676.750
4.05.16.01	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama	15 PNS	bpn, smd, luarPrv	252.923.750
		Jumlah PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional	8 PNS		
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari Jabatan lain	1 PNS		
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing	4 PNS		
		Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui promosi	80 PNS		
		Jumlah Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Fungsional	12 PNS		
4.05.16.02	Peningkatan Kualitas Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi pegawai	325 PNS	bpn, smd, luarPrv	4.799.243.000
		Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	50 PNS		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya	200 PNS		
		Jumlah PNS yang melaksanakan Ijin Belajar	30 PNS		
4.05.16. 03	Pengembangan Karier Pegawai	Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	11 PNS	bpn, smd, luarPrv	1.189.510.000
		Persentase PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	88.5 %		
		Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Administrator	40 PNS		
		Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pengawas	66 PNS		
		Jumlah PNS yang direkomendasikan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kab/Kota	2 PNS		
		Jumlah PNS Kab/Kota yang direkomendasikan untuk menduduki Jabatan Struktural yang menangani Administrasi Kependudukan	13 PNS		
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS berkinerja baik	82%		7.486.184.776
4.05.17. 01	Penegakan Kode Etik, Perilaku dan Disiplin Pegawai	Jumlah Penanganan Kasus yang ditangani	52 PNS	bpn, smd, luarPrv	468.167.100
		Jumlah Cuti PNS	310 PNS		
		Jumlah PNS yang diberhentikan/pensiun	330 PNS		
		Persentase Tingkat Kehadiran PNS	98%		
4.05.17. 02	Penilaian Kinerja dan Penghargaan PNS	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80%	82%	bpn, smd, luarPrv	7.018.017.676
		Jumlah PNS yang mendapatkan KGB	1500 PNS		
		Jumlah PNS yang menerima SLKS	1000 PNS		
		Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling	433 PNS		
		Jumlah PNS yang melaksanakan tes kesehatan (Tes Urine)	6325 PNS		
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Tersedianya Data Kepegawaian yang terupdate/terbarukan	94%		668.380.000
4.05.18. 01	Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai	Jumlah Update Data Kepegawaian melalui SIMPEG	5500 Data PNS	bpn, smd, luarPrv	174.000.000
		Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	6 Aplikasi		
4.05.18. 02	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah karis/karsu yang diproses	360 Kartu	kbr, kkr, ktm, bpn, smd, luarPrv	494.380.000
		Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian	1200 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Kepegawaian yang ter update	3000 Dokumen PNS		
		Jumlah Karpeg yang diproses	300 Kartu		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.05.02	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				3.431.618.200
4.05.02.01	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				3.431.618.200
4.01.41	Program Kegiatan KORPRI	Terlaksananya Progam dan Kegiatan KORPRI	95%		1.550.037.500
4.01.41.06	Pembinaan olah raga, seni dan budaya	Kegiatan Olahraga Seni dan Budaya Anggota KORPRI	12 Kegiatan	smd	308.362.500
4.01.41.07	Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan keluarganya	Kegiatan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI	12 Paket	smd	161.125.000
4.01.41.12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS	Tersedianya jaminan kesehatan	12 Tahun	smd	-
4.01.41.13	Pelaksanaan Musyawarah Rakerja, Rakerja dan Rakor DP KORPRI	Kegiatan Musyawarah Rakerja, Rakor DP KORPRI	4 Kegiatan	smd	88.050.000
4.01.41.14	Pelaksanaan BP BAPOR KORPRI	Kegiatan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	7 Kegiatan	smd	865.000.000
4.01.41.15	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan bagi ASN/Anggota KORPRI dan Keluarganya	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan	2 Kegiatan	smd	127.500.000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.459.583.800
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksana administrasi perkantoran	12 Bulan	smd	1.459.583.800
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	100%		210.975.100
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	smd	210.975.100
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				211.021.800
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kegiatan	smd	195.021.800
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Kegiatan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		
4.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	12 Kegiatan	smd	16.000.000
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				17.560.315.000
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				17.560.315.000
4.06.01.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				17.560.315.000
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	84%		4.736.995.500
4.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	smd	4.736.995.500
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit		4.699.628.508
4.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	smd	2.356.021.140
4.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	smd	2.343.607.368
		Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	91%		241.456.847
4.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 kegiatan	smd	186.456.847
4.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	0 orang	smd	55.000.000
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	78 Nilai		69.469.688
4.06.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6 Dokumen	smd	5.930.888
4.06.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	11 Dokumen	smd	63.538.800
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	75%		960.996.457
4.06.15.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Jumlah Tenaga Widya Iswara dan Asesor	14 orang	smd	448.166.457
		Jumlah kegiatan Pengelolaan Kelembagaan	1 kegiatan		
4.06.15.03	Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Peserta Uji Kompetensi	0 orang	smd	282.280.000
4.06.15.04	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah Dokumen Kerjasama Kab/Kota	0 Dokumen	smd	230.550.000
		Jumlah Sarana Pendukung Pembelajaran	1 unit		
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	15%		2.845.770.000
4.06.16.01	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	150 orang	smd, luarPrv	448.690.000
4.06.16.02	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi	240 Orang	smd, luarPrv	1.414.850.000
4.06.16.03	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	320 Orang	smd, luarPrv	982.230.000
4.06.16.04	Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi (Kontribusi)	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	0 orang	smd, luarPrv	-
4.06.16.05	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi (Kontribusi)	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi	0 orang	smd, luarPrv	-
4.06.16.06	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang (Kontribusi)	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang	0 orang	smd, luarPrv	-
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial dan pemerintahan serta bagi jabatan fungsional	60%		4.005.998.000
4.06.17.03	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III	40 orang	smd	2.161.662.500
		Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	40 orang		

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Peserta Diklat Pelatihan Dasar Gol. II dan III	0 orang		
4.06.17.04	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi untuk Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	60 orang	smd	401.150.500
4.06.17.05	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	90 orang	smd	327.665.000
4.06.17.06	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan (Kontribusi)	Jumlah Peserta Diklat Pelatihan Dasar Gol. II dan III	120 orang	smd, luarPrv	1.115.520.000
4.06.17.07	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi (Kontribusi)			smd	-
4.07	Penelitian dan Pengembangan				5.804.414.560
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan				5.804.414.560
4.07.01.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				5.804.414.560
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%		967.059.360
4.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	15 kegiatan	smd	967.059.360
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit		659.650.000
4.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	8 kegiatan	smd	659.650.000
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	81%		702.420.000
4.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	130 orang	smd	494.620.000
4.07.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	11 orang	smd, luarPrv	207.800.000
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	79 BB		25.500.000
4.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 dokumen	bpn, smd, luarPrv	21.000.000
4.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	23 laporan	bpn, smd, luarPrv	4.500.000
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%		485.120.000
4.07.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelitbang	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbang	80%	smd	83.600.000
		Jumlah artikel Jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuana	70 artikel		
4.07.23.03	Rakorda Kelitbang	Persentase terselenggaranya kegiatan rakorda kelitbang	100%	bpn	401.520.000
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	80%		1.525.112.500
4.07.41.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan litbang sub bidang ekonomi yang dilaksanakan	1 Laporan	smd	1.487.465.500

KODE	PRANGKAT DAERAH URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	RKPD PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan litbang sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Laporan		
		Jumlah laporan sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana yang dilaksanakan	1 laporan		
4.07.41. 02	Penelitian mandiri bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	6 laporan	smd	37.647.000
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	80%		781.560.700
4.07.47. 01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	1 Laporan	smd	735.560.700
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	1 laporan		
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbang yang dilaksanakan	1 laporan		
4.07.47. 02	Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi	jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	1 Laporan	smd	46.000.000
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan	80%		657.992.000
4.07.48. 01	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan	1 Laporan	smd	579.687.000
		Jumlah laporan litbang sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dilaksanakan	1 laporan		
		Jumlah laporan litbang sub bidang sosial dan budaya yang dilaksanakan	1 Laporan		
4.07.48. 02	Penelitian mandiri bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan	6 laporan	mah, smd	78.305.000
	JUMLAH				4.576.432.067.992

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2020 merupakan penjabaran dari Tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2020, dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, maka untuk mencapai target kinerja pembangunan tahun 2020 dalam pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2020 beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu:

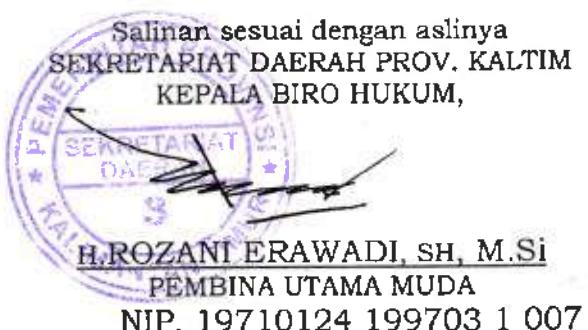
1. Seluruh Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2019-2023;
2. Dalam upaya menjaga konsistensi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah /Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2020 serta memperhatikan perkembangan realisasi kinerja dan anggaran Renja sampai dengan dengan Triwulan II tahun 2020;
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Tahun 2020 melalui Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah.
4. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2020 serta P-RAPBD Perubahan tahun 2020.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan;
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020;

7. Pada akhir tahun 2020, setiap kepala Perangkat Daerah /Instansi wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah /Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2022;
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2020, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR





BAPPEDA

Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor : Jl. Kesuma Bangsa No. 02
Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044